

MOESLIMCHOICE



ISSN_2614-2783



Rp 75.000

INILAH UMARO DARI PILKADA 2024

AKSI
DAMAI
WAMENDAGRI
BIMA ARYA

MENYOAL
PENURUNAN
ANGKA PEMILIH
PILKADA

ANTARA
ITSBAT DAN
NIKAH
ULANG

MARCELL
DARWIN
MENDADAK
MUALAF

KESEHATAN
MENTAL
PENTING
JUGA

MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadh, i
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

JUMADIL ULA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Almanak hijriyah memasuki bulan kelima, Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1446. Beriringan dengan itu kalender gregorian berada di pertengahan November 2024.

Di Indonesia, titik temu Jumadil Awal dan November kali ini sama-sama akan bersuasana lebih dingin. Sementara Jumadil Awal, berasal dari kata jumud (beku), November di wilayah dengan iklim tropis pada umumnya berada di awal musim penghujan. Sama-sama dingin.

Namun, dingin atau beku dalam konteks cuaca tampaknya berseberangan dengan dinamika sosial-politik di dalam negeri yang bolehlah dibilang menghangat. Harap maklum, November seiring Jumadil Ula kali ini berada dalam siklus menjelang puncak perhelatan politik yang terjadwal pada 27 November 2024: Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Toh Pilkada berada di ranah politik lokal: provinsi, kabupaten, kota.

Meski begitu, tak mungkin memisahkan Pilkada dengan dinamika politik nasional terlebih Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal yang menggabungkan daerah federasi menjadi bersatu, seperti United States misalnya, atau Republik Federal Jerman. Pengalaman menerapkan sistem federal di masa Republik Indonesia Serikat tampaknya masih tertanam dan membekas dampak negatifnya.

Tambahan pula, dinamika politik nasional pada Jumadil Awal 1446 seiring November 2024 menunjukkan semangat dan upaya untuk mengedepankan pemerintah yang bersih, clean government. Ini akan menjadi pendorong baru untuk memperkuat penerapan negara kesatuan. Namun, keragu-raguan dapat membentuk pemerintah bersih memang menjadi tantangan bagi kesanggupan kita bersama mewujudkannya.

Yang jelas, dinamika politik dan penegakan hukum sejak awal November 2024 justru menunjukkan betapa buruknya dampak keraguan membentuk pemerintahan yang bersih. Dinamika yang kita maksud adalah keterlibatan pegawai pemerintah sebagai regulator dalam melindungi perjudian menggunakan jaringan internet atau judi online. Nah, penegakan hukum terhadap keterlibatan pegawai pemerintah yang justru merintang program pembersihan judi online dapatlah menjadi salah satu indikator, apakah kita sungguh-sungguh ingin membentuk pemerintahan yang bersih.

Satu hal, judi online menunjukkan lagi salah satu disrupsi (gangguan) yang muncul dari revolusi industri tahap keempat berupa perkembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sejak awal Abad XXI. Sebelum itu, negara lebih mudah melokalisasi judi seperti di tempat khusus semisal kasino. Seperti di Las Vegas di Amerika Serikat, Macau, tetangga Hongkong, atau di Genting Highland, Malaysia.

Toh semua sudah terjadi. Disrupsi TIK memang luar biasa, tak hanya merambah judi, tapi juga pelacuran, narkoba, maupun aneka hal yang diharamkan oleh agama. Semoga kita lebih siap menghadapinya. Juga mengatasinya segera. Jumadil Ula kali ini, tampaknya merupakan seruan bagi kita untuk meninggalkan kejuduman. ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786**EMAIL :**

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV



06



24



48



28

06

LAPORAN UTAMA

Perhitungan resmi hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 masih berlangsung sejak hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

28

SUMSEL SYARIAH

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, S.H., M.S.E, mengajak seluruh elemen masyarakat bersamasama menjaga keamanan dan ketertiban. Agar Pilkada Serentak 2024, yang Pemungutan Suara berlangsung pada Rabu, 27 November, lancar dan sukses.

24

EKONOMI SYARIAH

Pemerintah Presiden Prabowo membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tentu terkait soal sertifikasi halal.

48

BIROKRASI KEMENDAGRI

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamen-dagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan, bahwa pemerintah akan membangun kembali infrastruktur yang terdampak akibat konflik sosial antar-dua desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).



44

KEMENAG

Demi meningkatkan kualitas layanan keagamaan, Kementerian Agama (Kemenag) berencana menyusun kurikulum masjid. Langkah ini sangat penting untuk memperdalam pengetahuan keagamaan masyarakat.

84

PARLEMEN

Penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sorotan banyak kalangan. Komisi II DPR RI pun angkat bicara.

88

LAPORAN KHUSUS

Penyelenggaraan ibadah haji memang perlu perbaikan. Kesempatan terakhir Kementerian Agama menyelenggarakannya di musim haji 1446 hijriyah pada 2025. Selanjutnya giliran Badan Penyelenggara Haji.

50

BIROKRASI KEMENDAG

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pelaku usaha harus terus meningkatkan daya saing. Daya saing yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Hal ini merupakan salah satu fondasi penting bagi perjalanan menyongsong Indonesia Emas 2045.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 40 | WISATA HALAL
- 60 | KAJIAN
- 64 | MUALAF
- 68 | KESEHATAN
- 70 | PILKADA SUMSEL
- 78 | RESENSI
- 80 | INSPIRATIF
- 82 | KOLOM 1
- 86 | PILKADA
- 98 | KOLOM 2



MENUJU INDONESIA MAJU BERSAMA PILKADA SERENTAK 2024

Perhitungan resmi hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 masih berlangsung sejak hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024. Proses penghitungan (rekapitulasi) melalui jenjang-jenjang mulai dari tempat pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 28 November hingga 3 Desember 2024.

Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024. Berikut ini pengantar rekapitulasi pemilihan gubernur di delapan provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. (Redaksi)

Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan TUMPUKAN MASALAH JABAR SUDAH MENANTI

Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berpeluang besar terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada 2024. Perhitungan sementara menunjukkan Dedi-Erwan unggul dari tiga paslon lainnya.

Dengan total daftar pemilih tetap tercatat sebanyak 35.925.960 orang, pentas politik pemilihan gubernur Jawa Barat menawarkan empat pasangan calon (Paslon) Gubernur. Masing-masing, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina (Gita KDI), nomor urut 1; Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, nomor urut 2; Ahmad Syaikhul Ilham Akbar Habibie, nomor urut 3; dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, nomor urut 4.

Hasil penghitungan suara sementara berdasarkan big data (data besar) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul di Pilkada Jawa Barat. Jika tak ada aral melintang, Kang Dedi (nama ringkas Dedi Mulyadi) akan menjadi Gubernur Jawa Barat, dan Kang Erwan menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan perhitungan sementara mencakup 73.088 dari 73.862 TPS di seluruh Jabar, Dedi-Erwan untuk sementara meraih 13.841.247 suara sah atau sekitar 62,29 persen dari 22.219.374 pemilih yang datanya sudah terhimpun pada Kamis, 29 November 2024. Dengan sisa suara yang belum terhitung kurang



dari 14 juta, dengan distribusi merata, pasangan Dedi-Erwan akan memenangi Pilgub Jabar sebagaimana big data yang telah terhimpun berdasarkan nomor urut paslon:.

1. Acep-Gita memperoleh 2.161.396 suara atau 9,73 persen suara sah,
2. Jeje-Ronal memperoleh 2.075.032 suara atau 9,34 persen suara sah,
3. Syaikhul-Ilham memperoleh 4.141.699 suara atau 18,64 persen suara sah,
4. dan Dedi-Erwan memperoleh 13.841.247 suara atau 62,29 persen suara sah.

Meski begitu, KPU menegaskan, hasil penghitungan berdasarkan publikasi formulir Model C/D bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik, sehingga bukan merupakan hasil akhir Pilkada 2024. Sambil menunggu hasil, akhir, pasangan Dedi-Erwan sebenarnya sudah sangat siap mengemban amanah sebagai Jabar 1 (Gubernur) dan Jabar 2 (Wakil Gubernur)

Dalam kampanye penutup di Bogor, kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia, Kang Dedi mengungkapkan kehidupan masyarakat Jawa Barat, dengan segala tantangan dan kesulitan, menjadi cermin bagi perjuangan yang harus dihadapi bersama. Beberapa poin pernyataannya merujuk pada masalah-masalah dasar warga seperti pendidikan dan kesehatan.

Kang Dedi menyebut beberapa masalah antara lain, rumah sakit yang menahan pasien karena tunggakan BPJS, hingga masyarakat yang terjerat hutang rentenir dan terkena dampak penambangan yang merusak lingkungan. "Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat," kata Cagub yang berpengalaman menjadi Bupati Purwakarta itu dalam pernyataan penutup (closing statement) debat terakhir Pilgub Jabar, di Gedung Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu malam, 23 November 2024.

Belum lagi kerawanan dalam kehidupan warga Jabar. "Di daerah seperti Cianjur, masih banyak rumah yang hancur akibat gempa. Sementara di Sukabumi, anak-anak dan guru terpaksa meniti jembatan yang rawan membahayakan jiwa," ujarnya.

Persoalan-persoalan mendasar ini, sambungnya, bukan hanya sekadar masalah lokal, melainkan juga cermin krisis yang lebih luas, dari ketidakmampuan membiayai kebutuhan dasar sementara kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan sehari-hari terus berlanjut. "Di Parung Panjang, Bogor, misalnya, penambangan ilegal terus menambah beban masyarakat yang sudah lama menderita akibat kerusakan alam," kata Dedi.

Tambahan pula, kata Dedi, masalah di Taringgul yang terkait dengan biaya perawatan di rumah sakit maupun pengobatan rawat jalan yang tak terjangkau. "Juga persoalan sampah yang semakin menumpuk di perkotaan memberikan gambaran nyata betapa besar masalah yang harus segera diselesaikan," ujar Kang Dedi.

Namun, di tengah segala kesulitan tersebut, ia menyampaikan bahwa pasangan Dermawan (Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan)

pembayaran atau dampak pencemaran lingkungan yang merusak kualitas hidup.

Kecuali itu, Dedi mengemukakan, perhatian khusus juga akan diberikan pada perbaikan infrastruktur dan penyelesaian masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan air yang terus memburuk. Harapan dari pasangan Dermawan adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, yang dalam bahasa Sunda dikenal dengan ungkapan "gemah ripah repeh rapih, subur makmur."



hadir dengan visi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dedi-Erwan berjanji jika terpilih akan menggunakan seluruh ilmu, kemampuan, dan tenaga mereka untuk membangun kembali dan menyelesaikan masalah yang melilit masyarakat.

Pasangan ini bertekad untuk memastikan setiap warga Jabar dapat hidup dalam lingkungan yang sehat, bebas dari hutang, dan memiliki akses yang layak terhadap kesehatan serta pendidikan. Mereka juga menegaskan akan merawat dan menyembuhkan luka-luka sosial yang selama ini dibiarkan begitu saja, seperti masalah rumah sakit yang menahan pasien karena masalah

"Masyarakat yang tidak hanya hidup dalam keadaan cukup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan," kata Dedi.

Dedi-Erwan ingin melihat masyarakat yang berdaya, tidak hanya mengandalkan belas kasihan, tetapi bisa berdiri tegak dengan kebanggaan dan rasa aman. Kang Dedi menegaskan lagi pasangan Dermawan tidak hanya hadir untuk berjanji, tetapi untuk beraksi. "Tunggu kami di tengah masyarakat, pilih nomor 4 untuk perubahan yang nyata," ujar Kang Dedi berseru.

Tunggu rekapitulasi selesai dulu ya Kang Dedi dan Kang Erwan, Juga pelantikan. ♦

Khofifah-Emil

JANJI MASA DEPAN JAWA TIMUR LEBIH CERAH

Di Jawa Timur, petahana Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berpeluang besar memimpin provinsinya untuk periode kedua. Khofifah Emil optimistik masa depan Jawa Timur akan lebih cerah.

Dari penghitungan suara sementara hasil pengolahan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga Kamis malam, 28 November 2021, telah tercakup data 60.219 dari 60.751 tempat pemungutan suara (TPS) di ujung timur Jawa itu. Alhasil, Khofifah-Emil untuk sementara meraih 12.018.858 suara atau 58,7 persen suara

sah di provinsi dengan DPT 31.280.418 warga itu.

Paralel dengan itu, hitung cepat (quick count) beberapa lembaga jajak pendapat juga menunjukkan keunggulan Khofifah-Emil. Hasil quick count dari Poltracking, Khofifah-Emil unggul dengan perolehan suara 59,22 persen. Sedangkan hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan Khofifah-Emil meraih 58,42 suara pemilih. Hitung cepat Charta Politika menunjukkan perolehan suara pasangan nomor urut 2 di Pilkada Jawa Timur ini meraih 57,23 persen suara pemilih.

Pesaing Khofifah Emil adalah nomor urut 1 pasangan Luluk-Lukman dan Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans). Sedangkan pasangan nomor urut 3 adalah Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

Menanggapi hasil quick count, Khofifah mengungkapkan masih akan menunggu

rekapitulasi KPU. "Tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini, kita semua masih akan menunggu penghitungan resmi," ujar Khofifah, Rabu, 27 November 2024 malam.

Namun, dalam kampanye terakhirnya, pasangan Khofifah-Emil mengajak masyarakat Jawa Timur seluruhnya untuk optimistik menyambut masa depan lebih cerah di provinsi ini. "Masyarakat Jawa Timur dan pemirsa yang menyaksikan, mudah-mudahan malam ini, melalui debat ini, kita semakin yakin bahwa Jawa Timur punya potensi yang sangat besar ke depannya," ujar Emil dalam pernyataan penutup (closing statement) di debat terakhir kampanye pada Jumat malam, 18 November 2024.

Pasangan yang menawarkan visi Jawa Timur menjadi gerbang baru pembangunan dan perekonomian Nusantara itu



mengungkapkan keunggulan provinsinya sejauh ini. “Kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami malam ini ingin menyampaikan komitmen kami bahwa program pembangunan infrastruktur In-syaAllah di Jawa Timur sudah makin berkembang dan membangun interkoneksi tidak hanya antar daerah di Jawa Timur tetapi juga antara Indonesia barat dan Indonesia timur. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua syukuri nikmat bahwa Sumber Daya Manusia Jawa Timur luar biasa,” ujar Khofifah,

la menyebut bahwa Jawa Timur diberikan kesempatan dengan mengelola dua pelabuhan sekaligus. Hal itu, kata dia, Jawa Timur memang memiliki SDM yang luar biasa. “Hanya Provinsi Jawa Timur yang diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat mengolah dua pelabuhan sekaligus. Satu adalah Pelabuhan Udara Abdurrahman Saleh dan ada Pelabuhan Laut yang ada di Probolinggo. Ada provinsi lain tapi mereka masih KSO. Artinya Saya ingin menyampaikan bahwa SDM di Jawa Timur memang memiliki kompetensi yang luar biasa,” sambungnya.

Khofifah menyebut bahwa Jawa Timur saat ini memiliki TransJatim. Dia pun berjanji bahwa jika kembali terpilih, dia akan kembali menambah lima koridor TransJatim. “Oleh karena itu apa yang menjadi pembangunan infrastruktur kita berkomitmen pada banyak hal termasuk di dalamnya terkait dengan interkoneksi bahwa kita telah memiliki TransJatim. Hari ini ada 5 koridor. In-syaAllah 2 tahun lagi kita akan tambah 5 koridor lagi. Plus berikutnya kita akan kembangkan di Malang Raya, Madiun saya dan Jember Raya. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kontribusi Jawa Timur yang memberikan dua besar kontribusi pada PDB di Indonesia. Semuanya berseiring dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan lahan pertanian yang berkesinambungan,” terangnya.

Sedangkan Emil menambahkan, Jawa Timur merupakan penggerak ekonomi nasional. Provinsi ini, sambungnya, menjadi penyumbang 22 persen lebih dari output industri manufaktur atau pengolahan. “Dan Jawa Timur tentunya menjadi lumbung pangan Nasional. Oleh karena itu dengan posisi sebagai pusat industri dan pusat pangan maka konektivitas Jawa Timur dengan pulau-pulau yang ada di luar Jawa serta konektivitas di dalam Pulau Jawa sendiri menjadi Jawa Timur sebagai dengan provinsi pusat logistik yang sangat potensial,” ungkap Emil.

Emil mengemukakan pula, pemerintah saat ini berkomitmen mengembangkan

Ibu Kota Nusantara sebagai pembangunan yang Indonesia sentris yang mengakselerasi kawasan timur Indonesia. Terkait itu, ia pun bertekad membawa Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Karena itu dengan posisi Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian di Indonesia lumbung pangan nasional, pusat industri, dan juga pusat perdagangan nasional, maka Jawa Timur dengan ini senantiasa siap untuk mewujudkan provinsi ini sebagai Gerbang

gunan manusia, kita telah mendengar hari ini, fakta dan datanya bahwa indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yang merupakan hasil peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan, ini berada di atas rata-rata nasional,” kata Emil.

la menambahkan, tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur telah menurun drastis dan kini hampir mencapai 0,66 persen. Jadi, ia mengapresiasi ketangguhan masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi tantangan.



Baru Nusantara,” ujarnya.

Mengenai sumber daya manusia, Emil mengemukakan peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yang kini berada di atas rata-rata nasional hasil dari peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di provinsi ini. Menurut dia, Jawa Timur hendaknya optimistik bahwa jalan kebangkitan yang sedang kita tempuh ini akan mengantarkan kita kepada cita-cita yang lebih besar lagi.

“Karena untuk mewujudkan pemban-

“Kemiskinan ekstrem yang tadinya lebih tinggi dari nasional kini berada di angka yang hampir 0,66 persen. Ini adalah ketangguhan segenap masyarakat Jawa Timur,” ujar Emil.

Akhirnya Emil mengajak warga Jawa Timur optimistik menyongsong masa depan. “Mari kita optimistik, mari kita yakin karena terang benderang segala langkah segala program yang merupakan upaya dan kerja keras seluruh pihak masyarakat dan pemerintah bisa mengantarkan kita ke sana,” tandasnya. ♦



Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen

JATENG MENANTI SING NGOPENI LAN NGLAKONI

Jawa Tengah tercatat memiliki 28 juta lebih warga yang terhimpun dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2024. Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin menjadi unggulan untuk memenangi pemilihan menu-rut hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei.

Dengan total daftar pemilih tetap tercatat sebanyak 28.247.616 daftar pemilih tetap, Pilkada 2024 menawarkan dua pasangan calon gubernur Jawa Tengah. Masing-masing, pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Usai pemungutan suara Rabu, 27 No-

vember 2024, laman web pengembangan untuk merekam rekapitulasi KPU RI sempat menyajikan hasil perolehan suara hingga hampir 20 juta pemilih hingga Kamis malam, 28 November 2024. Tampilannya menunjukkan, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.350.609 suara, sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.841.476 suara. Toh hasil resmi selengkapnyanya tetap berada dalam kewenangan KPU.

Sedangkan beberapa lembaga survei juga sudah mengeluarkan hasil hitung cepatnya. Hitung cepat Charta Politika menunjukkan Luthfi Taj Yasin unggul dengan memperoleh 58,44 persen suara. Sedangkan hitung cepat Indikator Politik Indonesia menghasilkan perolehan suara 58,30 persen suara untuk pasangan nomor urut 2 itu. Selanjutnya hitung cepat Saiful Mujani menunjukkan pasangan Luthfi-Taj Yasin memperoleh 59,13 persen suara.

Menanggapi hasil hitung cepat, Luthfi mengemukakan angka-angka itu melebihi ekspektasi (harapan). Toh ia menegaskan akan tetap menunggu hasil resmi dari KPU.

"Saya juga kaget. Tapi, apa pun itu kami masih akan menunggu hasil perhitungan dari KPU," ujar Luthfi dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV di Posko Pemenangan Luthfi-Yasin, Kota Semarang, Rabu, 27 November 2024.

Ia melihat keunggulan itu sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Jateng kepadanya untuk memimpin Jateng. "Ini kemenangan masyarakat. Masyarakat yang menentukan," ujarnya singkat.

Luthfi juga mengaku bahwa kemenangan itu tidak terlepas dari kerja keras seluruh relawan dan partai-partai pendukung. Mereka bekerja keras untuk mensosialisasikan program yang diusung pasangan Luthfi-Yasin.

Sedangkan Hendrar Prihadi menyatakan meski pihaknya kalah, mereka tetap menghormati hasil tersebut. "Saya harus jujur, meskipun hingga kemarin kami masih sangat optimis, hasil quick count menunjukkan pergerakan luar biasa dari pihak sebelah. Namun, seperti dalam setiap pertarungan, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya ucapkan selamat kepada Mas Luthfi dan Gus Yasin atas kemenangan ini," ungkap Cawagub yang biasa didapa Hendi kepada wartawan di Semarang.

Meski hasil sementara menunjukkan kekalahan, Hendi meminta para pendukung dan simpatisan untuk menerima hasil ini dengan legawa. "Saya rasa semua strategi sudah dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Jika hasilnya seperti ini, itu berarti strategi mereka lebih baik, dan kita harus menerima kenyataan," tambah Hendi.

Nah, salah satu strategi Luthfi-Taj Yasin untuk memikat para pemilih adalah mengemukakan kearifan lokal dalam memimpin. Sesuai dengan tagline atau slogan kampanyenya, Luthfi menegaskan dalam debat kedua pada Minggu, 10 November 2024, Jawa Tengah memerlukan seorang pemimpin yang tidak hanya mampu ngopeni (merawat) tetapi juga nglakoni (melaksanakan) program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Filosofi ngopeni dan nglakoni, menurut dia, mencerminkan kepedulian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, agar segala aspirasi rakyat dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dalam pernyataan penutupnya, Luthfi membawakan filosofi Jawa yang penuh makna tentang pentingnya hubungan antara manusia dan alam, sekaligus visi untuk menjadi pemimpin yang mengayomi semua kalangan masyarakat di Jawa Tengah.

Selain itu, Luthfi mengutip pepatah Jawa, "Ibu Bumi kang ditresnani, ibu bumi ingkang bakal jangkepi," yang berarti "Jika bumi kita cintai, bumi akan mencukupi."

Dengan filosofi ini, ia mengajak masyarakat untuk merenungkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Menurut dia, pemimpin Jawa Tengah harus memiliki kemampuan untuk "menghubungkan" berbagai lapisan masyarakat serta pemerintah pusat dan daerah, agar tercipta keharmonisan yang diperlukan untuk pembangunan provinsi ini.

"Falsafah ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab seorang pemimpin Jawa Tengah untuk mampu menghubungkan seluruh elemen masyarakat. Jateng butuh pemimpin yang memahami dan menyatukan semua kalangan, dari rakyat kecil hing-

ga pemangku kebijakan, sehingga suara mereka dapat terdengar dan diperjuangkan," ujar Luthfi.

Menyambung pernyataan penutup dari Luthfi, Taj Yasin mengungkapkan terima kasih kepada penyelenggara debat, seluruh pendukung, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti dan mendukung proses Pilkada ini. Selanjutnya Taj Yasin mengakhiri penutupan dengan membawakan lagu tradisional Jawa "Lir Ilir".

Lagu ini sarat dengan makna kebangkitan dan semangat, menggugah jiwa untuk bangkit dan berkembang. "Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir..." lantunan syair ini disampaikan oleh Taj Yasin dengan penuh penghayatan, mengingatkan masyarakat untuk bangkit dan bekerja sama dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Sedangkan dalam debat terakhir yang berlangsung di Muladi Dome Universitas Diponegoro Semarang, Rabu malam, 20 November 2024, yang membahas tema Membangun Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan untuk Masyarakat yang Sejahtera dan Toleran, Lu-

thfi antara lain mengemukakan ketenagakerjaan menjadi pekerjaan rumah bersama.

Salah satu yang ia tawarkan adalah mendekatkan kurikulum pendidikan di Jateng dengan dunia pekerjaan. "Jadi lulus sekolah bisa langsung kerja, kemudian negara harus hadir dalam menangani kemiskinan ekstrem," paparnya.

Untuk itu, Luthfi mengatakan, harus ada program sekolah gratis, subsidi pangan murah, hingga kesehatan gratis. Ia berujar, program sekolah gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Luthfi juga akan mendirikan desk tenaga kerja untuk melindungi hak para buruh, bekerja sama dengan Polda Jateng. "Kami akan memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan, baik jam kerja hingga hak cuti saat hamil. Karena kami yakin, buruh bisa meningkatkan perekonomian Jateng," katanya.

Cara memandang kepemimpinan dan janji kampanye telah terungkap. Rakyat Jateng akan menjadi saksi Luthfi-Taj Yasin ngopeni lan nglakoni setelah pelantikan. ♦



Bobby-Surya

HENDAK MENGATASI BANYAK MASALAH

Tercatat memiliki 10,77 juta jiwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Pilkada Sumatera Utara 2024 menawarkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasangan nomor urut 1 Bobby-Surya unggul dalam hitung cepat beberapa lembaga jajak pendapat.

Dengan total pemilih terdaftar sebanyak 10.771.496 warga, hasil hitung cepat Pilkada Sumatera Utara menunjukkan pasangan nomor urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Toh hasil hitungan resmi tetap harus menunggu rekapitulasi final KPU yang dijadwalkan pada 30 November hingga 15 Desember 2024.

Sedangkan berdasarkan hasil quick count Indikator Politik dengan jumlah suara masuk 100 persen per Kamis, 28 November 2024, Bobby yang merupakan menantu Presiden ke-7 Jokowi itu unggul hingga 62,71 persen suara di Pilkada Sumut 2024. Paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menurut hitung cepat Indikator Politik, meraih 37,29 persen suara.

Begitu pula Charta Politika Indonesia menyebut suara Bobby-Surya mencapai 62,71 persen. Adapun Edy-Hasan

hanya meraup 37,29 persen suara. Sedangkan hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan sekitar 97,33 sampel menunjukkan pasangan Bobby-Surya unggul 63,09 persen dibandingkan dengan pasangan Edy-Hasan dengan 36,91 persen suara.

Sebagai perbandingan, laman web pengembangan untuk merekam rekapitulasi KPU RI sempat menyajikan hasil perolehan suara hingga hampir 5,2 juta suara asal 24.099 dari 25.223 tempat pemungutan suara (TPS) se-Sumut menunjukkan, pasangan Bobby-Surya meraih

3.434.824 suara pemilih. Sedangkan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendapatkan 1.888.914 suara pemilih.

Nah, dalam kampanyenya, pasangan Bobby-Surya mengem-



kakan antara lain kepemimpinannya akan mengedepankan kolaborasi dan humanis (manusiawi). Selain menjadi pemimpin yang humanis, juga akan mengayomi masyarakat Sumatera Utara, termasuk pemerintah kabupaten dan kota. "Kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur yang humanis," ucap Bobby dalam Debat Perdana Pilgub Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 30 Oktober 2024..

Bobby juga mengemukakan pentingnya sikap seorang gubernur yang menghormati dan patuh kepada pemerintah pusat. Menurut dia, hal ini penting lantaran Provinsi Sumatera Utara masih merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Gubernur itu, kata Bobby, perlu pemerintah pusat untuk mengayominya. "Gubernur itu perlu kabupaten/kota untuk kerja bersama-sama, berdampingan dengan dirinya, bukan menakut-nakuti kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara," ungkap Bobby yang berpengalaman menjadi Wali Kota Medan.

Sedangkan Cawagub Paslon nomor 1, H. Surya, menekankan hal yang sama dalam narasinya. Menurut dia, dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh mengedepankan emosi dan arogan. "Menjalankan pemerintahan jangan emosional, jangan arogan, dan jangan suka marah-marah," ujar Surya yang memiliki rekam jejak sebagai Bupati Kabupaten Asahan.

Selanjutnya, pada debat terakhir yang berlangsung di Tiara Convention Hall Medan, Rabu, 13 November 2024 suasana sempat memanas. Berawal dengan moderator debat menyampaikan pertanyaan kepada dua cawagub. Inti pertanyaan adalah langkah apa yang akan diambil kedua Cawagub untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Karena sesi untuk Cawagub, moderator meminta Surya menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Lantas Surya mengemukakan bahwa dia dan Bobby memiliki program yang berkomitmen untuk memberantas KKN, menghilangkan praktik suap, gratifikasi, hingga jual beli jabatan.

Menanggapi pernyataan Surya, Cawagub nomor urut 2 Hasan Basri menyinggung persoalan lampu pocong yang terjadi saat Bobby menjadi Wali Kota Medan. Hasan juga menyinggung soal isu Bobby yang diduga menaiki private jet atau jet pribadi dari salah seorang pengusaha.

Sedangkan Surya kembali menjawab bahwa sama seperti Edy, dirinya juga tidak pernah dipanggil penegak hukum saat menjabat sebagai Bupati Asahan. "Untuk (soal) yang lampu (pocong) kami silakan, Pak Gubernur," ujar Surya sambil memberikan mikrofon-nya kepada Bobby.

Bobby memegang mikrofon dan mulai menjawab. "Oke terima kasih Pak Hasan, kami ingin...," ujar Bobby.

Namun, pada momen itu moderator menginterupsi Bobby. Moderator menjelaskan bahwa perdebatan untuk sesi ini dikhususkan untuk cawagub kedua Paslon.

Bobby lalu menjawab, "Tadi katanya boleh nambahin, (sekarang) nggak boleh?" ujar Bobby.

Toh di akhir debat pasangan Bobby-

pemikiran kami untuk membangun Sumut. Dan tentunya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sumut apabila selama masa kampanye ada kesalahan dan kekhilafan kami," ujarnya.

Bobby pun mengingatkan para pendukung agar tidak memfitnah maupun menjelekkan paslon lainnya. Alasannya, musuh yang harus dihadapi Sumut bukanlah antarpaslon, melainkan masalah kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur yang



Surya memohon maaf kepada pasangan pesaingnya dan segenap pemangku kepentingan Pilgub Sumut. "Tentunya dalam masa kampanye ini kami paham, kami sadar, kami punya kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu kami memohon maaf ke Pak Edy Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala. Kalau masa kampanye kami ada kesalahan dan kekhilafan kepada Pak Edy dan Pak Hasan," kata Bobby.

Ia menyebutkan debat ketiga ini menjadi tanda berakhirnya masa kampanye paslon Pilgub Sumut. "Debat ketiga ini penanda akan berakhirnya masa kampanye. Kami sudah sosialisasi kan gagasan dan

belum merata.

"Kami imbau pendukung pengusung dan tim kemenangan relawan Bobby-Surya. Di sisa akhir masa kampanye jangan memfitnah jangan menjelekkan jangan buat isu yang tidak tidak. Musuh kita bukan antarpaslon, musuh kita ini kemiskinan yang ada di Sumut, musuh kita ini adalah infrastruktur yang belum merata, musuh kita narkoba di Sumut, musuh kita judi online," ujarnya.

Kampanye, debat, dan pemungutan suara telah berlangsung. Tunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengatasi masalah-masalah yang telah terungkap sejauh ini. ♦

Andra Soni-Dimyati Natakusumah **AGAR BANTEN LEBIH SETARA**

Terbentuk sebagai provinsi pada 2000, Pilkada Banten 2024 mencatatkan 8,9 juta warga terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Hasil hitung cepat beberapa lembaga jajak pendapat mengunggulkan pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten hasil Pilkada kali ini.

Di Provinsi Banten, ada dua pasangan calon (paslon) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bersaing: Pasangan nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan pasangan nomor urut 2 Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah. Kedua paslon memperebutkan 8.926.662 suara warga yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024.

Alhasil, hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga jajak pendapat menunjukkan pasangan Andra-Dimyati unggul dengan kisaran perolehan suara 57 persen suara pemilih. Namun, yang akan mengumumkan hasil resmi adalah Komisi Pemilihan

Umum setelah menyelenggarakan rekapitulasi final.

Dari hitung cepat setelah pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024, Charta Politika menyebut paslon nomor urut 2 Andra-Dimyati meraih 57,52 persen suara pemilih. Sedangkan paslon Airin-Ade beroleh 42,48 persen suara pemilih. Hasil hitung cepat serupa datang dari Litbang Kompas. Sedangkan hasil hitung cepat Voxpol menunjukkan Andra-Dimyati meraih 57,08 persen suara, mengungguli Airin-Ade yang perolehannya 42,92 persen suara pemilih.

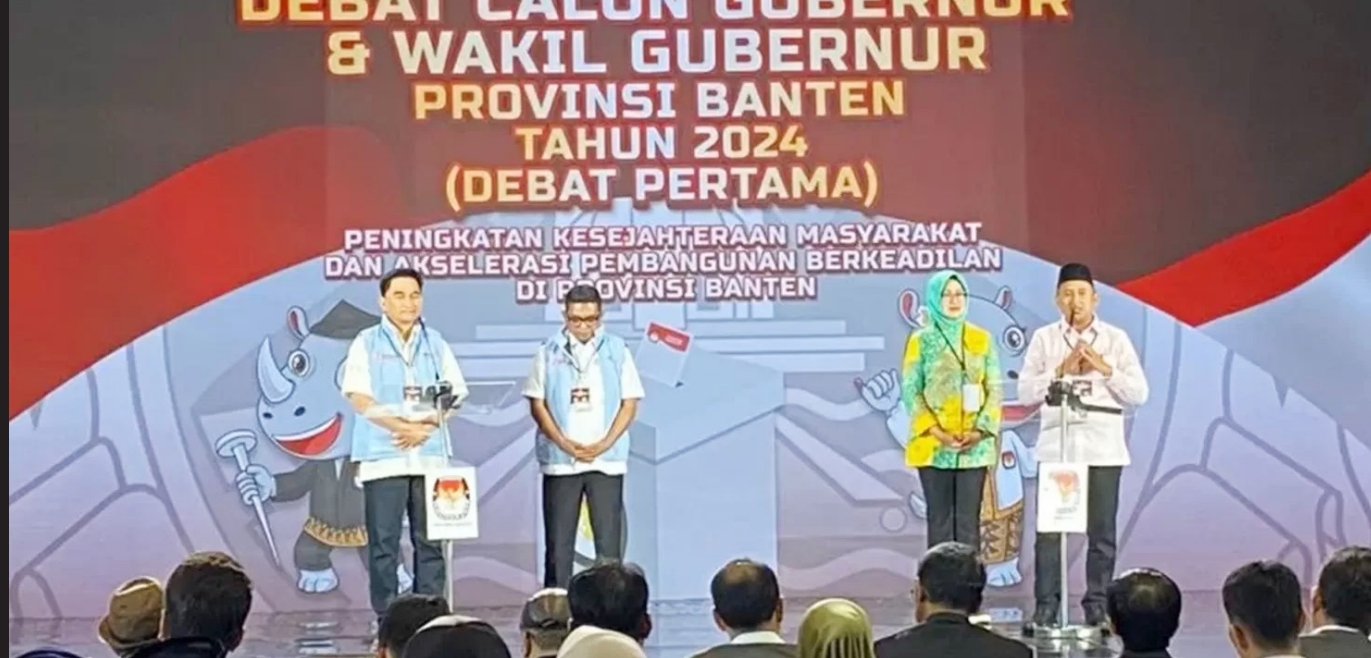
Nah, dalam beberapa sesi debat menjelang pemungutan suara terungkap para paslon menghendaki kemajuan Banten yang masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Jawa yang telah terbentuk

lebih lama. Antara lain dalam debat perdana yang mengusung tema "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Berkeadilan di Provinsi Banten".

Pada debat pertama yang berlangsung di Menara Bank Mega Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024 itu Cagub nomor urut 2 Andra Soni mengemukakan soal kualitas pendidikan dan sumber daya manusia warga Banten. Menurut dia, Banten kalah dari Jakarta soal indeks pembangunan manusia berkorelasi dengan proses lama belajar.

Rata-rata lama sekolah masyarakat Banten, kata dia, berada di kisaran sembilan tahun (SD dan SMP). Sedangkan Jakarta rata-rata warganya bersekolah selama kisaran 13 tahun (lulus SMA





dan pernah masuk perguruan tinggi). "Itu timpangnya terlalu jauh," kata Andra yang sebelumnya menjadi Ketua DPRD Banten 2019-2024.

Menurut dia, ketimpangan itu menunjukkan kesempatan mengenyam pendidikan belum merata. Andra bilang, ketimpangan kesempatan itu disebabkan oleh terhalangnya pelajar untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri, sehingga memicu permasalahan putus sekolah. "Bahkan dalam catatan saya ada 14.000 anak tidak sekolah untuk level SMA-SMK (di Banten)," ujarnya.

Ini juga terkait dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten. "Bagaimana cara kita membahagiakan masyarakat kita saat pendidikan belum adil dan belum merata?" kata Andra saat menjawab pertanyaan panelis.

Sedangkan Cagub Banten nomor urut 1, Airin Rachmi Diany, menyoroti terkait isu mental health (kesehatan mental) dengan menghadapi kenyataan bahwa Banten belum memiliki rumah sakit jiwa. Airin mengatakan yang utama adalah menghadirkan pemerataan pembangunan wilayah utara dan selatan di Banten. Toh pendidikan di Banten juga mesti ditingkatkan.

"Isu mental health itu menjadi perhatian kita semuanya dan di Banten izin Pak Gub kita belum punya rumah sakit jiwa," kata Airin.

Dia menyebut dengan pembangunan rumah sakit jiwa di Banten, maka akan mendorong psikolog-psikolog dihadirkan untuk membantu masyarakat. Airin berharap masyarakat Banten bisa sehat secara jiwa dan iman. "Tentu para tokoh alim ulama dan lintas agama, apalagi Banten mottonya adalah iman dan taqwa, tentu kita harapkan iman dan takwa ini bisa disampaikan kepada masyarakat," ucap Airin.

Tugas pemerintah, kata dia, adalah memastikan pendidikan, kes-

ehatan, peningkatan pelayanan UMKM. "Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sedangkan dalam debat kedua, isu ketimpangan itu dikaitkan dengan kualitas komunikasi pejabat daerah dan pusat. Calon wakil gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengatakan, keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014.

"Pembagian kewenangan sudah jelas. Contoh, gubernur punya kewenangan soal SMA-SMK. Maka kita mempunyai program menjalankan agar semua masyarakat bisa dilayani dari sisi pendidikannya, termasuk juga soal-soal kesehatan dan sebagainya," kata Ade yang berpasangan dengan cagub Banten Airin Rachmi Diany itu.

Sedangkan calon wakil gubernur nomor urut 2, Achmad Dimiyati Natakusumah, mengemukakan, gubernur memiliki tugas dekonsentrasi sebagai kepanjangan tangan dari Presiden. Melalui dekonsentrasi itu, lanjut dia, pemimpin daerah menjalankan 5P. Adapun 5P itu seperti, pendataan wilayah tata ruang provinsi untuk pendidikan, infrastruktur, perumahan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Lalu, pengevaluasian gubernur terkait

peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tugas selanjutnya, pelantikan bupati dan wali kota terpilih.

Kemudian, pendataan ulang yang selanjutnya dilakukan oleh bupati dan walikota ke aparaturnya termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawahnya. Terakhir, pengorganisasian tata organisasi kerja dari pemerintah provinsi, termasuk kabupaten/kota.

"Tugas otonomi daerah supaya lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur dan DPRD bekerja sama dan kolaborasi. Antara eksekutif dan legislatif untuk membangun daerahnya berdasarkan keinginan muatan lokal," kata pasangan Andra Soni itu.

Melalui kolaborasi itu, muatan lokal di wilayah selatan bisa terbangun infrastruktur jalan, irigasi, dan bendungan. Sementara di daerah utara terbangun digitalisasi. Kolaborasi ini penting untuk kepentingan masyarakat.

Banyak masalah yang terungkap dalam debat kedua paslon. Yang akhirnya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten seharusnya sanggup membawa Banten lebih setara dengan provinsi lainnya. Termasuk menyelenggarakan debat paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di ibu kota provinsinya, bukan di Jakarta. ♦



Pramono Anung-Rano Karno

1 ATAU 2 PUTARAN TUNGGU REKAP KPU

Dari sisi perolehan suara, Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan persaingan relatif ketat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Apakah berlangsung satu atau dua putaran, tunggu hasil resmi rekapitulasi KPU RI.

Untuk jumlah pemilih, Banten masih lebih banyak dari Jakarta yang mencatatkan 8.214.007 warga masuk di Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024. Namun, hasil hitung cepat yang lazim memiliki kesalahan hitung 1-2 persen belum bisa menegaskan apakah pasangan Pramono Anung-Rano Karno menang dalam satu putaran.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga

jajak pendapat menunjukkan pasangan Pram-Rano meraih suara di kisaran 50 hingga 51 persen. Namun, secara metodologi ilmiah, kesalahan hitung satu persen saja dapat berarti hitungan nyata (real count) akan merentang antara 49-52 persen.

Jadi, mungkin saja Pram-Rano hanya meraih 49 persen suara dalam hitungan akhir yang berarti belum mencapai persyaratan 50 persen suara plus satu pemilih sebagaimana syarat kemenangan satu putaran yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Mungkin juga Pram-Rano meraih 52 persen suara sehingga menang dalam satu putaran. Akhirnya hasil resmi hitungan KPU yang akan menjadi penentu pastinya.

Dari rangkaian hasil hitung cepat enam lembaga jajak pendapat, Charta Politika menyebut pasangan nomor urut 3 Pram-Rano meraih 50,15 persen suara pemilih, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun

Wardana meraih 10,60 persen, dan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono beroleh 39,25 persen suara pemilih.

Sedangkan hitung cepat VoxPol menghasilkan Paslon 1 meraih 39,33 persen, Paslon 2 mendapat 10,56 persen, dan Paslon 3 beroleh 50,10 persen suara pemilih. Selanjutnya, hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan Paslon 1 meraih 39,18 persen, Paslon 2 mendapat 10,68 persen, dan Paslon 3 beroleh 50,14 persen suara pemilih.

Sedangkan hitung cepat Lembaga Survei Indonesia mengungkapkan, Paslon 1 meraih 39,29 persen, Paslon 2 mendapat 10,61 persen, dan Paslon 3 beroleh 50,10 persen suara pemilih. Kemudian hitung cepat Poltracking menghasilkan Paslon 1 meraih 39,55 persen, Paslon 2 mendapat 10,37 persen, dan Paslon 3 beroleh 50,08 persen suara pemilih.



Terakhir, hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting menghasilkan Paslon 1 meraih 38,80 persen, Paslon 2 mendapat 10,17 persen, dan Paslon 3 beroleh 51,03 persen suara pemilih. Hitung cepat SMRC ini menunjukkan perolehan Pram-Rano lebih besar dari quick count lembaga jajak pendapat lainnya.

Sedangkan KPU Jakarta baru memulai hitungan nyata (real count) pada Kamis, 28 November 2024. Lembaga penyelenggara Pilkada ini juga meminta semua pihak menunggu hasil resmi setelah rekapitulasi manual selesai dilakukan.

"Ya kami juga monitor di media sebenarnya ya, setiap paslon itu pasti di kata akhirnya menunggu rekapitulasi akhir dari KPU. Jadi, walaupun ada yang mengklaim,



Kalau menurut tahapan yang ada di PKPU 2, itu maksimal tanggal 16 Desember. Tapi kami di KPU DKI mengusahakan secepat mungkin tanpa mengganggu tahapan atau melanggar aturan.

ada yang menyatakan satu putaran, dua putaran, mereka tetap menunggu hasil resmi dari KPU," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata di kantor KPU Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Mengenai data yang masuk, Wahyu hingga pukul 23.00 WIB, Rabu, 27 November 2024, angkanya sudah mencapai 99 persen. Toh ia menegaskan, hitungan resmi baru dimulai dan hasilnya harus diplenokan lebih dulu sebelum hasil resmi diumumkan. "Tanpa hasil resmi KPU, tentu saja prosesnya tidak bisa berjalan ya, sesuai dengan aturan begitu," sambungnya.

Wahyu mengemukakan pengumuman resmi akan disampaikan paling lambat 16 Desember 2024. Namun dia mengatakan KPU akan mengusahakan agar hasil tersebut dapat segera diumumkan. "Kalau menurut tahapan yang ada di PKPU 2, itu maksimal tanggal 16 Desember. Tapi kami di KPU DKI mengusahakan secepat mungkin tanpa mengganggu tahapan atau melanggar aturan," tandasnya.

Yang juga menjadi sorotan, partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta kali ini hanya sekitar 57,6 persen. Dengan data pemilih di DPT sebanyak 8.214.007 warga, ternyata yang datang mencoblos dan tidak golput di TPS hanya sekitar 4,73 juta saja.

Berdasarkan pemantauan melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI dari 98,5 persen data yang masuk terlihat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen. Angka ini jauh di

Mellaz.

Menurut perhitungan KPU Jakarta, angka partisipasi pemilih hanya 53,05 persen atau 4,3 juta suara, sisanya sebesar 3,4 juta tak berpartisipasi atau memilih golput. Angka 3,4 juta itu jauh lebih besar dari perolehan Pramono Anung-Rano Karno yang mencapai sekitar 2,1 juta suara pemilih.

Sebagai perbandingan, yang tak berpartisipasi dalam Pilkada di Jawa Barat 33,66 persen, Jawa Timur 30,15 persen dan Jawa



bawah partisipasi Pilpres 2024 yang mencapai lebih dari 80 persen.

"Kalau dizoom, ada provinsi yang cukup tinggi, seperti 81 persen. Tapi ada juga yang sangat rendah, seperti 54 persen," ujar Komisioner KPU RI August Mellaz dalam konferensi pers, Jumat petang, 29 November 2024.

Ia menjelaskan, upaya-upaya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024. "Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg, itu biasanya di bawah," ucap

Tengah 26,44 persen. Sedangkan di Sumatera Utara sekitar 44,4 persen yang tak berpartisipasi dibandingkan dengan 55,6 persen yang datang mencoblos.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa angka golput di Jakarta mencapai 42,07 persen, suara tidak sah 4,6 persen, dan suara sah 53,33 persen. Sedangkan Charta Politika juga mencatat Pilkada Jakarta hanya diikuti oleh 58,14 persen pemilih.

Apapun, hasil Pilkada Jakarta 2024 yang resmi akan diumumkan KPU. Apakah satu atau dua putaran, kita akan lihat bersama-sama. ♦



Andi Sudirman Sulaiman-Rahmawati Rusdi

SEMUA MAU SULSEL LEBIH MAJU

Tercatat memiliki 6,68 juta jiwa terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap, Sulawesi Selatan menawarkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul dalam hitung cepat beberapa lembaga jajak pendapat.

Hitung cepat (quick count) tiga lembaga jajak pendapat menunjukkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut dua, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi meraih suara hingga 60 persen lebih.

Hasil hitung cepat LSI Denny JA, dengan data yang masuk baru 71,33 persen, sudah menunjukkan paslon nomor 2 yang diring-

kas sebagai Andalan Hati sudah unggul dengan perolehan suara hingga 65,24 persen suara pemilih. Sedangkan pesaingnya, Paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad baru mengantongi 34,76 persen suara pemilih.

Selanjutnya, hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan Andalan Hati unggul dengan meraih 76,34 persen suara. Sedangkan pasangan Ramdhan-Azhar (DIA) beroleh 23,66 persen suara pemilih. Kemudian hitung cepat Indikator Politik dengan suara masuk sudah 99,75 menunjukkan Andalan Hati meraih 76,33 persen dan Ramdhan-Azhar meraih 23,67 suara pemilih.

Menanggapi hasil hitung cepat itu, Cagub nomor urut 1 mengungkapkan siap menang dan siap kalah. "Kami akan memberikan hasil yang terbaik, apakah tidak menang maupun menang. Itu tidak masalah bagi kami," kata Danny, sapaan Ramdhan Pomanto, Rabu, 27 November 2024.

Danny mengemukakan ia telah berusaha menuangkan ide-ide dan gagasan untuk memajukan Sulawesi Selatan di masa depan.

"Kami sudah menyampaikan segala ide ide baik untuk Sulsel maupun Kota Makassar," ungkap politisi yang pernah menjadi Wali Kota di ibu kota provinsi Sulsel ini.

Toh Danny tetap menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. "Kita akan terus menunggu real count, kami punya real count sementara tapi baru enam persen," katanya.

Sedangkan Cagub nomor urut 2 Andi Sudirman menyambut baik keunggulan berdasarkan versi quick count. "Dari beberapa quick count yang masuk maupun internal kami, bukan KPU, menunjukkan arah bahwa kita perolehan suara unggul jauh di atas daripada paslon 1," kata Sudirman, petahana Gubernur Sulsel yang juga adik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Meski unggul jauh dari hasil hitung cepat, Sudirman menegaskan tetap menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. "Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pada prinsipnya ini tentu bagi kami adalah tanda-tanda kecenderungan untuk kemudian sebagai amanah yang besar. Harapan yang besar

dari masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Fatmawati meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tidak cepat merayakan hasil yang dicapai berdasarkan hasil perhitungan cepat dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU. “Kami tetap harus hormati proses dari KPU sampai penetapan resmi dari KPU. Untuk itu, kami memohon kepada seluruh tim, relawan, simpatisan, dan seluruh masyarakat kita tetap menjaga untuk kondusivitas daerah yang kita cintai ini tidak ada euforia berlebihan sampai betul-betul ada penetapan resmi dari KPU,” katanya.

Nah, dalam masa kampanye, terutama pada sesi debat kandidat, Sudirman dan Danny sempat saling berbalas argumen yang tajam. Danny, antara lain menyinggung utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang mencapai Rp 1,7 triliun pada masa kepemimpinan calon gubernur petahana, Andi Sudirman Sulaiman.

Calon gubernur Sulsel nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto menyinggung soal utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Danny menyebut angkanya mencapai Rp 1,7 triliun pada masa kepemimpinan calon gubernur petahana, Andi Sudirman Sulaiman.

“Utang Pemerintah Provinsi Sulsel sebanyak Rp 1,7 triliun, besar sekali. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional, di bawah 4,51 persen. Jika dikeluarkan Kota Makassar dari Sulsel, berarti kerja-kerja pemerintah Provinsi Sulsel terdahulu hanya 2,9 persen,” kata Danny Pomanto dalam debat kedua Pilkada Sulsel di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, pada Minggu, 10 November 2024.

Sedangkan Andi Sudirman pada gilirannya menanggapi pernyataan Danny. “Saya tidak tahu mau jawab apa, karena pertanyaannya tidak ada. Tapi, saya coba tebak saja pertanyaannya terkait utang. Baik, saya sampaikan bahwa pemerintah harus paham terkait dana bagi hasil dan mana utang. Tidak pernah diklasifikasikan dana bagi hasil sebagai utang,” ujar dia.

Yang terjadi sebelumnya, Danny Pomanto belum sempat mengajukan pertanyaan setelah menyoal utang Pemprov itu lantaran waktu bicaranya sudah habis. Toh Andi Sudirman melanjutkan jawabannya dalam debat yang mengusung tema ‘Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam’ itu.

“Sepanjang Gubernur Sulsel, selalu bulan terakhir DBH (dana bagi hasil) tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per tiga bulan. Per triwulan baru dilaksanakan,” kata Sudirman.



ia juga menjelaskan rutinitas pembayaran utang dan kondisi keuangan pemerintah provinsi. “Kapan membayarnya? Rata-rata bulan Maret. Saya meninggalkan pemerintahan, infrastruktur saya bayarkan Rp53 miliar. Satu tahun saya tinggalkan, Bapak bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi,” kata dia.

Sementara debat berlangsung hangat di pentas, di luar ruang sekitar lokasi terjadi pula keriuhan. Dua kelompok massa yang diduga simpatisan atau pendukung pasangan calon (paslon) saling lempar batu di jalanan. Tampak sejumlah orang di Jalan Andi Djemma Makassar berlari dan melempar batu ke arah massa yang berada di Jalan AP Pettarani. Aparat kepolisian yang berjaga terlihat menenangkan massa.

Keriuhan tidak berlangsung lama setelah aparat meleraikan kedua massa simpatisan. Mobil dan motor patroli dari aparat kepolisian dipasangi di jalan untuk mengurai massa.

Sedangkan pada debat terakhir Sudirman menyampaikan akan melanjutkan pembangunan yang telah diletakkan pondasinya selama masa pemerintahannya pada periode pertama serta oleh para pen-

dahulu. Dia mencontohkan era Covid saat ekonomi terpuruk hingga 0,71 persen, tetapi bisa dibalikkan hingga 4,51 persen.

Dia juga berjanji membangun infrastruktur secara merata dan berkeadilan dari utara ke selatan. Dia mengingatkan pembangunan sejumlah ruas jalan selama masa pemerintahannya, di antaranya jalan dengan lalu lintas harian tinggi hingga di kawasan pariwisata.

Debat terakhir ditutup pasangan calon dengan pernyataan keduanya yang menjanjikan pembangunan adil dan berkelanjutan. Danny mengatakan tak boleh lagi ada rakyat terpinggirkan, bahkan diabaikan, dalam pembangunan. Karena itu, dia berjanji jika terpilih, pemerintah akan selalu hadir.

Sedangkan Sudirman menjadikan keberlanjutan pembangunan sebagai poin penting. Menurut dia, perlu menggali potensi dan menciptakan kesempatan untuk kemakmuran. Pembangunan yang merata tak akan bisa dicapai dengan instan, tapi butuh proses.

Selanjutnya, hasil quick count sudah keluar dan menunggu hitungan resmi KPU. Sebaiknya semua ingin Sulsel lebih maju. ♦



Herman Deru-Cik Ujang

PERIODE KEDUA DENGAN WAGUB BARU

Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan Daftar Pemilih Tetap 6,38 juta lebih warga. Dengan partisipasi pemilih di atas 80 persen, hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Gubernur Sumsel petahana Herman Deru akan melanjutkan jabatannya untuk periode kedua. Wakilnya yang berganti.

Malah viral di media sosial TikTok, Calon Gubernur petahana Sumsel Herman Deru tampak berseri-seri saat berbicara dengan Presiden ke-7 Joko Widodo melalui sambungan telepon. Di ujung pembicaraan, ia berseru kepada para pendukung di sekelilingnya.

"Salam dari Pak Jokowi," ujar Herman

Deru dalam rekaman yang tayang di media sosial audio visual TikTok.

Seketika para pendukung yang berada di sekelilingnya menyahut dengan seruan hore. Sebagian lagi membalas dengan lambaian tangan.

Tentu saja rekaman tadi terkait dengan hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Sumatera Selatan 2024. Hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan keunggulan telak pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) dengan meraih 73,57 persen suara pemilih. Dengan hasil itu, jika tak ada aral melintang, Herman Deru akan mengemban amanah jabatan Gubernur Sumsel untuk periode kedua dengan Wakil Gubernur Cik Ujang yang berpengalaman sebagai Bupati Kabupaten Lahat.

Peneliti LSI Yoes C. Kenawas mengatakan hasil hitung cepat itu menunjukkan keunggulan signifikan paslon HDCU dibandingkan dengan dua paslon lainnya. "Pasangan Eddy Santana - Rizky Aprilia sebesar 14,04 persen dan pasangan Marwardi Yahya-R.A Anita Noeringhati sebesar

12,57 persen," ungkapnya saat pemaparan hasil Quick Count dan Exit Poll Pilkada 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pilkada Provinsi Sumatera Selatan menurut hitungan LSI, mencapai 83,32 persen pemilih. LSI melakukan hitung cepat Pilkada Sumsel dengan sampel tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 500 TPS.

Menggunakan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling untuk memilih TPS yang menjadi sampel, populasi hitung cepat ini adalah suara sah dari pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. "Margin of error hasil hitung cepat LSI untuk pilkada Provinsi Sumatera Selatan sebesar kurang lebih 1,88 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen," kata Yoes.

Tak pelak hasil hitung cepat LSI ini mencerminkan pula tingginya tingkat dukungan masyarakat Sumsel terhadap kepemimpinan Herman Deru selama lima tahun terakhir. Namun, hasil resmi masih tetap harus menunggu penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Senada dengan itu, Herman Deru mengapresiasi dukungan besar yang ia terima dari masyarakat Sumsel. Namun, ia mengingatkan tim pemenang untuk tetap rendah hati dan menunggu hasil resmi dari KPU.

HD juga menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif di Sumsel demi kelancaran proses demokrasi. Semua pihak diimbau menerima hasil Pilkada dengan lapang dada demi Sumsel yang lebih maju.

Meski begitu, materi debat Pilkada Sumsel sempat mengkritik pemerintahan provinsi di masa HD dan Mawardi Yahya sekaligus. Kritik itu tentu saja datang dari Cagub ketiga, Eddy Santana Putra. Dalam debat ketiga yang berlangsung Kamis, 21 November malam, Eddy yang pernah menjabat Wali Kota Palembang menyentil pengelolaan buruk Jakabaring Sport City oleh pemerintah daerah.

"Jakabaring Sport City saat ini kondisinya parah dan tak terawat karena tidak dikelola secara profesional," kata Eddy di debat. Menurut dia, itu takkan terjadi kembali jika ia terpilih sebagai Gubernur Sumsel di Pilkada 2024 ini.

Selain itu, ia juga berjanji akan memperjuangkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah direncanakan di masa pemerintahan HDMY. "Kami juga akan memperjuangkan agar Bandara SMB (Sultan Mahmud Badaruddin) II kembali jadi bandara internasional," ucapnya.

Kemudian, di bidang ekonomi ia juga

berjanji akan mempermudah akses peminjaman modal usaha bagi pelaku UMKM. Lalu, berkomitmen merevitalisasi pasar tradisional agar menjadi lebih nyaman dan modern ke depannya.

Sedangkan dalam pandangan akademisi FISIP Universitas Sriwijaya Husni Thamrin, penentu pemilihan Pilkada Sumsel 2024 kali ini terdiri dari sejumlah faktor seperti popularitas, basis yang kuat, hingga strategi kampanye. "Strategi kampanye dari Herman Deru-Cik Ujang ini kalau bola itu seperti man to man marking, sementara Mawardi Yahya-Anita total football, dan Eddy-Santana zone marking," tuturnya.

Ia menjelaskan, strategi HDCU ini paling efektif mendulang suara dengan secara aktif menjaga pertahanan di berbagai wilayah

basis pesaingnya. Padahal Mawardi Yahya yang pada 2019-2024 menjadi Wagub dan Anita yang sebelumnya menjadi Ketua DPRD Sumsel sudah meraih dukungan suara 50 persen dari partai pengusungnya, yakni Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, partai Garuda dan Partai Gelora.

"Herman Deru hanya memiliki suara partai 30 persen sekian, dan paslon PDIP yaitu Eddy Santana-Rizky Aprilia sisanya. Artinya, (Pilkada) enggak linier (searah dukungan partai), tergantung dari efektivitas kampanye para pasangan calon," ujarnya.

Setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur, warga Sumsel dapat menilai kinerja HD sebagai Gubernur di periode lima tahun kedua. Kali ini bersama dengan Wagub baru. ♦



REMITANSI

GUNAWAN EFFENDI

Jika ada anggota keluarga atau sanak-saudara yang bekerja di luar negeri mengirimkan uang ke Indonesia, itulah remitansi. Pengertian baku remitansi (remittance) adalah transfer uang nonkomersial, bukan bisnis, yang dilakukan oleh pekerja migran, anggota komunitas diaspora, atau warga negara yang memiliki keluarga di luar negeri, untuk pendapatan rumah tangga di negara asal atau tanah air.

Menyimak pengertian remitansi, mudah bagi kita mengaitkannya dengan pekerja migran yang pernah disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Namun pengertian itu sudah dibakukan dengan frasa pekerja migran Indonesia. Malah kini lembaga yang menanganinya sudah berbentuk kementerian. Ya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang semula bernama Badan P2MI.

Kementerian P2MI berfungsi lebih kepada memfasilitasi penempatan atau pengiriman (dulu pernah disebut pengerahan). Itu baru sebagian. Sebagian lagi, yang lebih penting adalah fungsi pelindungannya. Harap maklum bekerja di rantau negeri orang memang lebih berisiko dibandingkan dengan mencari nafkah di negeri sendiri. Namun, risiko yang lebih tinggi biasanya berbanding lurus atau sebanding dengan imbalan atau penghasilannya.

Begitulah maka ihwal pekerja migran ini memang sangat berkaitan dengan remitansi. Yang mencatat data remitansi untuk Indonesia adalah bank sentral, Bank Indonesia, karena data remitansi dari semua bank (milik pemerintah atau swasta) tercatat di sana.

Nah, persoalan kita bersama adalah jumlah atau nilai remitansi sebelum wabah Covid-19 melanda, amat sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pandemi yang disebabkan virus corona itu mereda. Jadi, remitansi Indonesia sejak 2021 hingga 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka 2020 dan 2-3 tahun sebelumnya, meskipun ada kenaikan selama dua tahun terakhir.

Data Bank Indonesia menunjukkan, angka remitansi pada 2018 mencapai 10,97 miliar dolar AS. Pada tahun berikutnya, 2019, angkanya naik lagi menjadi 11,43 miliar dolar. Nah, saat Covid-19 merajalela pada 2020, mulailah angka remitansi menurun menjadi 9,42 miliar dolar. Angka itu turun lagi pada 2021 menjadi 9,16 miliar dolar.

Tingkat remitansi terendah dalam 5-6 tahun terakhir tercatat pada 2021, hanya 2,32 miliar dolar AS. Setelah itu memang terjadi kenaikan, namun belum sampai separuh dari rekor 11,43 miliar dolar pada 2019.

Angka remitansi pada 2022 tercatat baru mencapai 3,35 miliar dolar AS. Selanjutnya, pada 2023 naik menjadi 3,68 miliar dolar. Kecenderungan meningkatnya angka remitansi sudah terlihat pada semester I (Januari-Juni) 2024 senilai 3,88 miliar dolar.

Maka upaya untuk memulihkan angka remitansi seperti masa sebelum Covid-19 merajalela agaknya memang perlu menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan yang sedang berganti. Jadi, pembentukan Kementerian P2MI memang relevan sebagaimana kajian yang pernah dipublikasikan Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund) pada 2022.

Kajian itu mencatat, remitansi merupakan komponen penting dari arus neraca pembayaran lintas negara dan mencapai \$559 miliar bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah pada 2019. Bagi beberapa negara berkembang, ungkap kajian itu, remitansi merupakan sumber arus modal internasional yang paling penting pun dapat memberikan dampak penting pada pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, meskipun remitansi sering kali hanya digunakan untuk konsumsi –bukan untuk investasi atau membuka usaha misalnya.

Soal remitansi, untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara, Filipina memang paling banyak disebut sebagai jawaranya. Dari nominal saja, angka resmi Bank Sentral Filipina menunjukkan total remitansi negeri jiran itu pada 2021-2024 selalu di atas 30 miliar dolar AS. Pada 2021, 31,41 miliar dolar, naik menjadi 32,53 miliar dolar per 2022.

Angka remitansi Overseas Filipino Workers, begitu para pekerja migran di negeri jiran itu disebut, naik lagi pada 2023 menjadi 33,49 miliar dolar. Untuk 2024, pada periode Januari-September, angka remitansi Filipina tercatat 25,22 miliar dolar, dengan rata-rata bulanan tiga miliar dolar, maka angka remitansi 2024 akan melampaui yang tercatat pada 2023.

Sekadar catatan ringkas, Filipina relatif lebih rajin serta rinci mencatat informasi dan data. Bukan sekadar remitansi, melainkan juga, misalnya, angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi, maupun tingkat kekerdilan (stunting) anak. Untuk remitansi, misalnya, Filipina sudah memisahkan angka remitansi dari overseas worker yang bekerja di darat dan di laut secara terbuka. Pekerjaan di laut itu sebenarnya bukan hanya sebagai nelayan atau penangkap ikan. Nakhoda dan anak buah kapal tanker minyak dan gas juga termasuk. Indonesia pun sebenarnya memiliki pekerja migran yang tak sekadar menjadi penangkap ikan. Namun, itulah, catatannya belum jelas.

Memang, dari sisi jumlah penempatan saja, Filipina jauh lebih banyak mengirimkan pekerja migrannya ke luar negeri. Kisarannya sekitar 2,5 juta pekerja migran per tahun. Sedangkan Indonesia baru memang belum seberapa.

Data BP2MI menunjukkan, pada 2022, Indonesia menempatkan 200.717 pekerja migran. Tahun berikutnya, 2023, jumlahnya naik menjadi 297.107 orang. Nah, pada 2024, hingga November 2024, jumlah penempatan masih bertengger di angka 258.381 pekerja migran. Sedangkan Menteri P2MI optimistik penempatan pekerja migran Indonesia hingga tutup tahun akan mencapai 274 ribu orang, masih lebih rendah dari angka

yang tercatat pada 2023.

Melihat angka-angka penempatan itu, masih banyak yang perlu dipelajari dari Filipina soal remitansi dan pekerja migrannya. Namun, satu hal, sumber terbanyak pekerja migran Filipina adalah kawasan Metropolitan Manila dan sekitarnya, semacam Jabodetabek di Indonesia, juga wilayah sekitarnya di Pulau Luzon. Ini mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang relatif lebih tinggi dan lebih bersesuaian dengan tuntutan global maupun pasar kerjanya.

Di Indonesia, wilayah serupa Jabodetabek yang lebih mengglobal mungkin Bali. Namun Bali pun tampak cenderung turun angka penempatan pekerja migrannya dalam dua tahun terakhir. Yang juga turun adalah Sulawesi Selatan pada periode yang sama. Pekerja migran Indonesia dominan berasal dari Jawa Timur, Tengah, dan Barat. Namun, yang paling banyak justru berasal dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Sementara agen penempatan tenaga kerja yang terbanyak justru di Kota Bekasi meski Jawa Barat juga.

Pada 2010, Cristina Sergio meminta Mary Jane pergi ke Yogyakarta dari Malaysia dan memberinya sebuah koper dengan upah US\$500. Setibanya di Bandara Yogyakarta, Mary Jane ditangkap karena di bagian lapisan dalam koper titipan Cristina terdapat heroin seberat 2,6 kilogram.

Masalah pekerja migran yang terkait dengan tindak pidana memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga seperti kepolisian dan imigrasi. Meskipun bukan ranah Kementerian P2MI, soal ini tetap memerlukan perhatian karena dapat berdampak terhadap pandangan negara penempatan terhadap para pekerja migran Indonesia.

Toh soal pekerja migran secara global merupakan keniscayaan sebagaimana perhatian lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, maupun Bank Dunia. Di tingkat regional, Badan PBB untuk kerja sama sosial dan ekonomi kawasan seperti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) saja mencurahkan perhatian terhadap pekerja migran diawasannya.



Tambahan masalah mungkin pekerja migran yang terkait dengan judi online yang marak menjadi sorotan belakangan ini. Belum lagi pekerja migran yang terkait dengan pengiriman narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Juga penempatan ilegal yang dapat meluas menjadi masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Perkembangan aktual pengembalian terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya adalah salah satu kasus yang juga dapat menjadi pelajaran penting tentang pekerja migran. Perempuan Filipina itu adalah seorang pekerja migran yang memiliki dua anak. Ia pernah bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab.

Untuk Indonesia yang berada di kawasan Asia Pasifik, tentu saja UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) yang menjadi lembaganya. Terlebih Sekretaris Eksekutif UN ESCAP adalah Armida S Alisjahbana yang pernah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Akhirnya, akan banyak pekerjaan penting Kementerian P2MI pada tahun pertamanya. Apapun, kita layak memberi ucapan selamat bekerja untuk Pak Menteri Karding, dan dua wakilnya: Bang Dzulfikar dan Mbak Christina Aryani yang mengemban amanat untuk melindungi dan melayani para pejuang remitansi. Sungguh bukan pekerjaan ringan. ♦



APA KABAR SERTIFIKAT HALAL

Pemerintah Presiden Prabowo membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tentu terkait soal sertifikasi halal.

Nah, sertifikasi halal itu memiliki berbagai manfaat. Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, sertifikasi halal bukan lagi merupakan persoalan yang berkaitan dengan agama saja, melainkan telah berkembang menjadi suatu standar yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk.

“(Sertifikasi) halal itu bukan hanya soal agama, karena kini halal telah berkembang secara lebih luas menjadi suatu standar bagi produk yang diterapkan oleh siapa saja di dunia, tidak hanya oleh umat Muslim, tapi juga bagi siapa pun,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Selasa, 26 November 2024.

Menurut Haikal, sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan JPH selain untuk memberikan

kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

“Jadi, halal is for all. Halal itu untuk semua. Halal is rahmatan lil ‘alamin. Halal itu rahmat bagi semua umat manusia,” ujar Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan.

Halal, kata dia pula, budaya yang bahkan oleh perusahaan-perusahaan dijadikan sebagai sebuah reputasi pada korporasi sebagai branding image untuk menunjukkan kualitas, untuk meningkatkan perluasan pasar. Untuk itu, ia mengatakan bahwa program kewajiban sertifikasi halal yang dijalankan oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan, mendorong kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk di pasaran, baik domestik maupun global.

Saat ini, katanya lagi, semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke negara kita dan mereka sudah bersertifikat halal. Ia pun mengajak produk dalam negeri agar tak kalah bersaing. Sebagai Kepala BPJPH Babe Haikal menegaskan komitmen untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dari serbuan produk luar negeri, terutama produk makanan dan minuman.

“Melalui sertifikasi halal, BPJPH hadir dan berkomitmen untuk melindungi pelaku usaha mikro dan kecil kita dan produk-produknya dari persaingan ketat dengan produk luar yang membanjiri negara kita,” kata dia.

Haikal menjelaskan, produk luar negeri terutama makanan dan minuman saat ini banyak yang memang diproduksi dan dijual dengan harga yang murah, berkualitas, bahkan sudah mengantongi sertifikat halal dari negara asalnya. “Oleh sebab itu, produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku

usaha mikro kecil kita harus bersertifikat halal, sehingga memiliki nilai tambah dan lebih berdaya bersaing di pasar. Sertifikat halal itu supaya produk kita berdaya saing dengan produk luar negeri yang sudah bersertifikat halal yang dikelola oleh (lembaga) halal luar negeri masing-masing," ujarnya.

Babe Haikal juga mengatakan bahwa kehadiran pemerintah dalam membantu dan memberdayakan pelaku UMK melalui berbagai program khususnya melalui sertifikasi halal bagi pelaku usaha harus didukung oleh semua pihak. Alasannya, jika UMK tidak diperkuat dengan upaya-upaya afirmatif yang dibutuhkan, maka bisa jadi produk UMK tidak akan mampu bersaing dengan produk halal luar negeri.

Penguatan UMK ini di antaranya dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan nilai tambah produk melalui standar halal. Targetnya agar produk UMK bertahan dan bahkan berkembang dan memperluas jangkauan pemasarannya hingga ekspor. Atau setidaknya mampu memenuhi kebutuhan produk halal domestik.

"Kalau kita punya UMK (namun) tidak dibekali, tidak dibantu untuk mendapatkan sertifikat halal dari semua pihak, maka yang terjadi orang-orang (konsumen) akan memilih barang-barang (produk) halal dari luar negeri," ujar Haikal.

Dia menyebutkan, berdasarkan data pada Sihalal, hingga saat ini terdapat 5.575.021 produk yang telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Jumlah produk halal tersebut dihasilkan oleh 1.547.271 pelaku usaha yang telah beroleh sertifikat halal. Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal itu terdiri atas 4.733 pelaku usaha besar, 1.234 pelaku usaha menengah, 44.625 pelaku usaha kecil, dan 1.496.679 pelaku usaha mikro.

"Artinya, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum bersertifikat halal dan harus segera mengurusnya. Untuk itu, diperlukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK dalam jumlah yang memadai dan sebaran yang merata di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Tambahan pula, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan untuk memperluas ekspor industri halal domestik sehingga membantu memperkuat struktur ekonomi Indonesia, salah satunya melalui ajang pameran industri halal terbesar dunia yakni Halal Expo Turki pada akhir November 2024. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, dalam pameran itu, kementeriannya memfasilitasi 12 pelaku in-

dustri unggulan domestik, yaitu PT Bintan Inti Industrial Estate, PT Binabusana Inter-nusa, PT Cinquer Agro Nusantara, PT Formosa Ingredient Factory, Tbk, PT Jayatama Selaras, PT Kapal Api, PT Lestari Jaya Bangsa, PT Priskila Prima Makmur, CV Realsa Natural, PT RM Deltasari Indah, PT Surabaya Indah Permai, dan PT Venamon. Ia menyatakan dalam ajang ini, Indone-

Nah, pantas saja Babe Haikal mengim-bau kepada seluruh stakeholder untuk se-cara aktif berperan dalam sinergi bersama guna memberikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang jumlahny sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Kepada Kementerian terkait saya mengimbau, kepada semua (stakeholder) yang terkait pun saya



sia semakin meneguhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global melalui sektor unggulan industri halal yang dipromosikan. "Adapun sektor unggulan halal tersebut, antara lain sektor makanan dan minuman halal serta modest fashion, mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,87 persen (yoy) dan 3,81 persen (yoy). Ini menunjukkan bahwa di masa depan, pertumbuhan ekonomi nasional dapat didominasi oleh ekonomi syariah melalui perkembangan industri halal," Menteri Agus., Kamis, 28 November 2024

mengimbau, ayo sama-sama kita selamatkan ekonomi rakyat.

Kita tingkatkan supaya mereka bisa bersaing. Bantu mereka untuk bisa meningkatkan mutu, menekan harga, dan menghadirkan produk yang bersertifikat halal, produk yang sehat, higienis, berkualitas.

Yuk kita kuatkan (ekosistem halal) dalam negeri karena halal menjadi daya saing tersendiri. Untuk meningkatkan daya saing produk UMK dari serbuan barang-barang asing yang menyerbu masuk dengan (sertifikat) halal dari negara masing-masing," kata Haikal bersemangat. ♦



Di Kepemimpinan Pj Gubernur Elen Setiadi PEMPROV SUMSEL GELAR DOA BERSAMA UNTUK PEMILUKADA AMAN DAN DAMAI

Masa Tenang Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dimulai Minggu, 24 November, yang diisi dengan doa bersama di Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) di Jalan Merdeka Palembang.

Doa Bersama untuk Pemilukada 2024 Damai ini merupakan doa yang dilakukan bersama-sama oleh semua agama di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), diwakili oleh para pemimpin agama di daerah ini.

Pj Gubernur Elen Setiadi hadir dan memberi sambutan pada Doa Bersama Pemilukada 2024 di mana seluruh Forkompimda Provinsi Sumsel hadir. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan warga mengikuti doa lintas agama ini.

Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan, Doa Bersama lintas agama ini merupakan doa dan harapan Pemilukada Serentak 2024 berlangsung damai, guyub, rukun, dan menyambut kepala daerah yang terpilih nanti dengan sukacita.

"Tentu upaya-upaya telah kita lakukan secara maksimal, namun tetap berserah diri kepada Allah, tiada upaya yang dapat kita lakukan jika tidak mendapatkan hidayah dan izin dari Allah, siapapun yang

akan memimpin nanti sudah tercatat di Lauhul Mahfudz.

"Oleh karena itu apabila ada perbedaan di antara kita, tentu kita kembalikan adalah rencana Allah yang paling indah," imbau Pj Gubernur dalam seruan yang sangat menyejukkan hati yang mendengarnya.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Elen Setiadi, jika ada permasalahan secara hukum biarkan nanti aturan secara hukum yang bekerja.

Ia mengajak seluruh pemuka agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa agar juga mengajak masyarakat bersama-sama menjalani Pemilukada 2024 secara aman, damai, riang gembira.

Doa Bersama adalah Bentuk Kecintaan pada NKRI

Pada Doa Bersama Lintas Agama untuk Pemilukada 2024 Damai, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi juga menyampaikan pesan untuk seluruh elemen masyarakat di Sumatera Selatan.



Pesan Kapolda Sumsel ini disampaikan oleh Dirbinmas Polda Sumsel Kombes Polisi Sopian Hidayat S.I.K., M.M. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kecintaan dan kebanggan



Tentu upaya-upaya telah kita lakukan secara maksimal, namun tetap berserah diri kepada Allah, tiada upaya yang dapat kita lakukan jika tidak mendapatkan hidayah dan izin dari Allah, siapapun yang akan memimpin nanti sudah tercatat di Lauhul Mahfudz.

masyarakat Sumatera Selatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolda Sumsel berharap dengan

Doa Bersama Lintas Agama ini dapat terciptanya keamanan dan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

"Mari kita bermunajat dan memohon semoga seluruh dari rangkaian Pemilu Serentak 2024 ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, semoga setiap yang kita lakukan menjadi ladang ibadah dalam pengabdian kita terhadap bangsa dan negara," ajaknya.

Pada bagian akhir dari seluruh rangkaian Doa Bersama Lintas Agama untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 ini, semua perwakilan agama tampil di panggung guna memimpin doa bersama sesuai agama masing-masing.

Para pemuka agama ini berdiri sejajar dan memimpin serta menyampaikan doa secara bergantian, dalam suasana sakral dan khushuk.

Doa Bersama Lintas Agama untuk Pemilu Serentak Damai ini dihadiri juga oleh Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra, dan para Kepala OPD Pemprov Sumsel. ♦



Deklarasi Pilkada Damai Pilgub Sumatera Selatan PJ GUBERNUR ELEN SETIADI AJAK JAGA KONDUSIVITAS PILKADA 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, S.H., M.S.E, mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Agar Pilkada Serentak 2024, yang Pemungutan Suara berlangsung pada Rabu, 27 November, lancar dan sukses.

Ajakan itu disampaikan Pj Gubernur Elen Setiadi saat Deklarasi Damai Pilkada Sumsel 2024, yang berlangsung di Halaman Griya Agung, Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Senin (18/11/2024).

"Hari ini kita menyatukan komitmen seluruh elemen, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat umum, untuk memastikan Pilkada di Sumsel berjalan aman, damai, dan lancar.

"Mari kita bersama-sama menciptakan suasana kondusif agar masyarakat dapat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nurani," kata Gubernur Elen dalam sambutannya.

Deklarasi damai ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk perwakilan partai

politik, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta tokoh lintas agama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elen menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas selama masa pemilu.

"Deklarasi ini menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan Pilkada berlangsung tanpa konflik. Dengan menjaga keamanan dan kedamaian, kita membuka jalan bagi terpilihnya pemimpin yang mampu menjawab tantangan di Sumsel," tegasnya.

Gubernur Elen juga menyoroti pentingnya menghindari praktik politik uang dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya sering ingatkan ASN untuk bersikap netral. Begitu pula masyarakat, jangan tergoda oleh politik uang. Pilihlah pemimpin berdasarkan kejujuran dan visi yang mereka tawarkan," tambahnya.

Dukungan Keamanan dari Aparat

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel, Irjen. Pol. Andi Rian, menegaskan kesiapan kepolisian dalam mengamankan jalannya Pilkada melalui Operasi Mantap Praja Musi 2024.

"Polri, khususnya Polda Sumsel, telah menggelar operasi pengamanan Pilkada. Namun, keberhasilan ini memerlukan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat," ujarnya.

Andi Rian juga mengingatkan



masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. "Kondisi keamanan di Sumsel saat ini cukup kondusif. Kami berharap masyarakat tetap menjaga persatuan,



Mari kita bersama-sama menciptakan suasana kondusif agar masyarakat dapat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nurani.

menghindari ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan hoaks yang dapat memicu konflik," jelasnya.

Acara deklarasi damai ini dimulai dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh para tokoh agama. Dilanjutkan dengan pembacaan komitmen damai oleh perwakilan partai politik dan pasangan calon, yang kemudian diikuti oleh penandatanganan deklarasi damai oleh Pj Gubernur, Forkopimda, serta pimpinan partai politik dan kepala daerah se-Sumsel.



Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Sumsel, Andu Dinialdie; Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Ilyas Panji Alam; Pangdam II Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Mohamad Naudi Nurdika; Kajati Sumsel, Yulianto; Danrem 044/Gapo, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Thohir; Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya; dan Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan.

Melalui deklarasi ini, pemerintah provin-

si dan berbagai elemen masyarakat menegaskan komitmen untuk menjaga pemilu di Sumsel tetap berlangsung damai, aman, dan demokratis.

"Ini adalah kesempatan kita bersama untuk menentukan masa depan Sumsel. Gunakan hak pilih dengan bijak, dan mari kita jadikan Pilkada ini momen untuk membangun daerah yang lebih maju," tutup Elen. ♦





Apresiasi Atlet dan Pelatih Kontingen Sumsel di PON XXI PJ GUBERNUR ELEN SETIADI BERIKAN BONUS RP2,6 MILIAR

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi menyerahkan Bonus Atlet dan Pelatih Kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, bertempat di Griya Agung, Jumat (15/11/2024). Kontingen dari provinsi ini menyabet total 51 medali, yang terdiri dari 6 medali emas, 15 medali perak dan 30 medali perunggu.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi, pengorbanan dan semangat juang seluruh atlet dan pelatih yang telah menyumbangkan medali dalam PON XXI Aceh-Sumut. Perolehan tersebut akan kita jadikan acuan untuk menatap PON XXII di NTB dan NTT Tahun 2028 mendatang", ucapnya.

Elen mengatakan, pemberian bonus kepada para Atlet dan Pembina Kontingen PON 2024 itu disesuaikan dengan klasifikasi. Untuk bonus sendiri telah ditransfer ke rekening masing-masing.

"Bagi atlet perorangan, kita berikan uang sebesar Rp 350 juta untuk medali emas, Rp160 juta untuk medali perak dan 100

juta untuk medali perunggu," kata Elen, Jumat, 15 November

Bagi atlet yang bertanding di nomor grup atau beregu dua hingga tiga orang, bonus yang diberikan sebesar Rp 400 juta untuk medali emas, Rp 200 juta untuk medali perak dan Rp 140 juta untuk medali perunggu.

"Kemudain untuk yang regu lebih dari empat orang, kita berikan bonus Rp 500 juta untuk medali emas, Rp 290 juta untuk medali perak dan Rp205 juta untuk medali perunggu," kata dia.

Tak hanya bonus untuk atlet, Elen menambahkan, Pemprov Sumsel juga memberikan bonus dan apresiasi terhadap pelatih atau pembina dari masing-masing atlet.

"Pelatih medali emas itu kita berikan bonus Rp 115 juta, medali perak Rp 80 juta dan medali perunggu Rp 60 juta," kata dia.

Pemberian bonus ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi untuk para atlet yang sudah menyabet medali. Total ada 257 atlet yang berkontribusi dalam PON XXI Aceh-Sumut di 50 cabang olahraga.

"Meski target medalnya belum sesuai harapan, tetapi kita yakin ke depan, upaya kita memberikan atlet dan pelatih, bisa memberikan semangat untuk PON selanjutnya," kata Elen.

Bikin Persiapan untuk PON XXII Tahun 2028

PJ Gubernur Elen Setiadi sejak jauh-jauh hari sudah mendorong dimantap-



kannya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII yang akan digelar 4 tahun mendatang. Ia menargetkan, Provinsi Sumsel mendapat 36 medali emas.

Elen optimistis bahwa dengan persiapan 4 tahun ke depan menuju PON selanjutnya, itu akan cukup untuk membina para atlet untuk berlaga.

"Kalau kita ingin lebih tinggi lagi, maka targetnya harus lebih tinggi lagi. Tidak ada yang tidak mungkin," kata dia.

Untuk menunjang target-target medali di event olahraga lainnya, termasuk juga PON, Elen mengatakan, Pemprov Sumsel akan bekerja sama dengan badan usaha untuk menyiapkan para atlet berbakat ke depannya.

"Kita akan berkolaborasi dengan badan usaha untuk membuat tempat asuh atlet," katanya.

Ditegaskan Elen Setiadi, "Ini adalah tantangan bagi kita semua, karena nanti ada PON XXII Tahun 2028. Cukup waktu bagi kita untuk evaluasi melihat potensi, menyiapkan lebih baik dan lebih matang, dukungan kita akan lebih kuat sehingga medali yang kita dapat akan lebih baik, dan peringkat kita meningkat."

"Ini menunjukkan bahwa semua institusi, semua FORKOPIMDA Sumsel mendukung untuk meningkatkan prestasi di

Sumatera Selatan", ujar Elen.

Ditambahkannya, PON XXII harus disiapkan dari sekarang walaupun dirinya yang sudah tidak menjabat lagi, dan akan disampainya ke Gubernur yang baru nanti, dan pembinaan tersebut harus dimulai Tahun 2025.

maka dari itu kita tetap memberikan bonus kepada para atlet," katanya.

Sementara itu, Sekda Prov Sumsel Edward Candra selaku Ketua Kontingen PON XXI menjelaskan dari 50 Cabor yang diikuti oleh Kontingen Sumsel di Aceh 24 Cabor dan di Sumut 26 Cabor berjumlah



"Ini harus kita siapkan. Saya yakin di Tahun 2028 PON XXII, tidak hanya 6 Emas paling tidak 36 Emas. Kalau kita punya keinginan cita-cita jangan tanggung, untuk menuju kedepan itu akan tetap kita perhatikan, apapun hasil kita kita syukuri,

257 atlet dan 78 pelatih."

"Persiapan 65 Hari, Alhamdulillah Sudah Memberikan Perolehan 51 Medali terdiri dari 6 Emas, 15 Perak, 30 Perunggu dan Sumsel Berada Peringkat 21", ujar Edward. ♦

DEMI PILKADA, PJ GUBERNUR ELEN SETIADI TAK KENAL LELAH

Kunjungi TPS di Berbagai Kabupaten, Memastikan Pemungutan Suara Aman

Hari-hari menjelang puncak Pilkada Serentak 2024, 27 November, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi penuh kesibukan. Memastikan Pilkada berjalan damai, lancar, dan sukses dilakukannya tak sebatas rapat-rapat koordinasi.

Setelah Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2024, Selasa (26/11/2024), Gubernur Elen turun ke lapangan. Ia mengunjungi

berbagai kabupaten dan kota, mengecek tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Gubernur Elen Setiadi meninjau TPS-TPS di antaranya di Kabupaten Banyuasin, Kota

Palembang, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Di antara yang dikunjungi Pj Gubernur Elen Setiadi, TPS 006 Kelurahan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Sela-



tan (Sumsel), dalam Pemantauan Lapangan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Selasa (26/11/2024), Pj Gubernur Elen Setiadi menilai TPS 6 Karya Jaya ini sudah siap dengan baik untuk digunakan esok harinya, Rabu (27/11) untuk Pemilukada Serentak Sumsel 2024.

"Kami lihat sudah siap semua dan insyaAllah kondisinya juga kondusif dan aman," tuturnya.

Elen mengajak setiap lapisan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban pelaksana Pemilukada esok hari. Dan apabila terdapat gangguan keamanan silakan laporkan ke petugas keamanan.

"InsyaAllah pilkada aman, peran tenaga kesehatan juga sudah baik. Namun tetap saya ingin ada antisipasi cuaca selama berlangsungnya proses pemilihan," pintanya.

Sementara itu, Pj Walikota Palembang, Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ, CGCAE, me-

laporkan Kecamatan Kertapati terdiri atas 6 Kelurahan dengan 127 TPS dan mata pilih sebanyak 67.372 jiwa.

Di Kelurahan Karya Jaya sendiri terdapat 16 TPS dengan mata pilih 4.398 laki-laki dan 4.308 perempuan dan total 8.706 mata pilih. Sedangkan TPS 6 ini digunakan oleh 563 jiwa TPS oleh masyarakat yang berasal dari RT 09, RT 10, RT 11, dan RT 36 Kelurahan



InsyaAllah pilkada aman, peran tenaga kesehatan juga sudah baik. Namun tetap saya ingin ada antisipasi cuaca selama berlangsungnya proses pemilihan.

Karya Jaya.

"Semoga pelaksanaan Pilkada Sumsel dapat berjalan lancar aman damai dan tim medis siap ditempatkan dengan seluruh per-

camatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, memastikan agar tempat dipersiapkan dengan baik sehingga tidak terjadi kendala pada saat masyarakat melakukan pemilihan.

"Saya mengingatkan kepada para pejabat agar tetap bersifat netral dan untuk para petugas yang melaksanakan tugas agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya agar kegiatan pilkada yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar dan aman,"ujarnya.

Usai melakukan Pemantauan di TPS 9 Desa Sungai Pinang Pj. Gubernur Sumsel Elen Setiadi melanjutkan Pemantauan Menuju TPS 7 Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir.

Di kesempatan ini ia mengintruksikan agar para Petugas TPS dapat terus menjaga kesiapan baik tempat TPS maupun mobil kesehatan yang tetap standby.

"Jaga terus situasi dan kondisi tetap kondusif, boleh berbeda pilihan tetapi kebersamaan tetap terjaga dan dapat dipertahankan sampai penetapan calon bupati,

"Sekaligus menjadi contoh untuk wilayah lain agar dapat melaksanakan pemilihan dengan aman dan nyaman,"ujarnya.

"Mari bersama sama dalam menjaga penyelenggaraan Pemilukada ini dengan suasana riang dan gembira, agar kondisi aman dan terkendali,"tutupnya.



lengkapannya untuk kesuksesan pilkada," katanya.*

Ke Banyuasin dan Ogan Ilir

PJ Gubernur Elen setiadi dan rombongan meninjau TPS 9 di Desa Sungai Pinang, Ke-

Turut Hadir Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra, M.H, Pjs. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya S.Sos., M.Si, Forkopimda Sumsel dan Para Kepala OPD di lingkungan Prov. Sumsel. ♦



PEMPROV DAN KEJATI SUMSEL KERJA SAMA BERKOMITMEN WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memberikan penghargaan “Sumsel Justice” kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Selasa (26/11/2024).

Penghargaan diberikan Pj Gubernur Elen Setiadi pada acara Penandatanganan MoU bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Penghargaan ini diberikan sebagai simbol penghormatan atas kontribusi nyata Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mendampingi dan melindungi kepentingan hukum Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan,” jelasnya.

“Sumsel Justice” tidak hanya sekadar penghargaan seremonial. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa keberadaan Kejaksaan sebagai mitra strategis telah mem-

berikan dampak signifikan, baik dalam penyelamatan aset, penyelesaian masalah hukum, maupun dalam mendukung visi kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap komitmen kita terus dilanjutkan dalam rangka memastikan setiap aset dan anggaran daerah betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insyaallah dapat dilanjutkan dengan lebih baik,”katanya.

Pj Gubernur, Elen Setiadi ungkapkan sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2022- 2024 telah menyerahkan 8 (delapan) Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Sela-

tan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah berhasil menyelamatkan berbagai aset berharga milik Pemprov Sumsel dengan total nilai mencapai Rp 284,2 miliar.

"Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi pengamanan aset daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen luar biasa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," katanya.

PERKUAT SINERGI DAN KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Dalam Sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Yulianto, SH., MH., mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka



Saya yakin dengan kolaborasi kita akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Sumsel.

memelihara ketertiban dan penegakan hukum yang lebih baik dalam peningkatan kualitas layanan publik di Sumsel.

"Kejati Sumsel bertanggung jawab dalam mendukung berbagai program dan kebijakan milik Pemprov Sumsel di bidang pencegahan korupsi dan penyelesaian sengketa hukum. MoU ini dilakukan agar tercipta mekanisme kerja yang efektif dan terintegrasi antar kedua belah pihak," ungkapnya.

Kerjasama ini akan mempercepat penyelesaian masalah hukum dan merupakan bagian komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Saya yakin dengan kolaborasi kita akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Sumsel. Melalui kolaborasi, akan tercipta sistem

tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersinergi untuk memberikan manfaat ke masyarakat," tandasnya.

Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas kepercayaan Pemprov Sumsel terhadap Kejati Sumsel untuk mendukung Pemprov Sumsel dalam menegakkan kewibawaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tambahnya.

Pada tahun 2024, Kejati Sumsel telah berhasil melakukan penyelamatan aset litigasi dan non litigasi milik Pemerintah, BUMN, dan BUMD dengan jumlah total pe-

mulihan lebih dari Rp. 1 T. Dan penyelamatan lebih dari Rp. 81 M.

"Keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus dilanjutkan bukan hanya secara seremonial tapi juga dengan upaya lanjutan SKK penyelamatan dan pemulihan aset negara sehingga peran Kejati dapat dirasakan seluruh oleh masyarakat Sumsel," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi juga memberikan Pin dan piagam penghargaan kepada Kajati Sumsel atas dukungan penyelesaian permasalahan aset milik Pemprov Sumsel. ♦



Pj Gubernur Sumsel Hadiri Penandatanganan Berita Acara PENITIPAN PENGELOLAAN ASET YAYASAN BATANG HARI SEMBILAN

Penjabat (Pj) Gubernur Elen Setiadi menghadiri Penandatanganan Berita Acara Penitipan Pengelolaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batang Hari Sembilan. Bertempat di Jl. Mayor Ruslan Kecamatan Ilir Timur II, depan Depan SMK N 6 Palembang, Senin (25/11/2024).

Aset yang dimaksud adalah Aset Tanah yang berlokasi di Jalan Mayor Ruslan Palembang dan aset Asrama Mahasiswa Jl Puntodewo Yogyakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H., mengatakan Bahwa penegakan hukum itu harus memberi dampak. Harus menimbulkan keberanian untuk para pejabat agar berinovasi mengambil berbagai kebijakan.

"Saya membentuk Satgas yang menerima laporan pengaduan masyarakat sehingga betul terkendali. Inilah yg sudah kita lakukan saat ini, Yayasan Batang Hari Sembilan ini salah satu yang kami selidiki sekarang. Kejaksaan hadir untuk menelusuri, rupanya ini aset Pemprov, aset itu sudah tidak tercatat lagi di Pemprov, itu formalistik legalistik", ujar Yulianto.

Lebih lanjut dijelaskannya, sejak Ta-

hun 1951 Yayasan Batang Hari Sembilan mempunyai aset yang berlokasi di Yogyakarta, Palembang, dan Bandung. Saat ini dikembalikan kepada Pemprov Sumatera Selatan.

"Kalau mau di lelang, lelang saja dimanfaatkan sebaik mungkin, agar bisa uangnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Saya sangat bersyukur visi kejaksaan bermanfaat untuk masyarakat sumsel.



Elen Setiadi Tekankan Pentingnya

Dalam Sambutanannya, Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan di Sumsel jika kerjasama antar instansi berjalan, tata kelola



Kami memberikan apresiasi kepada Bapak, kepada para jaksa semua, melindungi kami dari orang-orang yang menguasai aset kami.

penataan aset akan berjalan dengan baik.

"Saya mewakili Pemprov Sumsel mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tim dan semua yang memberikan dukungan agar bisa membangun Sumsel menjadi lebih baik maju dan lebih sejahtera," kata Gubernur Elen.



Dengan diberikannya dukungan kuat dengan bekerja lebih keras dan setelah mendengar uraian yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yulianto, S.H., M.H., dirinya merasa bangga aset yg selama ini tidak terdata, tidak terkeleola tapi dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Legacy ini akan menimbulkan dua dimensi, kepada teman-teman Pemprov bahwa kalau kita serius melakukan sesuatu itu untuk masyarakat bisa berhasil, Kedua bahwa kita tidak bisa tidak melakukan penataan pengelolaan aset, tahun 1951 sampai sekarang. Ini pelajaran untuk kita untuk semua, tetaplah serius untuk melakukan penataan aset. tidak hanya menguntungkan Pemprov yang

terpenting menguntungkan masyarakat", ucap Elen.

Menurut Elen, dirinya sangat paham fungsi hukum itu bukan hanya semata penghukum. Pemprov ditata, aset ditata, orangnya ditata, Kita bina bersama-sama, "Kami memberikan apresiasi kepada Bapak, kepada para jaksa semua, melindungi kami dari orang-orang yang menguasai aset kami. Dan kami memberikan piagam penghargaan, kami sebut Sumsel Justice. Sekali lagi mengucapkan syukur Alhamdulillah dapat dibantu oleh bapak Kajati dan tim.

Turut Hadir Sekda Sumsel Edward Candra, Para Kepala Opd Pemprov, Para Pejabat Dilingungan Kejaksaan. ♦





PERTAMA KALI DIGELAR FESTIVAL JAZZ INTERNASIONAL PJ GUBERNUR ELEN SETIADI APRESIASI PEMKOT PALEMBANG

Penjabat (Pj) Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi menonton Festival Jazz Internasional Suara Musi Tahun 2024, yang diselenggarakan di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sabtu (30/11/2024) malam.

Festival ini merupakan momentum bersejarah bagi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Festival Jazz Internasional ini digagas mantan Pj Wali Kota Dr Ucok Abdulrauf Damenta.

Untuk pertama kalinya, Palembang menjadi tuan rumah bagi festival jazz internasional yang menghadirkan musisi-musisi ternama dari berbagai negara, seperti Belanda, Amerika Serikat, Kuba, Australia, Jepang, Singapura, dan tentunya musisi kita, dari Indonesia.

Dalam sambutannya Gubernur Elen mengatakan, Festival Jazz Internasional tersebut menjadi bagian penting, "Bbagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kebahagiaan dengan perolehan indeks yang mencapai 72,37%."

"Intinya bahwa kita perlu segera meningkatkan pariwisata di Palembang yang begitu banyak sejarahnya, di mana Palembang sejak didirikan sudah menjadi internasional city," kata Gubernur Elen.

Palembang memiliki akar budaya yang

sangat banyak tidak hanya berciri khas dari apa yang ditampilkan isinya adalah bentuk dari kebudayaan pakaian, tetapi juga ada budaya makanan serta tarian serta musik.

Festival musik bertaraf internasional ini menjadi sarana promosi pariwisata yang efektif dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan usaha



mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di akhir sambutannya, Gubernur Elen mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan festival ini.

Aprsiasi Kinerja Dr Ucok A Damenta

Festival Jazz Internasional yang pertama kali digelar di Kota Palembang ini disaksikan pula oleh Forkopimda, Inspektur Utama BKKBN RI Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos., Mag.rer.publ, Pj Wali Kota Palembang Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP.,ME, Pj Ketua TP-PKK Kota Palembang Dwi Wahyuni Cheka, SP, Guru Besar Unsri Diah Natalisa, para Bupati/Wali Kota se-Sumsel, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel,



para Kepala OPD di lingkungan Pekot Palembang.

Sehari sebelumnya, saat melantik Pj Wali Kota Dr Cheka Virgowansyah, Pj Gubernur Elen mengingatkannya untuk melanjutkan program-program baik yang telah dirintis dan dijalankan oleh wali kota sebelumnya, Ucok Abdulrauf Damenta, yang memberikan warna baru bagi warga Palembang seperti akan mengadakan Festival Jazz International, Revitalisasi Kambang Iwak, dan Lampu hias baru di Ampera.

"Dengan hadirnya pak Cheka mudah-mudahan dapat melanjutkan pembangunan yang ada dipalembang, dari lahir dan besar di palembang mudah-mudahan pak Cheka sudah tau persis budaya palembang, sudah tau persis apa yang akan dilakukan, dilanjutkan dengan tugas tugas yang telah dijalankan oleh pak ucok"ungkapnya. ♦



9 REKOMENDASI TEMPAT WISATA HALAL DI KOREA SELATAN

Korea Selatan tak hanya dikenal dengan drama dan K-Popnya saja, namun juga dikenal dengan tempat-tempat wisatanya yang indah dan menarik.

ibadah semata. Akan tetapi juga tersedia berbagai informasi sejarah Islam yang menarik.

2. MANGWON MARKET

Wisata lainnya yang tak kalah menarik namun juga ramah Muslim adalah Mangwon Market. Sangat cocok jika pengunjung menyukai jajanan khas pasar. Lokasinya sendiri ada di kawasan Mangwon Mapo-gu, Seoul. Merupakan sebuah pasar tradisional dengan beragam restoran lezat dengan bahan-bahan segar.

Lingkungan sekitarnya juga bersih, se-



Mangwon Market

hingga sangat cocok dikunjungi Bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Kawasan tersebut ramah Muslim sehingga bisa mencicipi kuliner halal dengan mudah. Seperti ayam pedas manis, buah-buahan segar, hotteok, dan lain sebagainya.

3. JEJU ART PARK

Tempat wisata ini didirikan sejak tahun 1987, dan sampai sekarang telah memiliki sekitar lebih dari 160 karya seni. Lokasinya juga dilengkapi dengan mushola, hanya saja tidak memiliki peralatan untuk shalat. Jika ingin berkunjung, maka bisa membawa peralatan shalat sendiri.

Para pengunjung juga dapat berkunjung ke Pulau Jeju yang menjadi salah satu wisata andalan di Korea Selatan. Lokasinya bahkan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO serta cocok bagi umat Muslim ketika ingin menikmati pulau di Korea Selatan ini.

Pengunjung juga bisa menikmati hamparan bunga canola bermekaran berwarna kuning yang cantik.

4. Seoul Tower

Lokasinya di bangun tepat di Gunung Namsan dengan ketinggian mencapai 243 mdpl. Seoul Tower merupakan tempat wisata yang tidak kalah ramah untuk



Masjid Agung Itaewon

Sebenarnya banyak tempat wisata di Korea Selatan yang memiliki daya tarik dan keindahan yang menawan. Namun umumnya belum bersertifikasi. Tapi saat ini, negeri gingseng ini sedang dan semakin mengembangkan wisatanya dengan banyaknya wisata halal yang ada di negara ini.

Beberapa spot wisata halal di Korea Selatan memang sudah banyak yang menggunakan konsep muslim friendly (ramah muslim), mengingat wisatawan muslim yang datang ke negara ini, terus meningkat setiap tahunnya termasuk dari Indonesia.

Inilah 9 Rekomendasi Wisata Halal di Korea Selatan:

1. MASJID AGUNG ITAEWON

Masjid Agung Itaewon atau Itaewon Grand Mosque, merupakan masjid terbesar dan pertama yang dibangun di Kota Seoul. Sampai sekarang pun masih dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan.

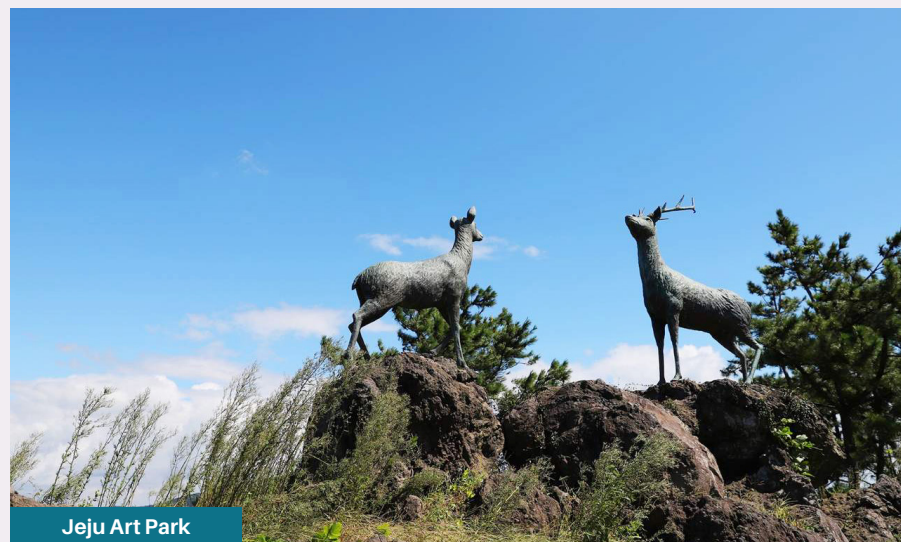
Terutama bagi warga Muslim yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Tidak heran jika tempat wisata ini cukup ramah bagi umat Muslim untuk dikunjungi.

Terlebih, area masjid tersebut tidak hanya dapat difungsikan sebagai tempat

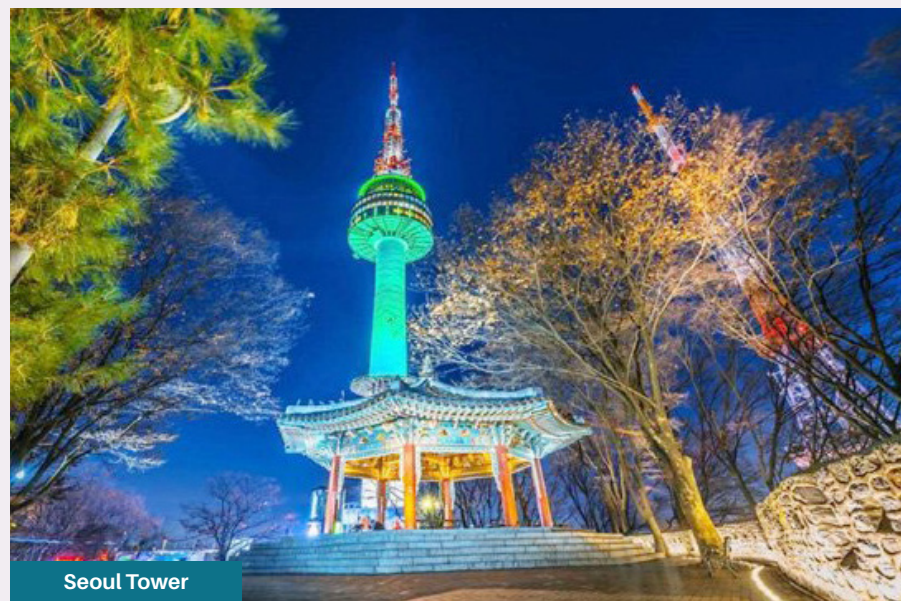
umat Muslim. Pengunjung bisa mengunjunginya untuk melihat pemandangan tower yang sangat indah.

Tower tersebut juga tercatat sebagai menara pemandangan paling tinggi yang ada di Korea Selatan. Ketinggian-

nya sendiri hingga 238,7 meter. Lokasinya juga sangat cocok untuk menikmati pemandangan Kota Seoul dari atas ketinggian. Sangat direkomendasikan berkunjung di malam hari agar melihat pemandangan indah.



Jeju Art Park



Seoul Tower



Nami Island

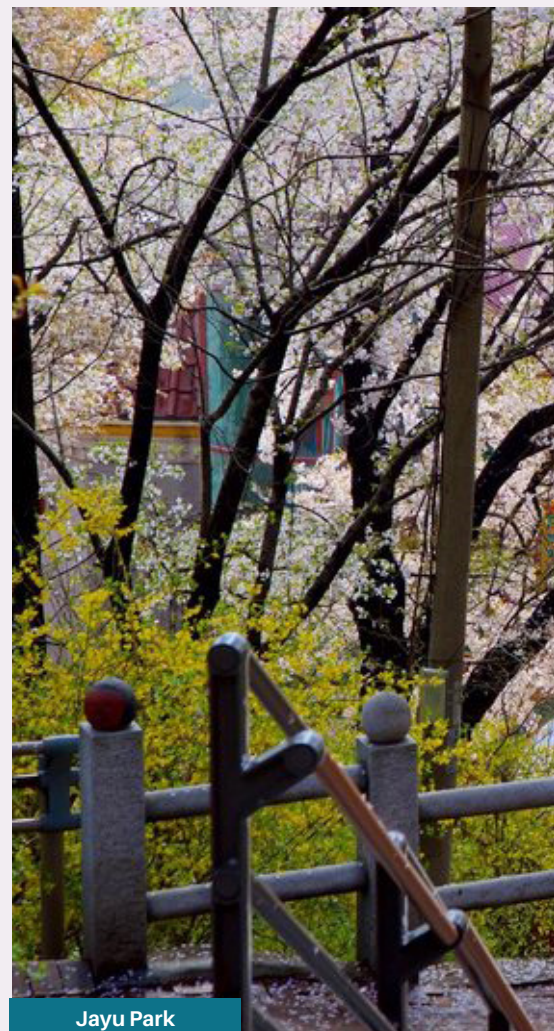
5. NAMI ISLAND

Tempat ini juga tergolong ramah bagi para umat Muslim untuk berlibur. Oleh sebab itu, pastikan mampir ke kawasan wisata ini karena suasananya pun sangat romantis dan nyaman.

Terlebih, lokasinya juga sudah sangat populer sebagai tempat bulan madu di Korea. Pemandangan alam di sekitarnya juga sangat indah dan sejuk. Kepopuleran wisata tersebut semakin meningkat ke berbagai dunia berkat adanya drama Korea dengan judul Winter Sonata.



COEX Mall



Jayu Park

6. COEX MALL

Bagi pengunjung yang suka shopping, maka ke COEX Mall ini tempatnya. Merupakan sebuah ruang publik terbuka yang bisa dikunjungi oleh setiap wisatawan. Selain berbelanja, pengunjung juga duduk santai, beristirahat, hingga membaca buku. Ada banyak pilihan buku tersedia

dengan beragam genre.

Mulai dari hobi, ekonomi, humaniora, dan lain sebagainya. Kawasan perpustakaan ini memang didedikasikan untuk buku asing dan penulis populer. COEX Mall juga menyediakan Seoul Central Mosque yang bisa Anda manfaatkan untuk beribadah bagi umat Muslim.



Istana Deoksugung

7. JAYU PARK

Korea Selatan juga menawarkan taman bunga sakura yang tidak kalah indah dari Jepang. Tentu sangat cocok menjadi destinasi wisata keluarga. Jayu Park menawarkan pemandangan bunga sakura yang bermekaran di musim semi. Kawasan ini dahulunya bernama Mangu Park.

Kemudian berubah menjadi Seo Park. Pada tahun 1957 saat masa penjajahan Jepang, taman tersebut kembali berganti namanya menjadi Jayu Park. Pengunjung dapat berkunjung ke tempat ini dengan jaraknya hanya sekitar 500 meter saja dari kawasan Incheon China Town.

8. ISTANA DEOKSUGUNG

Keindahan Istana Deoksugung sudah tak diragukan lagi, dan istana ini juga ramah bagi umat Muslim. Para pengunjung dapat bersantai sambil mengenakan baju tradisional Korea Selatan. Penyewaannya dapat dilakukan dalam waktu satu jam per harinya. Tentu bisa menjadi pengalaman yang sangat unik.

Istana ini sebenarnya bukan termasuk kawasan kerajaan. Akan tetapi, termasuk sebagai rumah kediaman Pangeran Wolsan pada tahun 1454 sampai 1488



Masjid Agung Demak

lalu. Kemudian pada tahun 1593, istana ini baru dipakai kembali sebagai istana sementara keluarga kerajaan.

9. ISTANA GYEONGBOK

Istana Gyeongbok merupakan sebuah istana tertua dan terbesar yang ada di Korea pada masa dinasti Joseon. Para pengunjung nantinya dapat menjelajah ke kawasan kerajaan tersebut.

Akan tetapi, terdapat beberapa tempat yang memang tidak boleh untuk dikunjungi secara langsung. Meski begitu, pengunjung tetap bisa mendapatkan berbagai keseruan lainnya. Seperti dengan mengenakan pakaian adat Korea Selatan kemudian berfoto dengan pemandangan indah. ♦





KEMENAG SIAPKAN KURIKULUM MASJID UNTUK TINGKATKAN LAYANAN KEAGAMAAN

Demi meningkatkan kualitas layanan keagamaan, Kementerian Agama (Kemendagri) berencana menyusun kurikulum masjid.

Langkah ini sangat penting untuk memperdalam pengetahuan keagamaan masyarakat.

"Kita perlu membuat kurikulum kegiatan di masjid. Misalnya, ceramah setelah shalat dzuhur dengan tema tertentu. Kurikulum ini dapat digunakan oleh penyuluh dan Da'i," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Kamaruddin Amin, dalam acara Evaluasi Program dan Penguatan Layanan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Menurut Kamaruddin, beberapa masjid sudah menerapkan kurikulum serupa, tetapi hasilnya beragam karena belum ada konsep standar.

"Sebagai alternatif, kita harus menyiapkan kurikulum ini dengan baik," tambah Kamaruddin.

Dirjen juga menekankan pentingnya asesmen terhadap jamaah yang mengikuti kurikulum tersebut.

"Selama satu tahun, kita bisa melakukan penilaian terhadap aktivitas jamaah. Jika jamaah aktif, kita dapat memprediksi peningkatan pengetahuan keagamaan mereka," jelasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Ahmad Zayadi menyampaikan, evaluasi program ini menjadi bagian dari persiapan perencanaan Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah untuk 2025.

"Direktorat ini memiliki empat layanan utama, yaitu hisab rukyat dan syariah, ke-masjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik, serta kepastakaan Islam. Semua layanan ini harus memberi dampak nyata bagi masyarakat," ungkap Zayadi.

Zayadi menambahkan, relasi program yang direncanakan telah berjalan dengan baik.

"Kami tidak hanya fokus pada capaian input dan output, tetapi juga pada dampaknya bagi masyarakat," ungkapnya.

Acara ini diikuti oleh 30 Kepala Bidang Urusan Agama Islam dari berbagai provinsi dan nominator penerima Kepestakaan Islam Award 2024. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Jumat (22/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024).



Menag Terbang ke Arab Saudi Bahas Operasional Haji 1446 H

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar pada Sabtu (23/11/2024), bertolak ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabi-ah, sekaligus akan membahas persiapan operasional haji 1446 H/2025 M.

Menag didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief dan Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid.

Menurut Menag Nasaruddin, melalui surat undangan yang diterimanya, Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al Rabi-ah menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Menteri Agama yang baru. Menteri Tawfiq juga mengundang untuk membicarakan pelaksanaan haji 1446 M/2025 H.

"Banyak hal yang akan dibicarakan. Di Saudi, akan ada perubahan-perubahan (dalam pelaksanaan haji) yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan ini perlu diketahui lebih awal, itu akan dibicarakan nanti," kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

"Sepulang dari Saudi, akan kita sampaikan tentang perlunya penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita bersama Kepala BP Haji," tambah Menag.

Ada sejumlah agenda Menag selama di Arab Saudi. Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, Menag juga akan menggelar rapat dengan jajaran Kantor Urusan Haji

(KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

"Kita akan padatkan acara, sehingga lebih efisien dan efektif dan segera kembali untuk menyelesaikan langkah-langkah berikutnya di Tanah Air," kata Menag.

Kemenag Pastikan Seleksi Petugas Haji 2025 Digelar Terbuka dan Fair

Seleksi Petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1446 H/2025 M

kesempatan kepada masyarakat serta menjangkau para petugas haji yang memiliki kompetensi, integritas dan dedikasi yang baik, Kementerian Agama melaksanakan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter secara terbuka dan fair.

Hal tersebut disampaikan Arsad Hidayat, mewakili Dirjen PHU, Hilman Latief saat pembukaan prosesi seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT),



digelar secara serentak di Indonesia pada Kamis (21/11/2024).

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Arsad Hidayat mengatakan, dalam rangka memberikan

Kantor Kemenag Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Pembukaan seleksi ini, juga dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi



Jawa Timur, Kepala Bidang PHU, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Panitia Seleksi PPIH Kloter & PPIH Arab Saudi Tahap 1 dan Tim Supervisi Seleksi PPIH Kloter & PPIH Arab Saudi.

Seleksi Petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1446 H/2025 M di Kabupaten Jombang diikuti 88 peserta.

"Untuk mengikuti seleksi PPIH, pertama, para peserta harus melengkapi seluruh persyaratan teknis serta administrasi yang ditetapkan dan ketika dinyatakan lolos dalam tahapan tersebut peserta dapat mengikuti tes CAT (Computer Asisted Test) sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini," kata Arsad Hidayat.

Ia menambahkan tes seleksi petugas haji dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan tes CAT pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

"Bagi mereka yang lolos pada tahap pertama akan mengikuti tahapan berikutnya. Tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi baik tes CAT maupun wawancara pendalaman baik materi tes ataupun tugas fungsi petugas haji," tambah Arsad.

Adapun materi tes yang akan diujikan kepada para peserta, kata Arsad, yakni wawasan kebangsaan, regulasi, moderasi beragama, manasik haji, psikologi, serta tugas dan fungsi petugas haji.

"Proses seleksi ini dilakukan dalam rangka mencari para petugas haji memiliki

kemampuan teknis, kompetensi, pengetahuan, motivasi serta komitmen yang kuat dalam melayani para jemaah haji. Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik," ungkapnya.

Arsad juga mengatakan, bahwa Kementerian Agama menaruh perhatian besar terhadap proses rekrutmen petugas haji. Karena tersedianya petugas haji yang memiliki kompetensi, pengetahuan dan motivasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk tercapainya kesuksesan dan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

"Selamat kepada seluruh peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan tes CAT pada hari ini. Mudah-mudahan bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti proses seleksi CAT tahap kesatu," pungkaskan Arsad.

Kemenag Kerahkan 5.940 KUA dan Penyuluh Agama Cegah Judi Online

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) telah mengerahkan 5.940 Kantor Urusan Agama (KUA), serta 50 ribu penyuluh agama untuk melakukan pencegahan judi online.

Hal tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas Tingkat Menteri, terkait Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kom-

digi), Jakarta.

"Kami melibatkan 5.940 Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang kita ketahui Kemenag memiliki satker sampai ke kecamatan. Penyuluh kami seluruh Indonesia ada 50.000 terdiri dari semua agama," kata Menag Nasaruddin, Kamis (21/11/2024).

Upaya preventif terhadap judi online ini juga akan dilakukan Kemenag di lingkungan pendidikan.

"Kemenag telah mengumpulkan seluruh rektor di lingkungan Kemenag, seperti Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan seluruh perangkat kerja membahas salah satu topik adalah bagaimana memberantas judi online," ungkap Menag.

Topik terkait pencegahan judi online ini, juga akan dilakukan Kemenag melalui mimbar-mimbar agama, salah satunya melalui Khutbah Jumat bagi umat Muslim.

"Kami akan membuat sebuah khutbah seragam untuk seluruh masjid. Ada 800 masjid di seluruh Indonesia ditambah Mushalla, Langgar, dan Surau, rumah ibadah agama Islam ditambah dengan rumah ibadah agama lain, semuanya untuk mencegah potensi judi online," jelas Menag Nasaruddin.

Menurut Menag, dengan itu masyarakat akan memiliki kesadaran moral dan spiritual.

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk judi online ini ditegaskan menjadi sesuatu yang haram," ungkap Menag.

Menag juga memberikan imbauan kepada seluruh pihak, dan Masyarakat.

"Ayo kita proteksi keluarga kita, anak kita, dan teman kita agar tidak terkontaminasi dengan judi online," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam, Budi Gunawan; Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada; Menteri Diktsaintek, Satrio Brodjonegoro, dan Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Jamaah Haji 2025 Mulai Terbang 2 Mei dan Akan Dapat Makan Tiap Hari

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief menyampaikan, jamaah haji Indonesia 1446 H direncanakan sudah mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Mereka akan mulai diterbangkan ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025.

Hal tersebut disampaikan Hilman Latief dalam Rapat Kerja Nasional Kemenag tahun 2024 di Bogor. Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Syafi'i; Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Muhammad Irfan Yusuf; Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar, dan seluruh jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag.

"Insyaallah, untuk pelaksanaan haji 1446 Hijriah akan diselenggarakan pada

tahun 2025. Secara proses, jamaah akan mulai masuk asrama haji tanggal 1 Mei. Pada 2 Mei sudah ada (jamaah) yang terbang. Jadi, kita hitung mundur dari situ, dan tentu banyak hal yang harus kami persiapkan untuk saat ini," kata Dirjen PHU, Hilman Latief, di Bogor, Sabtu (16/11/2024).

Hilman menekankan, pentingnya persiapan yang matang, terutama untuk memenuhi kebutuhan jamaah selama di Arab

Saudi. Salah satu kebijakan baru yang akan diimplementasikan adalah kewajiban menyediakan makanan setiap hari bagi jamaah selama berada di Tanah Suci.

"Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, saat ini DPR dengan kita (Kemenag) sepakat bahwa jamaah harus makan setiap harinya selama di Saudi. Kalau dulu itu ada enam hari tidak dikasih makan. Tapi, sekarang itu harus ada," tambahnya.

"Karena itulah, menjelang puncak haji, kita membutuhkan, hitungan kami, sekitar 5,4 juta makanan siap saji. Tahun lalu, baru ada 1,6 juta makanan siap saji yang bisa kita sediakan," jelas Hilman.

Selain logistik, Kemenag juga memperkuat aspek edukasi jamaah melalui manasik haji yang mendukung moderasi beragama. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kerukunan internal, antar mazhab, dan antarumat beragama.

"Memang fikih haji di sana bermacam-macam. Kita juga akan mengedukasi jamaah untuk bisa memahami situasi di sana," jelas Hilman.

"Kita sudah memiliki mungkin 1.200 atau 1.500 petugas pembimbing ibadah haji profesional bersertifikat, yang dilatih di berbagai kabupaten/kota melalui PTKIN yang ada. Nah ini juga akan membantu dalam proses edukasi terhadap jamaah," pungkasnya. ♦



Karena itulah, menjelang puncak haji, kita membutuhkan, hitungan kami, sekitar 5,4 juta makanan siap saji. Tahun lalu, baru ada 1,6 juta makanan siap saji yang bisa kita sediakan.



WAMENDAGRI BIMA ARYA PASTIKAN PEMERINTAH AKAN BANGUN INFRASTRUKTUR YANG TERDAMPAK AKIBAT KONFLIK

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan, pemerintah akan membangun kembali infrastruktur yang terdampak akibat konflik sosial antar-dua desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Wamendagri saat berdiskusi dengan warga di Kantor Camat Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT.

"Kita pastikan status jalannya, apakah itu kewenangan kabupaten atau provinsi dan di mana nanti pemerintah pusat bisa mempercepat pembangunan infrastruktur itu," kata Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, di Flores Timur, NTT, Senin (25/11/2024).

Selain membangun infrastruktur, Bima juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak-anak korban konflik, agar mereka dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak.

Apalagi, kata dia, potensi akademik anak-anak di desa tersebut sangat luar biasa.

"Jadi kami akan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan atensi tenaga pengajar di sini. Itu Bapak/Ibu, jadi yang pertama memudahkan, membantu yang kesulitan, yang kedua adalah mengasah potensi tadi," tambah Bima.

Tak hanya fokus pada pendidikan, Wamendagri juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian guna

meningkatkan produksi hasil bumi. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan daerah tersebut salah satu pusat produksi di Flores Timur.

"Kita dorong supaya bisa menjadi kebanggaan dan pada saatnya nanti, ini menjadi gudang yang memproduksi, tidak saja komunitas pertanian, tapi juga calon pemimpin bangsa masa depan," pungkas Wamendagri.

Anggota Korpri Kemendagri Serahkan Bantuan ke Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan kepedulian terhadap para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa barang dan uang senilai Rp100 juta kepada para pengungsi.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kantor Bupati Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).



Kemudian bantuan tersebut akan disalurkan ke enam posko pengungsian, yakni Posko Lewolaga, Posko Konga, Posko Kobasoma, Posko Ile Gerong, Posko Bokang, dan Posko Lewoingu/Epotobi. Bantuan ini menjadi bukti solidaritas anggota Korpri Kemendagri, yang bergotong royong mengumpulkan sumbangan untuk warga terdampak erupsi.

Wamendagri Bima Arya juga turut mengunjungi posko-posko tersebut, mulai dari Posko Lewolaga, Posko Konga, hingga Posko Kobasoma, untuk menyerahkan langsung bantuan yang terdiri dari berbagai peralatan yang dibutuhkan pengungsi.

Wamendagri juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi.

Mengenai proses pembangunan hunian ini, saat ini sedang dalam tahap komunikasi dengan warga dan tokoh adat setempat.

"Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto, di Kantor Bupati Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memastikan hak pilih para pengungsi diakomodir dengan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah pengungsian dan perbatasan.

Kemendagri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat juga mendukung melalui penyediaan data administrasi kependudukan (Adminduk).

"Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk [pengungsi] mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Dan di Dukcapil nanti memudahkan untuk diberikan data kependudukan yang dibutuhkan," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga turut memastikan pendidikan bagi anak-anak di tempat pengungsian tetap berjalan. Tidak ada anak terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Bahkan, pelaksanaan ujian akan difasilitasi di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Sebagai dukungan tambahan untuk pendidikan, Korpri Kemendagri menyalurkan bantuan peralatan sekolah, termasuk buku gambar (16 lusin), penghapus (6 pak), pensil warna (108 pak), peruncing (12 pak), buku tulis (18 lusin), dan ballpoint (12 pak).

Selain itu, Korpri Kemendagri juga mem-

berikan bantuan berupa peralatan dapur, seperti kompor minyak tanah (24 buah), wajan (18 buah), panci (30 buah), dan spatula (18 buah). Bantuan peralatan makan mencakup piring (36 lusin), gelas (18 lusin), sendok/garpu (42 lusin), serta peralatan kebersihan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti

trashbag (12 pak), ember sedang (36 buah), baskom besar (30 buah), gayung mandi (144 buah), sabun cuci (144 buah), pasta gigi (144 buah), sikat gigi (144 buah), kopi (6 dus), dan air mineral dalam jumlah besar yang didistribusikan ke masing-masing posko. ♦





MENDAG BUDI PASTIKAN STABILISASI HARGA DAN PASOKAN JELANG NATARU

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menegaskan, pemerintah dan para pemangku kepentingan siap mengawasi dan memantau perkembangan harga dan pasokan minyak goreng di daerah masing-masing.

Hal ini diperlukan untuk memastikan pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng, khususnya menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Hal tersebut disampaikan Mendag Budi Santoso pada rapat koordinasi (rakor) Minyak Goreng yang digelar pada Kamis, (28/11/2024) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendag Budi Santoso bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha yang terdiri atas asosiasi dan distributor.

"Kami menggelar rakor untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, agar terjaga dengan baik dalam persiapan menyambut momen Nataru dan Lebaran 2025. Dalam rakor, kami berkomitmen

untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah masing-masing agar harga, distribusi, dan pasokan Minyakita dapat terjaga dengan baik," kata Mendag Budi Santoso, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Mendag Budi Santoso juga menekankan, upaya pengawasan diperlukan untuk memastikan perkembangan harga dan pasokan minyak goreng yang stabil, sehingga stabilitas ekonomi dapat terus terjaga. Pengawasan akan dijalankan bersama-sama oleh Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan dinas-dinas yang membidangi perdagangan di berbagai daerah.

"Harga Minyakita saat ini relatif stabil. Pasokan tidak ada masalah. Pergerakan harga minyak goreng berkolerasi terhadap andil inflasi, sehingga perlu upaya bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga," tambah Mendag Budi Santoso.

Menurut Mendag Budi, saat ini harga Minyakita secara Nasional berada di kisaran rata-rata Rp17.100/liter, masih di atas HET Rp15.700/liter dengan gap yang tidak terlalu tinggi.

Bahkan, di beberapa wilayah terpan-tau harga Minyakita masih sesuai HET.

"Kenaikan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Timur, karena permintaan meningkat. Oleh karena itu, kami sampaikan, daerah-daerah tertentu akan segera mendapat kiriman pasokan sebagai respons tingginya permintaan. Jadi, dari sisi pasokan, tidak ada masalah," ungkap Mendag Budi.

Mendag juga menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara intensif ke jaringan distribusi dan melakukan penindakan atas pendistribusian dan HET yang tidak sesuai dengan ketentuan apabila diperlukan.

Mendag juga mengatakan, bahwa seluruh stakeholder sepakat untuk berkolaborasi dalam menjaga pasokan Minyakita agar tersedia di seluruh Indonesia, sehingga harga Minyakita tetap stabil menjelang Nataru.

Songsong Indonesia Emas 2045, Wamendag Roro Minta Pelaku Usaha Tingkatkan Daya Saing

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pelaku usaha harus terus meningkatkan daya saing. Daya saing yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Hal ini merupakan salah satu fondasi penting bagi perjalanan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wamendag Roro Esti Widya Putri dalam kuliah umumnya pada Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Bidang Perdagangan di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jawa Barat.

Kuliah umum ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari atas mahasiswa Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen Maranatha dan Islamic Fashion Institute (IFI).

"Daya saing yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada triwulan-III 2024, pertumbuhan ekonomi

Indonesia masih tetap tumbuh positif 4,95 persen year-on-year (YoY) dan lebih tinggi dibandingkan negara maju lainnya di G20. Tentu ini juga menjadi fondasi penting bagi perjalanan menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Wamendag Roro Esti Widya Putri di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, capaian indikator daya saing Indonesia di tingkat dunia terus meningkat pada 2024. Misalnya, peringkat 18 untuk Sustainable Trade Index, peringkat 27 untuk World Competitiveness Ranking, peringkat 45 untuk World Digital Competitiveness Ranking, dan peringkat 54 untuk Global Innovation Index.

Wamendag Roro menambahkan, kewirausahaan berpengaruh terhadap

dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangannya.

"Pelaku usaha Bandung sungguh kreatif dan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Untuk itu, perlu keberanian berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, perlu juga menjalin kerja sama dan membangun merek lokal yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional," jelas Wamendag Roro.

Wamendag Roro menambahkan, kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha biasanya terkait pemasaran, baik itu akses maupun literasi.

Menurutnya, pelaku usaha perlu menggunakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memperluas pemasarannya.



daya saing. Berdasarkan indikator Global Entrepreneurship Index (GEI), kewirausahaan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Wamendag Roro juga meyakini, peluang bisnis terbuka lebar bagi pelaku usaha Bandung.

Menurutnya, dengan potensi sumber daya dan kreativitas yang unik, Bandung memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi produk-produk unggulan yang dapat dipasarkan secara global melalui dukungan inovasi

Berdasarkan hasil riset Google, Temasek, Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 82 miliar pada 2023. Nilai ini berkontribusi terhadap 40 persen ekonomi digital di ASEAN. Adapun sektor niaga-el (e-commerce) masih menjadi penyumbang terbesar. Pada 2023, nilai transaksi niaga-el mencapai Rp 453 Triliun dan diproyeksikan tumbuh menjadi Rp 487 Triliun pada 2024.

Pencapaian ini tidak terlepas dari peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 63,9 juta unit usaha dan mampu berkontribusi terhadap 61 persen struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia. UMKM Indonesia menggerakkan 120,59 juta tenaga kerja di berbagai sektor. ♦



KEMENHUB TINGKATKAN KERJA SAMA DENGAN KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT KAPASITAS SDM BIDANG HUKUM

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan, bahwa kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan akan lebih berat.

"Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan," kata Menhub Dudy Purwagandhi, saat bertemu Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

"Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI, tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek," tambah Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan.

Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Nataru! Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat di Seluruh Bandara di Indonesia

Pemerintah memutuskan akan menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2024/2025. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Elba Damhuri.

Kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

"Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah



Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan.

Menteri di Istana Merdeka, untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Elba menjelaskan, untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan AirNav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara, agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada

masa periode Nataru 2024/2025, yakni tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

"Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan," ungkap Elba.

Elba pun berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini, menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti.

Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024.

Lebih lanjut, Elba mengatakan, PT Pertamina Persero Group akan memberikan

pada maskapai yang melayani publik," ungkapnya.

Sementara itu, terkait penurunan tarif jasa kebandarudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%).

Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung op-



dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 (sembilan belas) lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak).

PT Pertamina Persero Group akan memberikan support di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sd 10%.

"Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak

erating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan, maka secara rata-rata terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

"Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan," pungkas Elba Damhuri. ♦

MENKO AIRLANGGA TERIMA KUNJUNGAN GUBERNUR GUANGXI, BAHAS PENGUATAN KERJA SAMA EKONOMI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Daerah Otonomi Etnis Zhuang Guangxi, H.E. Mr. Lan Tianli, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Provinsi Guangxi, termasuk dalam pengembangan kawasan industri, pendidikan vokasi, dan infrastruktur.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lan Tianli menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Wuling dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik.

Saat ini, Wuling akan menambah investasi senilai USD1 Miliar untuk memproduksi hingga 150 ribu unit kendaraan listrik per tahun guna memenuhi pasar ASEAN, RCEP, dan Afrika, serta menjadi kawasan

pusat produksi mobil kemudi kanan. Investasi ini telah menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja lokal di Indonesia.

Salah satu topik utama yang akan dibahas adalah terkait pengembangan Kawasan Industri Terpadu Indonesia-China (KITIC) di Bekasi, yang merupakan Kawasan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Nasional pertama yang didirikan oleh Tiongkok di Indonesia.

Investasi di Kawasan Industri Terpadu ini mencapai USD1,4 Miliar dan akan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. KITIC mencakup berbagai sektor industri, seperti suku cadang mekanis, bahan bangunan, pergudangan, logistik, serta pengolahan



makanan dan pengemasan yang saat ini sedang dalam pengembangan tahap II.

Pemerintah Provinsi Guangxi, juga menunjukkan minat untuk memperluas kerja sama dalam pendidikan vokasi di Jawa Barat, sejalan dengan hubungan sister province antara Guangxi dan Jawa Barat. Berfokus pada pengembangan teknologi digital, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut, juga disebutkan salah satu proyek kolaborasi utama dari hubungan ini, yakni pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung, yang menjadi simbol kemitraan strategis kedua negara. Proyek ini tidak hanya mampu meningkatkan konektivitas, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Lebih lanjut, Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan hubungan dengan Tiongkok, turut tercermin dalam kunjungan kepresidenannya

ke Beijing. Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut yakni penandatanganan MoU tentang kerja sama ekonomi biru oleh Menko Airlangga dan Menteri Perda-



. Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut yakni penandatanganan MoU tentang kerja sama ekonomi biru oleh Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao.

gangan Tiongkok, Wang Wentao.

"Implementasi MoU on Blue Economy yang saya tanda tangani dengan Menteri Perdagangan Tiongkok dalam pertemuan bilateral kepala negara Indonesia-Tiongkok di Beijing di awal bulan ini, mencakup

kerja sama multi-sektoral, yaitu kerja sama industri, pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, dan inovasi," tambah Menko Airlangga.

Menko Airlangga dan Gubernur Lan Tianli, juga membahas potensi kerja sama dalam pembangunan Giant Sea Wall di utara Pulau Jawa. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara sebelumnya. Selanjutnya, Gubernur Lan Tianli juga mengundang Menko Airlangga untuk menghadiri China-ASEAN Expo 2025 di Nanning.

Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Provinsi Guangxi menegaskan komitmen bersama untuk terus mendorong kolaborasi strategis di berbagai sektor. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum baru untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Provinsi Guangxi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.





Menko Airlangga: Swasembada Energi melalui Minyak Sawit adalah Kontribusi Konkret Indonesia dan CPO kepada Seluruh Dunia untuk Mengurangi Emisi Karbon

Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengadakan 12th Ministerial Meeting CPOPC di Jakarta, Indonesia.

Pertemuan ini untuk membahas berbagai cara dalam menghadapi tantangan di industri minyak sawit global, antara lain yang disebabkan oleh volatilitas pasar, fluktuasi harga, tuntutan keberlanjutan dari negara-negara konsumen atau importir, masuknya petani kecil dalam rantai pasokan global, risiko perubahan iklim, maupun isu-isu terkait lingkungan hidup,

kesehatan, dan tenaga kerja,

Dalam jangka panjang, tantangan-tantangan tersebut dapat mempengaruhi penghidupan para petani kecil dan produsen skala kecil, karena mereka adalah tulang punggung rantai pasokan minyak sawit.

Dalam hal ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan lebih dari 12 juta orang yang memperoleh pekerjaan langsung dan tidak langsung dari industri minyak sawit ini.

"Pada pertemuan hari ini, Indonesia ingin mengapresiasi kemitraan dan kolaborasi jangka panjang di antara negara-negara produsen minyak sawit, dengan dukungan CPOPC, meskipun terdapat tantangan yang kompleks di sektor minyak sawit global," kata Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Dalam dua tahun terakhir, pasar minyak sawit telah mengalami perubahan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai rekor tertinggi pada 2022 saat Covid-19, dan belum kembali normal hingga 2023.

Di sisi lain, negara-negara produsen minyak sawit juga terus menghadapi diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya, di mana hal itu disamakan sebagai kebijakan ramah lingkungan yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor, seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), EU RefuelEU Aviation Rules, EU Due-Diligence Regulation, Global Biofuel Alliance (GBA), dan



United Kingdom's Forest Risk Commodities (FRC) Law.

"Untuk itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit yang menguntungkan dan stabil. Selain itu, kita harus menahan diri dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO yang relevan, untuk memastikan transparansi pasar dan prediktabilitas minyak sawit," ungkap Menko Airlangga.

Indonesia juga tetap menganggap sektor kelapa sawit sebagai prioritas nasional, apalagi terdapat komitmen kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor vital ini, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita, yakni mencapai tujuan ketahanan pangan, swasembada pangan,



swasembada energi, dan hilirisasi industri.

"Dalam (swasembada energi melalui) Program B40 yang dilakukan Indonesia bahwa Malaysia mengapresiasi hal ini, karena berkontribusi kepada dunia terutama dalam pengurangan emisi. Jadi dalam

Program B35, kita menghemat sekitar 32 juta ton CO₂, dan kalau untuk B40 itu lebih dari 40 juta ton CO₂. Ini adalah kontribusi konkret Indonesia dan CPO kepada seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon," jelas Menko Airlangga. ♦



MALAM ANUGERAH HKN KE-60, APRESIASI BAGI KONTRIBUSI TRANSFORMASI KESEHATAN

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sukses menyelenggarakan Malam Anugerah Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jumat (29/11) malam.

Ini menjadi sebuah momen penuh kebanggaan bagi Kemenkes untuk memberikan penghargaan kepada para insan yang telah berkontribusi signifikan dalam mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, bersama Plt. Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, serta sejumlah pejabat di Kemenkes dan KemenPANRB memberikan penghargaan secara langsung kepada para pemenang. Acara yang mengusung tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” ini, menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKN ke-60.

Menkes Budi dalam sambutannya, mengingatkan bahwa keberhasilan program Kesehatan, tidak hanya bergantung pada arahan atau kebijakan, tetapi juga pada kemampuan setiap individu untuk menyadari pentingnya kesehatan mereka sendiri.

“Kesehatan yang baik adalah yang membuat setiap individu merasa bahwa mereka harus sehat. Prosesnya berbeda, bukan hanya menyuruh, tetapi men-

yadarkan,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menkes menutup sambutannya dengan mengajak masyarakat untuk membawa semangat hidup sehat ke lingkungan mereka masing-masing, baik lingkungan keluarga, tetangga, maupun rekan kerja.

Menkes juga mengingatkan, pentingnya menjaga pola makan, olahraga teratur, cukup tidur, serta menjaga hati tetap bahagia dan pikiran positif.

Pada malam puncak ini, Kemenkes juga memberikan sejumlah penghargaan untuk mengapresiasi berbagai pihak yang berprestasi di bidang kesehatan.

Inilah Beberapa Penghargaan Penting yang Diberikan pada Acara HKN ke-60 Tahun 2024:

1. Penghargaan HKN Olympic 2024

Ajang olahraga tahunan ini kembali menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kerja sama lintas sektor. Tahun ini, 50 atlet terbaik dari tujuh cabang olahraga seperti bulu tangkis, futsal, dan tenis

meja menerima penghargaan atas semangat dan prestasi mereka.

2. Penghargaan Pelayanan Publik

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan atas kinerja pelayanan publik yang prima. Kategori ini meliputi Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterima 33 UPT dan Kepatuhan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik yang diterima 36 UPT.

3. Perpustakaan Berinovasi

Tiga perpustakaan unggulan dari UPT Kemenkes terpilih sebagai pemenang berkat kontribusinya dalam menciptakan budaya kerja berbasis data melalui pengelolaan pengetahuan atau knowledge management.

4. Kompetisi Art and Creativity

Dengan tema "Pengabdian Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis," lomba ini melibatkan karya jurnalistik, video kreatif, dan fotografi. Kompetisi ini berhasil menggambarkan dedikasi tenaga kesehatan sebagai ujung tombak layanan kesehatan di Indonesia, dengan 15 karya terbaik menerima penghargaan.

Malam Anugerah HKN ke-60 bukan hanya perayaan, tetapi juga refleksi bersama untuk terus bergerak maju demi tercapainya kesehatan masyarakat yang lebih baik. Mari bersama wujudkan "Gerak Bersama, Sehat Bersama" untuk Indonesia sehat!*

Kemenkes Berkolaborasi Lebih Intensif dengan Komunitas untuk Eliminasi TBC di Indonesia

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menghadiri Diseminasi Memo Kebijakan Tuberkulosis (TBC) 2024-2029, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan mempercepat eliminasi TBC di Indonesia, di Jakarta.

Memo kebijakan tersebut merupakan hasil diskusi publik yang diinisiasi oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas.

Memo tersebut menguraikan tantangan kritis dan peluang strategis dalam mengendalikan serta mengurangi angka kejadian TBC di Indonesia, yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di negara ini.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan apresiasi dan dukun-

gannya terhadap memo kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan prioritas nasional, dan langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam memo ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target eliminasi TBC pada 2030.

"Kita tidak mungkin jalan sendiri, kita harus jalan sama-sama. Terima kasih kepada tim semuanya yang sudah mau bersama-sama pemerintah dan ini harus dipakai sebagai gerakan bersama bukan hanya program saja" kata Menkes, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Lebih lanjut, Menkes mengungkapkan bahwa penanggulangan TBC di Indonesia menghadapi tantangan serius,

ganggulasi TBC di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Nadia Luntungan menjelaskan, bahwa memo kebijakan yang diluncurkan oleh Stop TB ini berfokus pada empat area utama yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu akses pengobatan yang terbatas, kapasitas tenaga kesehatan yang belum terstandar di seluruh fasilitas kesehatan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta pembiayaan dalam penanggulangan TBC.

Dalam memo tersebut, berbagai rekomendasi praktis diusulkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya, serta



terutama dengan prevalensi kasus yang sangat tinggi.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India, dengan perkiraan 1 juta kasus baru setiap tahunnya.

Meski berbagai langkah penting dalam penanggulangan TBC telah dilakukan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan kesadaran pasien untuk memeriksa kesehatan dan keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil.

Menkes berharap memo kebijakan ini, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas yang paling terdampak, dapat melengkapi rencana strategis nasional yang telah disusun oleh pemerintah dalam men-

mendekatkan layanan kepada komunitas yang rentan terhadap TBC.

"Tantangan tersebut adalah badai yang kita hadapi dalam penanggulangan TBC. Namun, di balik badai itu, ada peluang strategis yang dapat kita manfaatkan, salah satunya adanya pemerintahan baru dan penanggulangan TBC menjadi salah satu prioritas Nasional," ungkap Nurul Nadia Luntungan.

Eliminasi TBC akan jatuh tempo pada 2030 dan perjalanan untuk mencapai target itu semakin dekat. Nurul pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal langkah pemerintah dalam menanggulangi TBC.

"Dengan semangat gotong royong dan sinergi, saya percaya bahwa kita bisa mencapai dermaga itu sesuai dengan komitmen yang diberikan," tutupnya. ♦

HUKUM MEMAKAI MUKENA BERMOTIF DAN WARNA-WARNI, SAHKAH DALAM SHALAT?

Mukena merupakan salah satu kebutuhan seorang Muslimah dalam menjalankan ibadah shalat. Saat ini, mengikuti perkembangan zaman era modern, para pelaku bisnis pun terus berinovasi memproduksi mukena dengan berbagai kombinasi warna, bordiran batik, bunga, atau daun, dan ragam motif lainnya.

Sementara itu, menggunakan pakaian yang bermotif atau bergambar saat shalat, hukumnya makruh karena dianggap dapat mengganggu kekhusyukan, namun di lain sisi peminatnya sangat banyak dan sangat menguntungkan bagi produsen.

Lantas, secara fiqh bagaimana hukum memakai mukena dengan motif dan warna warni, dan sebatas manakah gambar, corak, motif, atau variasi warna pada mukena yang makruh dipakai dalam shalat?



Para fuqaha utamanya ulama mazhab Syafi'i menyatakan, kemakruhan shalat dengan mengenakan pakaian bergambar bercorak atau bermotif.

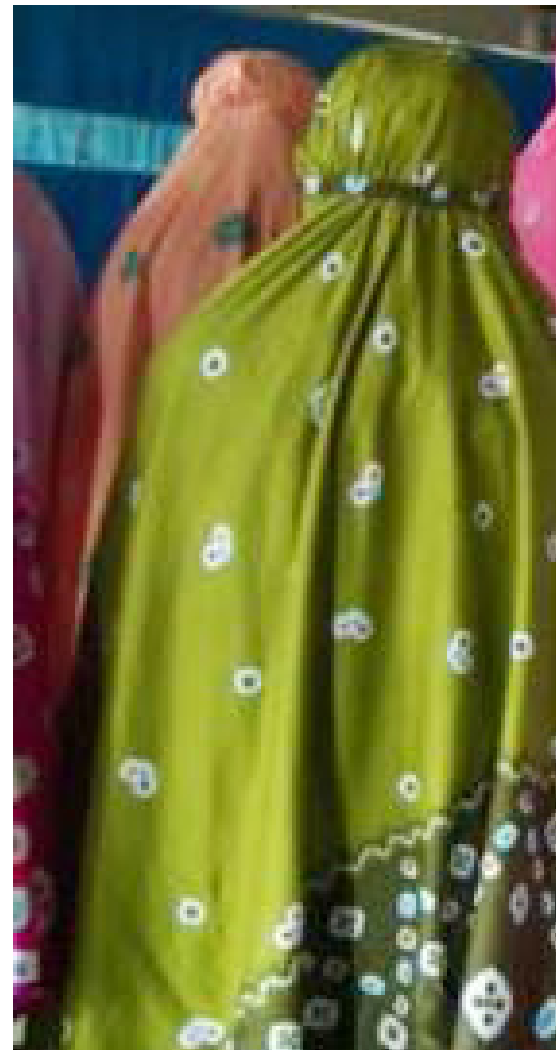
Dilansir dari NU Online, Para fuqaha utamanya ulama mazhab Syafi'i menyatakan, kemakruhan shalat dengan mengenakan pakaian bergambar bercorak atau bermotif.

Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan: "Karena hadits larangan mengangkat pandangan ke atas dalam shalat, dimakruhkan juga shalat memakai baju yang bergaris-garis, atau di depannya atau di bawahnya ada baju seperti itu, sebab hal itu dapat mengganggu kekhusyukan".

Kemakruhan didasarkan pada hadits riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut: "Apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam shalat mereka?" Kemudian Nabi SAW bersabda lagi: "Hendaknya mereka berhenti dari hal itu, atau (jika

tidak) niscaya penglihatan mereka tercerabut secara cepat." (HR Al-Bukhari).

Hukum makruh memandang langit saat shalat dalam hadits di atas menjadi dasar hukum makruh mengenakan baju yang bergaris-garis, sebab keduanya mempunyai 'illat yang sama, yakni meng-



ganggu atau mengalihkan kekhusyukan shalat.

Syekh Al-Bakri Syatha menjelaskan redaksi Fathul Mu'in secara rinci: "Ungkapan Al-Malibari: 'Dan karena itu makruh hukumnya ...' maksudnya adalah, karena adanya hadits yang menjadi dalil atas kemakruhan memandang ke langit, maka hukum memakai baju bergaris-garis juga dimakruhkan ..., dengan alasan yang

sama yaitu adanya pengalihan perhatian dari shalat pada masing-masing dari dua hal tersebut ... Ungkapan: 'Fi mukhattat', yaitu pakaian yang ada garis-garisnya, baik berupa gambar atau lainnya.

Ungkapan: 'Ilaihi', maksudnya dengan adanya pakaian di depannya yang mengandung hal tersebut. Ungkapan: 'Alaihi', seperti sajadah.

Ungkapan: 'Karena mengganggu kekhusyukan', adalah alasan untuk hukum yang ditetapkan. Maksudnya, pakaian bergaris-garis dimakruhkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan, karena hal itu mengganggu kekhusyukan."

Uraian Syekh Al-Bakri Syatha semakin

melihat kondisi orang yang melihat, apakah benar-benar menyebabkannya lalai ataupun tidak.

Artinya, hukum makruhnya dibangun atas dasar bahwa pandangan terhadap baju yang bergambar, bergaris-garis atau selainnya, cenderung menyebabkan kelalaian, tidak melihat pada kondisi khusus orang yang tidak terganggu dengannya.

Ibnu Hajar memfatwakan: "Maka pendapat yang lebih kuat adalah, apabila hal tersebut berada dalam penglihatan seseorang, maka shalatnya dimakruhkan. Sebab, melihatnya cenderung menyebabkan kelalaian. Karena itu, hukum

berkata: Makna dari ungkapan-ungkapan ini saling berdekatan, yaitu menyibukkan orang dari kesempurnaan hadirnya hati dalam shalat, merenungi dzikir-dzikirnya, bacaan Al-Qurannya, serta tujuannya berupa kepatuhan dan ketundukan. Karena itu, di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk menghadirkan hati dalam shalat, merenungkan apa yang telah disebutkan, mencegah pandangan agar tidak melihat hal-hal yang mengganggu, serta menghilangkan sesuatu yang dikhawatirkan dapat menyibukkan hati.

Juga, makruh menghias mihrab masjid, dindingnya, dan mengukirnya, serta hal-hal lain yang dapat mengganggu



memperjelas, yang dimakruhkan tidak hanya pakaian bergaris-garis, tapi juga pakaian bergambar atau selainnya. Baik di hadapan orang yang shalat atau di bawahnya, semisal sajadah, yang berpotensi besar mengganggu kekhusyukan shalat.

Imam Ibnu Hajar juga menegaskan, kemakruhan memakai pakaian bergaris-garis dalam shalat bersifat mutlak, tanpa

ditetapkan berdasarkan adanya objek tersebut tanpa melihat kondisi masing-masing orang-orang yang melaksanakan shalat."

Syekh Mahfudz Tremas dengan mengutip pendapat Imam An-Nawawi menjelaskan kedekatan makna dari keseluruhan kalimat-kalimat tersebut, yakni mengganggu hati dari kesempurnaan fokus dalam shalat. Imam An-Nawawi

kekhusyukan.

Hal ini karena Nabi menjadikan alasan untuk menghilangkan kain bergambar (khumrah) adalah untuk tujuan ini.

Dalam hal ini, shalat tetap sah, meskipun terdapat gangguan pikiran terhadap hal yang tidak berkaitan dengan shalat. Ini adalah kesepakatan para ulama fiqh. Karenanya, jagalah pemahaman ini karena sangat berharga. ♦

HUKUM ISTRI GUGAT CERAI KARENA NAFKAH KURANG TERPENUHI

Kurangnya nafkah dalam kehidupan berumah tangga merupakan salah satu isu serius yang dapat memicu proses perceraian dalam sebuah pernikahan.

Di dalam konteks hukum Islam di Indonesia, nafkah adalah tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan.

Apabila seorang suami gagal memenuhi tanggung jawab tersebut, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan talak. Proses ini biasanya dimulai dengan istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Di dalam gugatan tersebut, istri harus mengemukakan alasan konkret mengenai ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah. Bukti-bukti seperti rekapan pengeluaran, penghasilan suami yang tidak memadai, atau bahkan kegagalan suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat disertakan.

Pengadilan agama kemudian akan memproses gugatan ini dengan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Pada tahap ini, suami diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mengapa nafkah tidak dapat dipenuhi.

Pengadilan akan mempertimbangkan segala bukti dan argumen yang diajukan, serta menilai apakah alasan tersebut cukup kuat untuk memenuhi syarat perceraian berdasarkan hukum.

Jika pengadilan menemukan bahwa suami benar-benar gagal memenuhi nafkah secara substansial dan tanpa alasan yang sah, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan talak. Keputusan ini akan mempengaruhi status hukum pernikahan dan hak-hak yang berkaitan dengan pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah yang masih berlaku setelah perceraian.

Dalam konteks fiqih Islam, gugatan cerai (talak) merupakan salah satu tindakan yang mendapatkan kajian sangat mendalam dan diatur secara spesifik serta memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

Gugat cerai diperbolehkan tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan dan syarat agar prosesnya sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dilansir dari NU Online, Sayyid Abdurrahman bin Husain bin Umar al-Hadrami dalam kitabnya, menjelaskan bahwa persoalan gugat talak merupakan hal yang penuh risiko, bahkan para ulama memilih untuk diam tentang hal ini.

Namun jika hal itu benar-benar terjadi dan harus dilakukan, maka harus ada be-

berapa syarat yang dipenuhi, di antaranya adalah ketika suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya: "Diperbolehkan bagi istri untuk merusak pernikahan dari suaminya, baik ia hadir maupun tidak, dengan sembilan syarat, yaitu: (1) suami tidak mampu memberikan nafkah, pakaian dan tempat minimum, bukan makanan tambahan; (2) suami sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi untuk itu; (3) suami tidak dapat menemukan seseorang yang bisa mempekerjakannya; (4) suami menderita penyakit yang menghalanginya untuk bekerja selama tiga hari; (5) suami memiliki pekerjaan yang tidak layak yang ia enggan lakukan, atau pekerjaannya adalah sesuatu yang haram; (6) suami hadir, tetapi hartanya berada jauh dua marhalah (sekitar 89 km, menurut sebagian pendapat); (7) harta



suami berupa properti, barang dagangan, atau utang yang belum jatuh tempo; (8) harta suami ada pada orang yang kesulitan atau sedang disita; dan (9) nafkah dari semua sumber tersebut tidak dapat diperoleh dalam waktu tiga hari.”

Dalam konteks istri menggugat cerai karena nafkah yang kurang terpenuhi, mengacu pada syarat yang pertama, yaitu: “Suami tidak mampu memberikan nafkah, pakaian dan tempat minimum, bukan makanan tambahan”.

Dengan demikian, maka jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, artinya tidak mampu memberikan makanan, pakaian, atau tempat tinggal paling sedikit, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai.

Lantas, seperti apakah ukuran paling sedikit dalam memberi nafkah dalam konteks ini, sehingga ketika suami tidak memenuhi, istri bisa mengajukan gugatan cerai?

Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami, dalam kitabnya menjelaskan bahwa standar nafkah minimum ini adalah mencakup makanan, pakaian dan

tempat. Masing-masing dari ketiganya ini memiliki standar minimum tersendiri.

Standar minimum makanan, misalnya, yaitu kewajiban suami untuk memberikan makanan satu mud kepada istrinya: “Nafkah minimum yang wajib itu adalah satu mud. Maka tidak termasuk apabila suami yang berpenghasilan sedang atau orang kaya mengalami kesulitan, dari nafkah yang wajib diberikan pada istrinya, maka tidak ada gugatan cerai. Maksud dari ketidakmampuan dalam hal pakaian, yaitu pakaian paling sedikit yang wajib wajib darinya, berbeda dengan pakaian seperti celana atau pakaian yang terbuat dari bahan tertentu, maka tidak ada gugatan cerai dengan hal itu. Maksud dari tempat tinggal, yaitu tempat tinggal paling sedikit. Maka istri tidak boleh gugat talak, jika sudah memiliki tempat tinggal sekalipun tidak layak baginya.”

Syekh Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan: “Satu mud adalah cakupan ukuran penuh dua telapak tangan pada umumnya.”

Mud merupakan satuan ukuran yang tidak mudah dikonversikan menjadi satuan

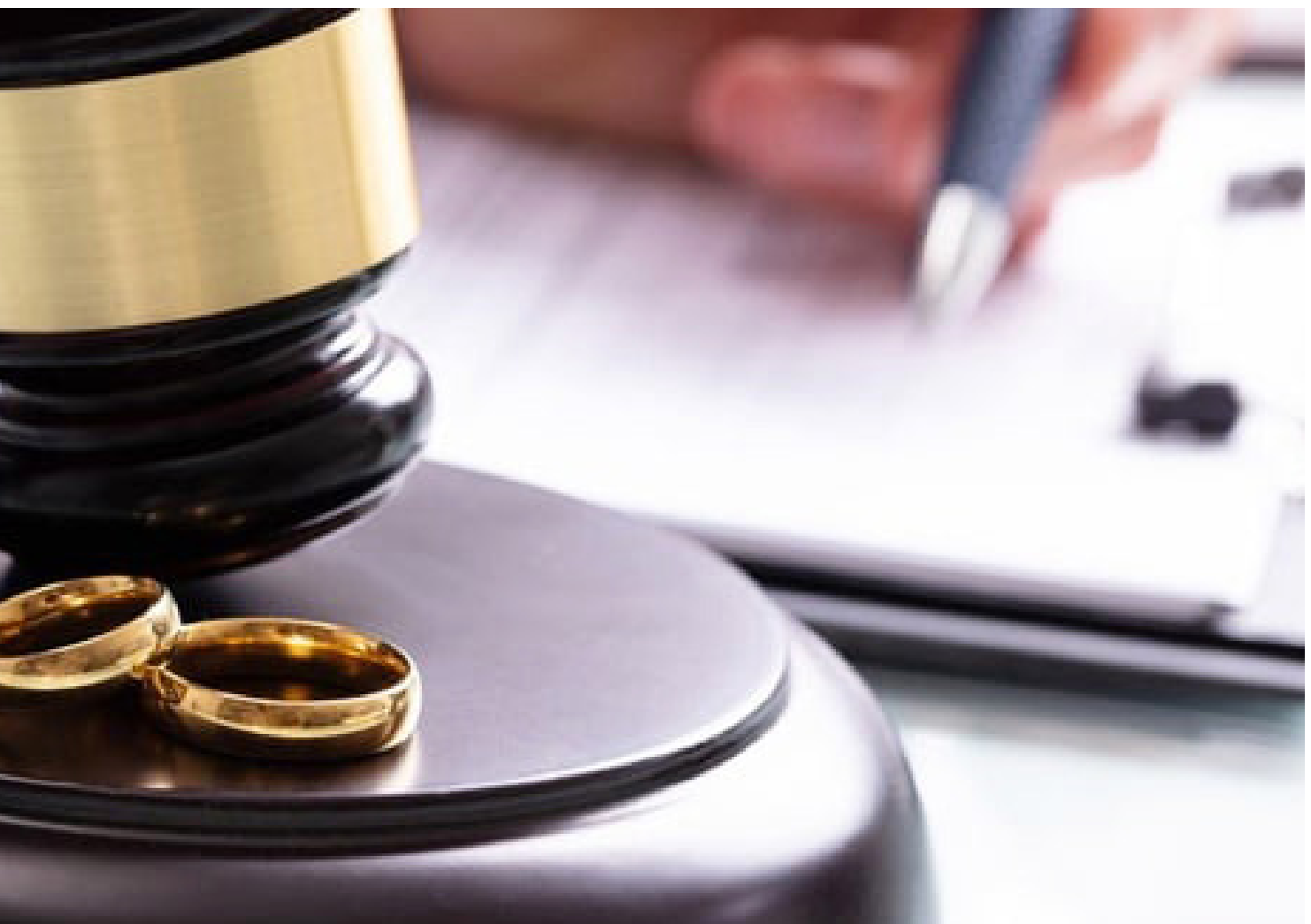
berat. Beberapa ulama menganggap bahwa satu mud setara dengan berat sekitar 0,6 kilogram.

Menurut pandangan ulama Syaf’iyah, satu mud beras, misalnya, setara dengan berat sekitar 675 gram atau 6,75 ons beras. Sedangkan jika dikonversikan ke uang rupiah, kurang lebih Rp 15 ribu.

Mengacu pada beberapa penjelasan di atas, istri dapat melakukan gugatan cerai karena nafkah kurang terpenuhi, tergantung pada konteks yang ada dan terjadi dalam hubungan keluarganya.

Jika nafkah yang kurang terpenuhi tersebut berhubungan dengan tiga kewajiban nafkah yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang paling sedikit, maka ia boleh untuk mengajukan gugatan cerai.

Namun, jika kewajiban nafkah primer suami sudah terpenuhi semuanya, hanya saja istri tidak mendapatkan nafkah lebih, seperti makanan yang enak, pakaian yang nyaman dan tempat tinggal yang mewah, ia tidak boleh mengajukan gugatan talak, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. ♦



has accepted Islam and makes his declaration of
at the King Fahad Mosque:



Lil Jon Musisi Tenar AS yang Mualaf Awal Ramadhan Lalu RESMIKAN HUBUNGAN RESMI DENGAN JAMILA SOZAHDAH

Dunia terkejut ketika pertengahan Maret tahun ini, Lil Jon mengumumkan dirinya memeluk Agama Islam. Publik Amerika Serikat terperangah sebab Lil Jon merupakan salah satu musisi sekaligus pengusaha terkenal dan kaya raya. Pada Jumat (15/3/2024) Lil Jon bersyahadat. Mualaf, dia!

Lil Jon (52) adalah Rapper, DJ (Disc Jockey), dan produser rekaman terkenal Amerika Serikat bernama Jonathan H. Smith, yang dikenal luas dengan nama panggungnya Lil Jon. Momen bersejarah dalam hidupnya itu sengaja dia lakukan di tempat sangat sakral.

Lil Jon memilih hari Jumat untuk mengucapkan Syahat pada hari Jumat di Masjid King Fahad di Los Angeles, AS, secara terbuka di hadapan banyak jamaah di masjid. Mualafnya Lil Jon diduga juga karena ia tengah menjalin hubungan dengan salah satu selebriti tenar Amerika

Serikat dari Afghanistan, Jamila Sozahdah (38).

Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan rapper Amerika itu mengucapkan Syahadat, sebuah ikrar, dalam Bahasa Arab dan kemudian dalam Bahasa Inggris, di bawah bimbingan imam masjid.

Lahir di Atlanta, Georgia, pada tahun 1972, dan dikenal dengan nama aslinya Jonathan H. Smith, rapper ini mendapatkan ketenaran karena peran pionirnya dalam mempromosikan subgenre hip-hop di awal tahun 2000-an.

Jon, terkenal karena kepribadiannya

yang dinamis dan slogan khasnya seperti "Ya!" dan "Oke," menjadi terkenal dengan lagu-lagu hit yang menduduki puncak tangga lagu seperti "Get Low" dan "Turn Down for What."

Jon menjadi orang Amerika kedua yang memeluk Islam pada minggu pertama Ramadhan tahun ini, mengikuti jejak penulis dan aktivis Amerika Shaun King.

Dengan memeluk Islam, Jon bergabung dengan sekelompok selebriti yang telah berpindah keyakinan, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Clarence Seedorf, Andrew Tate, Kevin Lee, Gervonta Davis, dan Thomas Parthey.

Lil Jon dan Jamila Menunggu Kelahiran Anak Pertama

Jamila Sozahdah (38) dan Lil Jon (58) telah setahun menikah secara agama, namun belum melangsungkan pernikahan secara resmi. Jamila merupakan bintang serial realita "Secrets & Sisterhood: The Sozahdahs" berkisah tentang keluarga-

Keduanya bersikap santai saja, tetapi perut buncit Jamila yang semakin membesarlah yang mencuri perhatian. Meskipun pasangan itu belum secara resmi mengonfirmasi hubungan mereka, mereka telah tampil bersama, dengan Lil Jon bahkan mendukung Jamila di pemutaran perdana acaranya.

Bulan ini, bintang Secrets & Sisterhood

Jamila Sozahdah adalah salah satu dari 10 bersaudara perempuan yang semua keluarganya adalah warga Muslim Amerika. Keluarga Jamila Sozahdah melarikan diri dari Afghanistan pada tahun 1980-an.

Majalah Glamour memberitakan, keluarga Jamila melarikan diri dari Afghanistan selama invasi Rusia pada tahun 1980-an dan tumbuh sesuai dengan nilai-nilai konservatif yang ketat di AS. Pada tahun 1999, tragedi terjadi ketika ayah mereka dibunuh, sehingga ibu mereka harus membesarkan ke-10 putrinya sendirian.

Disney+ menggambarkan "Secrets & Sisterhood" sebagai kisah asli, nyata, dan penuh dengan pengungkapan yang mengejutkan, dan mereka tidak melebih-lebihkan. Acara ini berkisah tentang 10 bersaudara Sozahdah saat mereka menyeimbangkan karier, cinta, dan ekspektasi budaya di tengah kemewahan Los Angeles.

Dengan beberapa saudara perempuan yang lahir di Afghanistan dan yang lainnya di AS, perbedaan budaya dapat memicu ketegangan, People melaporkan. Namun, Jamila mengatakan kepada majalah itu bahwa ikatan mereka "sama sekali tidak dapat dipatahkan".

Dikenal sebagai "Dr Jamila" di antara saudara-saudaranya, Jamila adalah Associate Dokter bersertifikat, menurut GEM. Dia telah menghabiskan lebih dari satu dekade menyelamatkan nyawa di pusat trauma dan UGD di California selatan, juga berupaya menemukan solusi bagi pasien yang menghadapi kondisi kronis.

Dia adalah pendiri Drip Doctors dan Society in Scrubs. Pada tahun 2023, Jamila meluncurkan Society In Scrubs, merek fesyen yang dirancang untuk memadukan gaya dan kepraktisan bagi para profesional kesehatan, People melaporkan.

Dia juga mendirikan Drip Doctors pada tahun 2014, menawarkan terapi vitamin IV dan perawatan anti-penuaan untuk mengembalikan keseimbangan alami, menurut profil LinkedIn-nya. ♦



anya saat mereka menyeimbangkan karier, cinta, dan ekspektasi budaya di tengah gemerlap Los Angeles

Rapper dan DJ Lil Jon dan pacarnya bintang realitas Jamila Sozahdah baru saja mengumumkan hubungan mereka ke publik secara besar-besaran. Menurut Daily Mail, pasangan itu terlihat menikmati malam yang nyaman di restoran favorit selebriti, Giorgio Baldi, di Santa Monica, menarik perhatian saat mereka berjalan keluar bergandengan tangan.

Sebelum pengumuman resmi pekan lalu, Lil Jon dan Jamila tidak pernah mengungkapkan hubungan mereka ke media.

itu mengunggah foto kehamilannya di Instagram, dengan bangga memamerkan buktinya. "Menjadi seorang ibu adalah metamorfosis - penuh kekuatan, semangat, dan transformasi," tulisnya.

Jamila merupakan dokter dengan kariernya sebagai profesional kesehatan, sekaligus pengusaha, dan artis.



Marcell Darwin

MUALAF KARENA TIBA-TIBA SAJA INGIN MASUK ISLAM

Aktor tampan Marcell Darwin (33) telah resmi memeluk Agama Islam pada 2020 sebelum ia menikah, tepatnya 12 Januari 2020. Marcell yang ketika itu berusia 29 tahun memang sudah menjalin kasih dengan Fasty Nabila yang beragama Islam, tapi di dalam hatinya belum ada keinginan kuat untuk mualaf.

Hari itu, Marcell bangun tidur dan tiba-tiba ingin memeluk Agama Islam. Padahal ia dilahirkan dalam keluarga Katolik yang taat. Tapi hari itu, ia tiba-tiba datang ke rumah Nabila dan mengutarakan keinginannya men-

gucapkan Syahadat.

"Tiba-tiba dia datang ke rumah, tiba-tiba ngomong ke om ku, 'om, saya mau masuk Islam', langsung dipanggilin saksi. Hari itu juga masuk Islam," ujar Nabila di Kanal YouTube Noice, mengenang momen Marcell mualaf.

Keluarga Nabila terkejut karena Marcell tiba-tiba saja ingin masuk Islam. Apalagi waktu ditanya mengapa, Marcell tak bisa menjelaskan alasannya. "Nggak tahu," kata Marcell. Dia juga membantah bahwa itu adalah cara untuk meluluhkan hati keluarga Nabila.

Baru setelah seiring berjalannya waktu, Marcell menyadari bahwa dirinya yang tiba-tiba ingin mualaf mungkin adalah sebuah panggilan.

"Akhirnya setelah gue ngobrol-ngobrol, makin ke sini, mungkin itu yang dinamakan panggilan. Hidayah mungkin," kenang Marcell.

"Jadi itu yang buat gua oh kenapa gua masuk Islam mungkin gue dapet hidayah, begini toh rasanya hidayah. Tiba-tiba aja, nggak dikasih mimpi, cobaan, bisikan atau apa lah," terang Marcell.

"Tiba-tiba aja bangun tidur 'ah masuk Islam ah'," katanya menegaskan bahwa ia tidak mendapat wangsit atau peristiwa-peristiwa yang mengarahkannya pada Islam. Semua terjadi begitu saja, spontan.

Bahkan, kedua orangtuanya tidak ia





beritahu terlebih dahulu untuk masuk Islam. Ia baru bicara dengan orangtuanya setelah dirinya mualaf. Dan di luar dugaan, Mama dan Papanya tidak memberi reaksi berlebihan.

Kedua orangtuanya tak mempermasalahkan keputusan Marcell. Mereka member kebebasan putranya untuk memilih agama yang diyakininya.

Semuanya Jauh Lebih Baik setelah Muslim

Staus Muslim yang disandang Marcell Darwin membuat hidupnya merasa sangat indah. Semua dia syukuri, bisa menikah dan bahagia bersama Nabila. Lalu dikaruniai anak, karir terus naik, perekonomian keluarga terus membaik.

"Alhamdulillah setelah gue mualaf, abis itu gue nikah segala macam, gue punya tabungan, bisa beli mobil dua, apa segala macam," katanya.

Marcell sempat jadi sorotan netizen dengan ia menunjukkan keseriusannya mendalami agama Islam. Salah satunya,



Jadi itu yang buat gua oh kenapa gua masuk Islam mungkin gue dapet hidayah, begini toh rasanya hidayah. Tiba-tiba aja, nggak dikasih mimpi, cobaan, bisikan atau apa lah.

saat Nabila membantunya menghafalkan Ayat Kursi.

Hal itu terekam dalam video yang ia unggah di Instagram, di mana merekam perbincangannya dengan sang istri soal ayat kursi.

"Dalam judul: istriku adalah guruku," tulis Marcell pada caption.

Awalnya Marcell menanyakan kepada Nabila seperti apa bacaan Ayat Kursi. Nabila lantas menjelaskan bahwa Ayat Kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al Baqarah dan melantungkannya.

Marcell merasa bahwa ayat tersebut cukup panjang sehingga agak sulit untuk dihafalkan. Tapi Nabila langsung memberikan dukungan agar sang suami tak patah semangat.

Sosok Marcell Darwin hingga kini terus mempelajari agama Islam. Bahkan, dia memiliki kebiasaan setor hafalan surat pendek untuk shalat.

Dibimbing oleh sang istri Nabila, Marcell Darwin hafalan surat-surat pendek setiap malam bersama putra mereka. ♦

INI, 12 GEJALA GANGGUAN MENTAL YANG BISA MENYERANG SIAPA SAJA, TERMASUK KITA

Gangguan Mental ternyata sudah sedemikian rupa melanda masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei tahun 2017 yang dilakukan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), sekitar 13,4 persen atau 36 juta orang di Indonesia hidup dengan gangguan mental.

Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia adalah jenis gangguan mental yang paling banyak diderita masyarakat di usia produktif.

Dilansir Klikdokter.com dari American Psychological Association (APA), Kamu memiliki kondisi Mental Sehat apabila relatif merasa sejahtera, mampu menyesuaikan diri dengan baik, relatif terbebas dari perasaan cemas, sanggup menciptakan hubungan interpersonal yang sehat, serta mampu mengatasi stres.

Sedangkan Gangguan Mental bisa menyebabkan Kamu punya ketakutan berlebihan hingga mudah merasa lelah.

DAFTAR 15 GEJALA GANGGUAN MENTAL YANG HARUS DIKETAHUI DAN DIATASI:

1. Mudah Lelah

Gangguan mental bisa menyebabkan Kamu mudah merasa lelah ketika melakukan aktivitas yang sama dibandingkan sebelumnya.

Contohnya Kamu tidak ada keluhan bekerja selama delapan jam sebelumnya. Gangguan psikologis bisa bikin Kamu merasa sangat lelah ketika bekerja kurang dari delapan jam. Hal ini membuat energi dan produk-

tivitas Kamu menurun.

2. Kurang Merawat Diri

Motivasi Kamu untuk merawat diri berkurang saat mengalami gangguan mental. Kamu perlahan tidak mempedulikan kebersihan badan, seperti tidak memotong kuku dan jarang mandi. Kamu juga tidak peduli terhadap kebersihan ruangan maupun benda yang Kamu kenakan.

3. Ketakutan Berlebih

Apabila Kamu sering merasa cemas, takut, gugup, atau panik berlebih bahkan ketika menghadapi masalah sepele, maka waspadalah. Karena ini adalah ciri penyakit psikis.

Selain menyadari ge-

jala tersebut sendiri, Kamu bisa minta tolong orang terdekat untuk mengklarifikasi respon Kamu beberapa waktu belakangan.

4. Perubahan Suasana Hati

Ketika mengalami gangguan mental, Kamu cenderung mengalami perubahan suasana hati. Kamu bisa merasakan kesedihan yang mendalam, sulit mengekspresikan kegembiraan, apatis terhadap lingkungan, merasa putus asa, hingga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.

5. Mudah Lupa dan Susah Fokus

Sering Lupa Mau Ngapain atau Bilang Apa? Awas, Doorway Effect! (Pathdoc/Shutterstock)

Kamu sulit berkonsentrasi saat mengidap gangguan mental. Akibatnya, Kamu sulit berpikir jernih sehingga makin susah menyelesaikan masalah atau menemukan solusi. Tak hanya itu, gangguan mental juga bisa bikin Kamu mudah lupa.

6. Gangguan Makan

Perubahan nafsu makan setelah





mengalami stres perlu Kamu perhatikan dan sadari. Sebab ini termasuk ciri-ciri gangguan mental.

Gangguan makan dapat berupa peningkatan atau penurunan nafsu makan secara berlebihan, memuntahkan makanan yang dikonsumsi, hingga kehilangan nafsu makan.

7. Gangguan Tidur

Masalah mental bisa menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur yang dimaksud, bisa berupa insomnia (sulit untuk tidur), hipersomnia (tidur secara berlebihan), mimpi buruk, dan mudah terbangun. Dampaknya, tidur kamu jadi tidak berkualitas sehingga mudah merasa lelah setelah tidur.

8. Menarik Diri dari Pergaulan

Ketika merasa sangat tertekan dengan masalah tertentu, kamu memilih menarik diri dari pergaulan. Kamu merasa tidak memiliki energi untuk menjelaskan kondisimu.

Kamu juga sulit berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu lama. Hal ini menyebabkan kamu merasa kurang nyaman ketika orang lain berusaha menghubungi atau bertemu.

9. Berperilaku Destruktif

Beberapa jenis gangguan mental bisa mendorong kamu melakukan perilaku destruktif yang merusak dan merugikan. Perilaku destruktif bisa ditujukan kepada diri sendiri (self-harm) atau kepada orang

lain, seperti memukul, meneriaki, memaki, menendang, dan sebagainya.

10. Gairah Seks Menurun

Gangguan mental dapat membuat Kamu kehilangan kesenangan dalam melakukan sesuatu, salah satunya aktivitas seksual. Masalah psikologis bisa mengurangi gairah seks secara drastis.

11. Mengonsumsi Zat atau Obat Berlebihan

Ciri penyakit psikis selanjutnya adalah berkurangnya kontrol diri. Hal ini bisa menyebabkan Kamu menggunakan rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang secara berlebihan.

12. Pikiran untuk Menyakiti Diri Sendiri atau Orang lain

Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain adalah salah satu gejala yang dapat mengindikasikan adanya gangguan mental.

Gejala ini seringkali terkait dengan kondisi seperti depresi berat, gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian tertentu. Memiliki pikiran atau keinginan untuk mengakhiri hidup atau melukai orang lain. ♦



Contohnya Kamu tidak ada keluhan bekerja selama delapan jam sebelumnya. Gangguan psikologis bisa bikin Kamu merasa sangat lelah ketika bekerja kurang dari delapan jam.

DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Diwarnai WO, Karena Paslon Menilai KPU Tidak Netral

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) secara umum hanya menyelenggarakan dua kali Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 17 Kabupaten Kota di Sumsel, hanya KPU Kota Palembang yang menyelenggarakan tiga kali Debat Publik, yang semuanya berjalan lancar dan sukses.



KPU Kabupaten-Kota lainnya hanya menggelar dua kali debat publik dengan berbagai pertimbangan. Termasuk di antaranya beberapa KPU Daerah memilih menyelenggarakannya di luar wilayah mereka, terutama di Palembang. Di samping alasan fasilitas, faktor keamanan menjadi pertimbangan mereka dalam memilih lokasi.

KPU Daerah juga memilih tidak melak-

sanakan sendiri hajatan debat publik ini melainkan menyerahkannya kepada Event Organizer, pihak ketiga. Demi kepraktisan, keamanan, dan menjaga netralitas, menjadi alasan utama mereka.

Benarkah Debat Publik Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Event Organizer netral? Ternyata tidak juga. Terbukti beberapa Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati merasakan ketidaknetralan saat pelaksanaan debat.

Juga, lokasi di luar daerah yang diperkirakan sebagai tempat aman masih sempat juga diwarnai bentrok antar pendukung paslon. Beruntung aparat keamanan sigap sehingga kerusuhan bisa langsung diredam dan provokator diamankan.

Paslon YPN-YESS dan Paslon Toha-Rohman Pilih WO

Sepanjang gelaran Debat Publik Pilka-



da 2024, setidaknya masyarakat 2 kali dikejutkan oleh Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di tengah berlangsungnya Debat Publik, ada Paslon yang memutuskan walk out (WO) alias meninggalkan arena sebelum debat selesai. Itu dilakukan Paslon YPN-YESS pada Minggu (17/11/2024) malam di The Palembang Zuri Hotel.

Insiden WO Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita (YPN-YESS) ini tidak terjadi serta merta. YPN YESS dibuat tak nyaman saat menyampaikan visi misi dan program, karena mikrofon yang mereka gunakan mati. Tak dapat dielakkan, keributan terjadi pada segmen pertama ini karena para pendukung protes atas mati atau tidak jelasnya suara YPN-YESS.

Tim Paslon yang didukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem menuding Paslon Nomor Urut 2 Teddy Meilwansyah - Marjito Bachri (BERTAJI) mendapat perlakuan istimewa dari panitia. Salah satu poin protes terbesar adalah terkait jumlah pendukung yang dibawa ke dalam venue.

Tim Paslon 1 mengklaim Paslon 2 membawa lebih dari batas maksimal 30 orang pendukung, namun tidak ada tindakan dari panitia untuk menertibkan jumlah tersebut.

"Kami merasa dicurangi. Paslon 2 diistimewakan oleh panitia, ini sangat mer-

ugikan kami," tegas Yudi Purna Nugraha, calon bupati dari Paslon 1. Situasi memanas, dan setelah beberapa saat protes, Paslon 1 bersama tim pemenangan akhirnya memilih meninggalkan venue debat.



Benarkah Debat Publik Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Event Organizer netral? Ternyata tidak juga. Terbukti beberapa Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati merasakan ketidaknetralan saat pelaksanaan debat.

KPU OKU memilih menghentikan Debat Publik setelah memberi kesempatan Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan visi dan misi.

Debat Publik Pilkada Kabupaten Musi

Banyuasin (Muba) juga diwarnai WO oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 HM Toha Tohet-Rohman (Toha-Rohman), yang terjadi di sesi ketiga. Pada sesi pertanyaan itu, Cawabup Kiai Toha diminta pemandu acara mengambil pertanyaan untuk diajukan kepada Paslon Nomor Urut 1 Lucianty-Syaparuddin.

Begitu membuka pertanyaan, Kiai Rohman hanya melihatnya sekilas tapi tidak membacakan pertanyaan tersebut. Lalu ia mengejutkan seluruh hadirin dan pemirsa siaran langsung.

"Kami melihat sesuai rundown acara KPU di sini tertulis bahwa debat melalui pertanyaan dari paslon. Bukan dari amplop yang disiapkan oleh KPU, ini mengindikasikan KPU Muba tidak netral. Maka kami tidak bisa merespon karena tidak kesesuaian antara rundown dengan kesepakatan. Maka mohon maaf kami tidak bisa merespon," katanya.

Ia menambahkan, "Kami sudah mengadukan ke Bawaslu dan sudah memberi teguran ke KPU, jika ini terjadi ada indikasi kecurangan di KPU. Kami mohon izin tidak akan melanjutkan debat ini karena tidak ada kesesuaian antara rundown dan kesepakatan sebelumnya."

Tanpa berkata-kata lagi, Toha-Rohman meninggalkan panggung debat, langsung keluar dari pintu samping dan meninggalkan debat terbuka yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita, Sekayu. ♦



Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Damai dan Sukses **INILAH PEMENANG PEMILUKADA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afiduddin, mengonfirmasi bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Pemungutan Suara Pilkada 2024 dilaksanakan serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada Rabu (27/11/2024).

Di Provinsi Sumsel sendiri, rangkaian panjang proses dan tahapan Pilkada Serentak 2024 itu sudah finishing. Sudah diketahui Paslon Kepala Daerah Terpilih untuk Pilkada Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula dengan Paslon Bupati dan Wakil Bupati di 13 Kabupaten, dan Paslon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota di empat kota di Provinsi Sumsel.

Dari Quick Count serta data real count KPU RI yang bisa diakses melalui website <https://pilkada2024.kpu.go.id/>, nama-nama para kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 se-Provinsi Sumsel versi Infosumsel.ID.

1. Provinsi Sumsel : Herman Deru - Cik Ujang
2. Kota Palembang : Ratu Dewa - Prima

Salam

3. Kabupaten Ogan Ilir: Panca Wijaya Akbar - Ardani
4. Kabupaten OKI: Muchendi - Supriyanto
5. Kabupaten OKUT : Lanosin - Adi Nugraha Purna Yudha
6. Kabupaten OKU: Teddy Meilwansyah - Marjito Bachri
7. Kabupaten OKUS: Abusama - Misnadi
8. Kota Prabumulih : Arlan - Franky Nasril
9. Kabupaten PALI: Asgianto - Iwan Tuaji



10. Kabupaten Muara Enim : Edison - Su-marni
11. Kabupaten Lahat : Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih
12. Kabupaten Empat Lawang : Joncik Muhammad - Arifai
13. Kota Pagaralam: Ludi Oliansyah - Bertha
14. Kabupaten Muratara : Devi Suhartoni - Junius Wahyudi
15. Kabupaten MURA : Ratna Machmud dan H Suprayitno
16. Kota Lubuklinggau : Rachmat Hidayat (Yopi) - Rustam Effendi.
17. Kabupaten Muba : HM Toha Tohet - Rohman
18. Kabupaten Banyuasin : Askolani - Netta

Dari hasil di atas, yang kemungkinan besar akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah Pilkada OKU, OKU Selatan, dan Pilkada Pagar Alam. Karena di tiga daerah, selisih suara yang diperoleh masing-masing Paslon tipis yaitu masih dalam rentang untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). ♦



Masyarakat Kabupaten OKU Bingung **BERTAJI DAN YPN YESS SEMPAT SALING KLAIM KEMENANGAN**

Dua Paslon Bupati dan Waki Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu Yudi Purna Nugraha - Yenny Elita Sofyan Sani (YPN YESS) dan Teddy Meilwansyah - Marjito Bachri (BERTAJI) terlibat perseteruan pasca Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.



Tim BERTAJI melakukan rekapitulasi berdasarkan Form C1 dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh kecamatan di Kabupaten OKU. Hasilnya BERTAJI unggul di 9 kecamatan. Hasilnya dirilis Tim BERTAJI pada 27 November 2024 malam.

Dalam rilis terlihat Teddy-Marjito (BERTAJI) memperoleh 108.527 suara atau 49,5 persen. Sementara Paslon Yudi Purna Nugraha-Yenny Elita Sopian Sani (YPN YESS) di posisi kedua dengan perolehan 104.777 atau 47,8 persen suara.

Rekap data tersebut menyatakan Pa-

slon Teddy-Marjito menang di 9 kecamatan yakni Baturaja Timur 31.759 suara (28.112), Baturaja Barat 13.001 (8.695), Lengkiti 7.304 suara (7.003) dan Semidang Aji 9.091 (6.876) Juga menang di Kecamatan Pengadonan 4.000 suara (1.755), Muara Jaya 2.816 (1.421), Ulu Ogan 2.690 (2.295), Sinar Peninjauan 6.715 (6.638) dan Kedaton Peninjauan Raya 3.817 (3.579).

Di sisi lain, Pasangan YPN YESS unggul di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan meraih 4.092 suara (3.975), Lubuk Batang 14.097 (6.702), Peninjauan 9.653 (8.761), dan Lubuk Raja

10.561 (7.896).

Dengan perolahan suara itu, Teddy mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan berterima kasih dengan seluruh relawan, simpatisan serta partai pendukung yang telah berjuang bersama-sama memenangkannya. Ia juga meminta perolehan suaranya tersebut dikawal secara ketat.

Beredar Screenshot Rekapitulasi, KPU OKU Pilih Bungkam

Screenshot hasil rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) 2024 beredar luas

di grup WhatsApp dan media sosial, Jumat 29 November 2024. Tertera di situ, BERTAJI menang dengan selisih hanya 3 ribuan suara.

Di lain pihak, YPN YESS mengklaim kemenangan juga. Karena itu beredarnya rilis tersebut polemik dan saling klaim kian meruncing, karena disebutkan rekapitulasi suara tersebut berasal dari laman pilkada2024.kpu.go.id.

Dan itu menunjukkan seolah-olah rekap tersebut resmi berasal dari KPU. Lalu, screenshot rekapitulasi lainnya juga tersebar. Salah satunya berlogo KPU dan Pemkab OKU. Datanya pun bersumber dari laman pilkada2024.kpu.go.id.

Data dari laman tersebut menunjukkan pasangan YPN YESS memperoleh 47,04 persen suara, sementara pasangan Bertaji unggul dengan 49,8 persen. Foto itu menyebutkan bahwa hasil tersebut berdasarkan rekapitulasi cepat (C1 plano).

Ketika para awak media akan mengonfirmasi keabsahan rekapitulasi tersebut, Ketua KPU OKU Rahmat Hidayat, yang dikontak melalui pesan singkat WhatsApp. Tidak merespon.

Komisioner lainnya Ade Satria Dwi Putra, juga tidak merespon pertanyaan via WhatsApp. Dua komisioner lainnya, Jaka Irhamka dan Mario Restu Prayogi merespon dengan singkat.

"Silakan hubungi Ketua KPU OKU karena pernyataan resmi hanya boleh dike-

luarkan satu pintu. Terima kasih," ujar Jaka melalui pesan WA.

Sedangkan Mario Restu Prayogi, malah balik bertanya dari mana foto itu didapat. Dia menegaskan, bahwa pihaknya (KPU OKU) belum mengeluarkan hasil resmi apapun.

"Saat ini masih penghitungan manual berjenjang," tegas Mario.

Teddy-Marjito yaitu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah dan Marjito Bahri sukses meraih suara kemenangan di 9 dari 13 kecamatan di Kabupaten OKU.

Dengan demikian, Teddy-Marjito (BERTAJI) memperoleh 108.527 suara atau 49,5 persen. Sementara pesaingnya Paslon Yudi Purna Nugraha-Yenny Elita Soprian Sani (YPN YESS) di posisi kedua dengan perolehan 104.777 atau 47,8 persen suara.

Teddy-Marjito memastikan kemenangannya berdasarkan data real count yang dirilis Paslon Bertaji yang bersumber dari data rekap C1 pada Rabu 27 November 2024 malam.

Rekap data tersebut menyatakan Paslon Teddy-Marjito menang di 9 kecamatan yakni Baturaja Timur 31.759 suara (28.112), Baturaja Barat 13.001 (8.695), Lengkiti 7.304 suara (7.003) dan Semidang Aji 9.091 (6.876).

Juga menang di Kecamatan Pengadonan 4.000 suara (1.755), Muara Jaya 2.816

(1.421), Ulu Ogan 2.690 (2.295), Sinar Peninjauan 6.715 (6.638) dan Kedaton Peninjauan Raya 3.817 (3.579).

Di sisi lain, Pasangan YPN YESS unggul di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan meraih 4.092 suara (3.975), Lubuk Batang 14.097 (6.702), Peninjauan 9.653 (8.761), dan Lubuk Raja 10.561 (7.896).

Dengan perolahan suara itu, Teddy mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan berterima kasih dengan seluruh relawan, simpatisan serta partai pendukung yang telah berjuang bersama-sama menangkannya.

Selain itu, Teddy mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat OKU yang telah memilih dan memercayainya untuk memimpin Bumi Seimbang Sekundang lima tahun kedepan.

Tak lupa pada kesempatan itu, Teddy meminta seluruh simpatisan, relawan dan tim pemenangannya serta partai pendukung agar proaktif mengawal hasil perolahan suara itu hingga penghitungan di tingkat kabupaten.

"Saya juga meminta kepada aparat TNI Polri, Bawaslu dan KPU agar bekerja maksimal mengamankan proses penghitungan suara hingga ke tingkat kecamatan.

"Sehingga tidak ada oknum yang tak bertanggungjawab yang bisa merusak ataupun mengubah hasil perolahan suara tersebut," kata dia. ♦

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024



YUDI PURNA NUGRAHA, SH
YENNY ELITA, S.Pd., M.M



H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP., M.M., M.Pd
Ir. H MARJITO BACHRI, S.T

PILKADA SERENTAK 2024 DI SUMATERA SELATAN DIKEJUTKAN FAKTA, ELEKTABILITAS TINGGI TAK BERARTI MENANG

Seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah usai dengan puncaknya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu, 27 November 2024. Hari itu, masyarakat Sumsel menjadi bagian dari seluruh Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada 2024 serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah di Provinsi Sumsel ini membuat kejutan antara lain, Paslon Terpilih bukanlah yang memiliki elektabilitas tertinggi di daerah mereka. Bahkan masyarakat sempat menganggap mereka takkan memenangi Pilkada 2024, di antaranya:

1. Paslon H Arlan dan H Franky Nasril

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih Nomor Urut 1. Dalam berbagai survei elektabilitas, pasangan ini tidak pernah tinggi. Elektabilitas mereka kalah jauh dari Paslon Nomor Urut 2 Suryanti Ngesti Rah-

ayu-Mat Amin.

Terlebih lagi sosok H Arlan dianggap kontroversial dan mengundang polemik. Karena di masa kampanye, dalam satu unggahan video ia memperkenalkan 4 istrinya ke publik. Masyarakat Kota Prabumulih sebagian menyatakan tidak bisa menerima Cawako yang memiliki banyak istri.

Takdir berkata lain. Pada penghitungan suara terbukti Paslon Arlan Franky unggul dengan 52,94 persen atau 59.507 suara.

H Arlan maju sebagai calon walikota Prabumulih berpasangan dengan Franky Nasril di nomor urut 01. Dalam hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan

H Arlan-Frangky Nasril, paslon ini meraih 52,94 persen atau 59.507 suara. Paslon Andriansyah Fikri-Syamdakir Amrullah memperoleh 18.577 suara (16,65 persen). Paslon nomor urut 02 Suryanti Ngesti Rahayu-Mat Amin meraih 33.940 suara atau 30,42 persen.

2. Paslon Ludi Oliansyah-Bertha Edhar

real quont Desk Pemkot Pagar Alam, Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam nomor urut 03 Ludi Oliansyah-Hj.Bertha Edhar unggul dari dua paslon lain yaitu Hefi Safriani-Efsi (HEPI) paslon 01 dan paslon H.Alpian



Maskoni-Alfikriansyah (ALAF) paslon 02.

Ludi-Bertha (LUBER) sementara unggul diangka 36,54 persen dibandingkan kedua pesainya dengan perolehan suara 32.973 suara.

Sedangkan diurutan kedua diduduki paslon 01 Hepi-Efsi dengan persentase 32,09 persen dengan perolehan suara 28.956 suara.

Untuk paslon petahana Alpien-Alfikriansyah (ALAF) mendapatkan suara sebanyak 28.302 suara dengan persentase 31,37 persen.

Hasil ini didapat dari total suara sebanyak 90.231 suara.

3. Ratna Machmud-Suprayitno

Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor Urut 1 Ratna Machmud dan Suprayitno mengklaim



Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih Nomor Urut 1. Dalam berbagai survei elektabilitas, pasangan ini tidak pernah tinggi.

unggul dari hasil quick count timnya dengan perolehan 140.642 suara atau 65,4%.

Paslon nomor 2 Suwarti dan Thamrin Hasan yang memperoleh 74.462 suara atau 34,6%. Total suara yang sudah masuk sebanyak 221.959 suara atau 94% suara.

Padahal Hasil Survei yang dilakukan sebulan menjelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024, elektabilitas Ratna machmud-Suprayitno kalah dibandingkan Elektabilitas Suwarti-Thamrin Hasan.

4. Rahmat Hidayat -Rustam Effendi

Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Rahmat Hidayat (Yoppy Karim)-Rustam Effendi unggul. Sepanjang proses Pilkada 2024, elektabilitas Rahmat Hidayat-Rustam Effendi kalah dari Elektabilitas Paslon Nomor Urut 1 Rodi Wijaya-Imam Senen (ROIS).

Dari hasil hitungan yang dibuat LSPI, Paslon Rahmat Hidayat-Rustam Effendi, meraih 69,68% suara. Sedangkan Pasangan Rodi Wijaya dan Imam Senen memperoleh 30,32% suara. ♦



SENI MERAYU TUHAN MENYADARKAN KITA BAHWA ALLAH BEGITU DEKAT

Membaca Buku Seni Merayu Tuhan membuat kita merasa mendengarkan Habib Husein Ja'far tengah berbicara. Lembut, tapi penuh energi, mendakwahkan kebenaran dengan kata-kata kalimat bernas dan sangat efektif.

Habib Husein bercerita, ibadah yang kita lakukan bukanlah tiket barter untuk kenikmatan surga, melainkan sebuah seni untuk merayu empunya surga, sehingga Allah akan menghujani kita dengan rahmat dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya.

Jarak terdekat kita dengan Tuhan adalah ketika kita merayu-Nya, karena menurut Nabi Muhammad SAW, Tuhan adalah kekasih tertinggi yang Maha Indah dan Menyukai Keindahan.

Para sufi berkata; satu sujud saja —yang benar-benar dalam penghambaan yang tinggi— akan mengemukakan rahmat-Nya. Sehingga Dia akan memberikan segalanya, termasuk surga-Nya.

Intinya, orang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi ibadah itu adalah sebuah rayuan pada Tuhan untuk mendapatkan rahmat-Nya. Layaknya rayuan pada um-

IDENTITAS BUKU:

JUDUL BUKU:

SENI MERAYU TUHAN

PENULIS:

HUSEIN JA'FAR AL-HADAR

PENERBIT:

PT MIZAN PUSTAKA

TAHUN TERBIT:

2022

TEBAL:

224 HALAMAN

umnya, kita perlu seni dalam melakukannya. Entah itu mencari tahu apa yang Tuhan sukai, berbicara dengan bahasa yang lembut, dan lain-lain.

Begitu pula dengan rayuan kepada Tuhan, kita perlu mempelajari bagaimana seni untuk merayu Tuhan, apa yang disukai-Nya, cara berkomunikasi yang baik, cara menarik perhatian-Nya, dan sebagainya.

Ditekankan Habib Husein, ibadah hanyalah sebuah rayuan, bukan penentu

itu kita masuk surga sebagaimana termaktub dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah. "Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Kecuali dengan rahmat dari Allah."

Habib Husein juga bercerita dari Hadits Qudsi tentang seorang ahli ibadah yang akan masuk surga. Allah berfirman, "Wahai hamba-Ku, masuklah engkau ke surga karena rahmat-Ku." Orang ini menjawab, "Ya Rabbi, mengapa aku tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalku?" Setelah itu, Allah memperlihatkan nikmat yang dia dapat di dunia, yang ternyata sudah melebihi ibadahnya selama 500 tahun.

Buku ini membahas juga Beragama dengan Cinta; Beragama dengan Keberagaman; Beragama dengan Akhlak; dan Beragama dengan Tulus. ♦



ANDA INGIN BERLANGGANAN

3 EDISI (3 BULAN) RP 200.000

6 EDISI (6 BULAN) RP 400.000

12 EDISI (12 BULAN) RP 800.000



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

PT. INTER MEDIA DIGITAL

**Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750**

TELP 021-791 96781

FAX 021-791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice tv

Aisyah al-Marwaziyah

PEREMPUAN WALI YANG DERMAWAN

Aisyah binti Ahmad ath-Thawwil al-Marwaziyyah atau yang lebih dikenal dengan nama Aisyah al-Marwaziyah adalah istri dari Abdul Wahid as-Sayari (w. 375 H), seorang sufi dan muhaddits.

Dalam catatan Imam Abu Abdurrahman as-Sulami, Aisyah merupakan perempuan yang memiliki keutamaan dan sangat rajin dalam beribadah. Ia memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, bahkan sulit untuk dicari sosok yang sebanding dengannya.

As-Sulami mengatakan: "Tidak ada di masanya orang yang memiliki keadaan spiritual lebih bagus darinya, dan tidak ada yang lebih lembut jalannya dalam tasawuf."

Aisyah al-Marwaziyah juga sangat terkenal kedermawanannya. Ia senang menghabiskan beribu-ribu dirham untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk para sufi yang sedang melakukan perjalanan. Kedermawanannya ini tercatat dalam kitab Thabaqatush Shufiyyah karya Imam Abu Abdurrahman as-Sulami. "Aisyah al-Marwaziyah menafkahkan lebih dari lima ribu dirham untuk orang-orang yang membutuhkan."

Kedermawanan Aisyah al-Marwaziyah berbanding lurus dengan gaya hidupnya sehari-hari. Ia mengutamakan kesederhanaan dalam hal apapun. Memakai pakaian yang tidak berlebihan. Memakan makanan yang sama dengan orang miskin, bahkan ia merasakan kemiskinan secara hakiki. Dengan merasakannya, empati, kedermawanan dan kasih sayang tumbuh.

Ia mengatakan: "Siapa pun yang tidak merasakan nikmatnya kefakiran, maka keutamaan-keutamaan kefakiran tidak akan terungkap baginya."

Dalam Islam, setiap hal memiliki keutamaannya masing-masing, dan setiap keadaan menuntut respons yang sesuai. Kemiskinan membuka peluang bagi seseorang untuk melatih kesabaran, sementara kekayaan mendorong rasa syukur.

Terlebih jika yang membahas tentang al-faqr (kemiskinan) adalah seorang sufi, maka istilah tersebut harus dipahami dari perspektif tasawuf, yang menekankan aspek spiritual dan makna mendalam di balik keadaan tersebut.

Selain itu, dalam tasawuf, konsep faqir merujuk pada kondisi spiritual, bukan

sekadar kemiskinan materi. Pemahaman ini bersifat khusus dalam konteks tasawuf, di mana faqir dipandang sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyangkalan ego dan duniawi.

Namun, tidak semua Muslim diwajibkan untuk menjalani kondisi tersebut. Di masa kini, praktik tasawuf tidak harus diidentikkan dengan kemiskinan. Seorang Muslim yang kaya, tetapi hidup dengan kezuhudan (sikap tidak terikat pada harta) juga sangat utama dalam Islam, karena yang ditekankan adalah kedekatan hati kepada Allah, bukan kondisi materi.



Dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani mengutip perkataan Abu Isma'il al-Anshari tentang makna al-faqr dalam tradisi sufi.

Katanya: "Melepaskan tangan dari dunia dalam hal menahannnya, mencarinya, memujinya dan mencelanya." Para sufi berkata: "Sesungguhnya maksud dari perkataan itu adalah, tidak menempatkan dunia di dalam hati, baik dunia itu di tangan ataupun tidak."

Dengan kata lain, kekayaan dan kemiskinan itu sama, yang membedakan adalah keadaan hati. Hati yang tidak terikat kepada dunia, baik dunia itu di tangan (kaya), ataupun tidak (miskin). Karena itu, Aisyah al-Marwaziyah tidak merasa berat sedikit pun menghabiskan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika pun semua hartanya habis, hatinya tidak merasa susah. Jika pun hartanya melimpah, hatinya tidak merasa diperbudak. Itulah yang dimaksud dengan al-faqr dalam tradisi sufi.

Namun demikian, di waktu-waktu tertentu ia menemukan penolakan yang kasar. Niat baiknya dalam berbagi ditolak dengan bahasa yang tidak pantas, hanya karena ia seorang wanita.

Imam Abu Abdurrahman as-Sulami mencatat peristiwa ini dalam Thabaqat ash-Shufiyyah. "Dikatakan padanya bahwa fulan tidak mau menerima bantuanmu dan berkata bahwa menerima bantuan dari wanita adalah kehinaan. Kemudian Aisyah al-Marwaziyah berkata: "Jika seorang hamba mencari kehormatan dalam ibadahnya, maka sungguh ia telah menampakkan kebodohnya."

Menurut pandangan Aisyah al-Marwaziyah, setiap orang memiliki hak yang sama dalam beramal, tanpa memandang gender. Ia membantu orang lain bukan demi pujian, melainkan semata-mata untuk menggapai ridha Allah SWT.

Ketika dihadapkan pada penolakan yang mendiskreditkan perempuan, ia merespons dengan tegas, menunjuk-

kan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh niat dan amal perbuatannya.

Baginya, orang yang masih menilai keburukan dan kehinaan dari sebuah gender, baik laki-laki atau perempuan, ia adalah orang yang mencari kehormatan dalam ibadahnya, bukan tulus murni mengabdikan. Karena ia belum memahami bahwa esensi dari pengabdian adalah kasih sayang, bukan memandang rendah terhadap sesuatu yang bersifat kodrati.

Maka dari itu, Aisyah al-Marwaziyah tanpa basa-basi menganggap orang tersebut sedang menampakkan kebodohnya. Perempuan mulia ini meninggalkan warisan spiritual yang dalam. Namanya tercatat dalam ensiklopedi biografi wali-wali besar.

Sayangnya, hari kewafatannya tidak diketahui pasti. Yang jelas Aisyah al-Marwaziyah hidup di abad ke-4 Hijriyah, sama seperti suaminya Abdul Wahid bin Ali as-Sayyari yang wafat pada tahun 375 H. ♦



PILIH ITSBAT NIKAH ATAU MENGULANG AKAD NIKAH?



M. ISHOM EL SAHA
Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah
UIN SMH Banten

Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pasangan artis Rizky Febian dan Mahalini di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah menjadi sorotan publik. Tak sedikit masyarakat berspekulasi ada masalah apa dalam perkawinan putra sulung artis "Sule" Entis Sutisna?

Baru seumur jagung masa perkawinan mereka tetapi sudah berperkara di pengadilan. Ada pula masyarakat yang sudah membaca kronologi berita itu, kemudian bertanya-tanya kenapa memilih itsbat nikah dan bukan mengulang akad nikah?

Secara kronologis, Rizky Febian dan Mahalini telah melangsungkan akad nikah pada 10 Mei 2024. Hanya saja pernikahan artis itu tidak dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku."

Di Indonesia hanya ada dua lembaga

pencatatan nikah, yaitu penghulu KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan pasangan Muslim, dan pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota bagi pasangan non-Muslim. Sementara dalam peristiwa perkawinan Rizky Febian dan Mahalini sama sekali tidak melibatkan lembaga pencatatan nikah yang diakui negara.

Rizky Febian menikahi Mahalini dalam status muallaf atau baru masuk Islam. Secara hukum agama maupun hukum negara diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan artis itu dilakukan secara Islam maka ada empat rukun yang harus dipenuhi,



yakni mempelai laki-laki dan Perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul.

Masalah pokok perkawinan muallaf sering muncul terkait keberadaan wali nikah. Wali nikah menjadi keharusan sebagaimana hadits Rasulullah SAW: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Dalam Islam ditentukan wali nikah adalah ayah, saudara laki, kakek, dan kerabat laki-laki lain yang terdekat dengan mempelai wanita dari jalur ke bawah dan ke samping.

Mereka disebut juga sebagai Wali Nasab. Mereka yang menjadi wali nikah harus beragama Islam. Apabila tidak ada Wali Nasab yang Muslim maka keberadaan wali diambil alih oleh Wali Hakim. Disebut wali hakim karena orang itu yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya.

Siapa yang disebut wali hakim? Dasar hukum wali hakim bersumber hadits Rasulullah SAW: "Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah

SAW bersabda: Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menyukainya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."

Hadits ini kemudian dijadikan landasan ulama fiqh, seperti Syekh Zainuddin al-Malibari al-Fanani, di dalam karyanya Fathul-Muin, halaman 1.383. Dia berkata: "Setelah semua urutan wali tidak ada maka jabatan wali jatuh kepada sultan atau wakilnya. Yang dimaksud sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti imam, qadhi dan wakil-wakilnya."

Berdasarkan tinjauan ini konsep wali hakim di Indonesia telah ditransformasikan ke dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (PMA No. 30/2005). Wali hakim adalah Kepala

KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Jika pejabat itu berhalangan atau tidak ada maka digantikan Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kemenag Kabupaten/Kota.

Di kalangan masyarakat Indonesia transformasi wali hakim sesuai PMA No. 30/2005 itu tidak dipahami dengan baik. Dalam perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (nikah sirri) sering terjadi tokoh agama diperankan menjadi wali hakim. Hal serupa terjadi dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini.

Oleh sebab itu, jalan keluar dari masalah nikah sirri dengan wali hakim dari unsur tokoh agama non-pemerintah adalah melakukan akad nikah ulang, bukan itsbat nikah! Hal ini sesuai dengan mengacu UU Perkawinan dan PMA No. 30/2005. Pernikahan yang sudah terjadi dianggap batal secara hukum agama dan hukum negara. Wallahu a'lam. ♦Kemenag



HIRAU PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH

Penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 menjadi sorotan banyak kalangan. Komisi II DPR RI pun angkat bicara.

Cuaca cerah, namun banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024 tampak lebih sepi. Lebih sepi dibandingkan dengan saat pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada Rabu, 14 Februari 2024.

Idealnya TPS Pilkada 2024 memang lebih ramai. Terlebih, jumlah TPS pada Pilkada serentak 2024 berkurang dibandingkan dengan saat Pilpres dan Pileg. Pada Pilkada serentak, satu TPS dirancang untuk menampung kedatangan 500-600 pemilih,

dibandingkan 200-300 pemilih pada Pilpres dan Pileg.

Belakangan memang terdeteksi partisipasi pemilih pada Pilkada lebih rendah dibandingkan dengan saat Pilpres dan Pileg. Pada Pilpres angka partisipasi mencapai sekitar 80 persen secara nasional. Sedangkan pada Pilkada, angka partisipasi pemilih secara nasional tak sampai 70 persen.

Nah, Komisi II DPR RI yang lingkup tugasnya mencakup pemerintahan dalam negeri, pertahanan, dan pemberdayaan aparatur, mencermati pula kecenderungan penurunan partisipasi warga dalam Pilkada serentak 2024. Ketua Rifqinizamy Karsayuda, menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput). Tak terkecuali keengganan warga datang ke TPS untuk mencoblos calon kepala daerah bupati, wali kota, maupun gubernur.

"Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali

terhadap partisipasi masyarakat," ujar Rifqinizamy dalam keterangan resmi, Sabtu, 30 November 2024.

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar penyelenggaraan pemilu tak menimbulkan anomali. Termasuk yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak berlangsung tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif. "Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam untuk melihat sejauh mana berpengaruh terhadap dukungan publik dalam kontestasi pilkada," ungkap Rifqi sapaan akrabnya.

Komisi II DPR yang menjadi mitra kerja penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menjadwalkan untuk menggelar rapat untuk membahas hasil dan evaluasi gelaran Pilkada Serentak 2024. Sedangkan KPU juga telah mencatat sejumlah gejala penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada gelaran



Pilkada Serentak 2024.

Salah satunya, Jakarta yang nyaris hanya sebagian pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Tercatat, daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta adalah 8.214.007 jiwa, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 4,3 juta. "Angka golput di Jakarta mencapai 46,95 persen, sekaligus mencatatkan rekor sebagai golput tertinggi sepanjang sejarah pilkada di Jakarta," kata Rifqi.

Sedangkan Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh atas Pilkada serentak 2024 karena tingkat partisipasi pemilih dianggap lebih rendah daripada Pemilu 2024. "Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan," kata August dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

Dia menegaskan saat ini KPU masih fokus memantau rekapitulasi penghitungan suara pilkada oleh KPU Daerah. "Saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi, fokusnya masih di sana," ujarnya.

Ia mengaku KPU sekilas melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. Menurut dia, angka seperti itu masih dikategorikan normal.

"Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," jelas August.

Lebih lanjut, dia memastikan KPU siap melakukan evaluasi terkait partisipasi pemilih yang dianggap menurun pada Pilkada serentak 2024. "Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS," ujarnya.

Sedangkan dalam pandangan pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini, penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 terkait dengan beberapa faktor. Pertama, kata Titi, faktor kelelahan dan

jenuh karena menjalani pemilu nasional dan pilkada pada tahun yang sama. Kelelahan dan kejenuhan ini, sambungnya, terjadi bukan hanya pada pemilih, namun juga terjadi pada penyelenggara pemilu serta partai politik.

Kedua, terkait pencalonan kepala daerah yang sentralistik di tangan pengurus pusat partai politik. "Akhirnya banyak calon yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah dan lebih mencerminkan selera elite politik

mencermati penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Sedangkan dari kalangan eksekutif pemerintahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan Presiden Prabowo Subianto setuju apabila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas.

Namun, alasan evaluasi Gus Muhaimin itu terkait praktik politik uang. Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat ini pemerin-



nasional. Ini yang membuat mesin partai tidak bekerja di sejumlah daerah dalam melakukan kampanye pemenangan untuk calon yang diusung partainya," kata Titi, Jumat.

Ketiga, penegakan hukum terkait pelanggaran pidana pilkada yang tidak optimal. "Politik uang semakin masif disertai modus yang semakin beragam. Sementara penanganannya masih biasa dan standar saja. Sangat jomplang antara realitas dan efektivitas penegakan hukum," ungkap Titi.

Kalangan legislatif dan akademisi sudah

tah sedang menyoroti pelaksanaan pilkada yang dihantui dengan praktik politik uang serta biaya penyelenggaraan yang tinggi.

Presiden Prabowo, kata Pak Menko, menilai perlu adanya evaluasi mendalam untuk menuntaskan masalah tersebut. "Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang," kata Muhaimin kepada awak media di Jakarta, Sabtu malam, 30 November 2024.

Nah, apakah penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 terkait dengan berkurangnya gejala politik uang. Ya, perlu pencermatan lebih jauh lagi. ♦



Syakur Amin-Putri Karlina

BERHARAP GARUT MAJU DAN BERLANJUT

Jawa Barat bagian selatan, termasuk Kabupaten Garut, sudah lama ketinggalan. Berharap Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina membawa Garut lebih maju dan berlanjut.

Dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati bersaing dalam Pilkada Garut 2024. Paslon Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat (Someah) nomor urut 1 berstatus petahana. Pesaingnya, paslon Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri) nomor urut dua.

Nah, hasil hitung cepat quick count lembaga jajak pendapat Indikator Politik Indonesia serta hitungan cepat internal pemenganan 02, Paslon Santri mendapatkan 65,93 persen, berbanding terbalik dengan paslon nomor urut satu Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat (paslon Someah) di angka 34,07 persen.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat, PDIP, Nasdem dan PAN juga partai non parlemen, termasuk hampir 100 relawan yang telah mendukung dan membantu kemenangan kami," ujar Calon Bupati Terpilih Abdusy Syakur Amin, dalam sambutan pertama di depan ratusan relawan yang hadir di Aula Al mudaddiyah, Garut, Rabu, 27 November 2024 malam.

Toh hasil resmi pemilihan Bupati Garut memang masih harus menunggu rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. Namun, Garut sudah boleh berharap kepada pasangan Santri untuk membawa segenap warganya lebih maju. "Cita cita kita menjadikan Garut hebat semoga terealisasi dari sekarang hingga masa yang akan datang," kata Syakur mengingatkan.

Akan halnya Putri Karlina, yang juga putri Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto, harapan membawa Garut lebih hebat tak kurang-kurang juga. Terlebih ibundanya kelahiran Garut.

Banyak pihak underestimate, terhadap Putri yang pada 2024 ini baru menapak usia 31 tahun ini. Namun, faktanya, Putri

Karlina menjadi magnet dukungan bagi partai politik. Terbukti, 12 parpol yang mendukungnya berpasangan dengan Syakur di Pilkada Garut.

Bukan hal yang mudah bagi Putri Karlina, untuk mampu bersaing di Pilkada. Selain harus banyak belajar, Putri juga harus berkuat mengatrol elektabilitasnya yang tertinggal jauh ketimbang para bacabup Garut lainnya saat itu.

Terkait hal tersebut, Putri sendiri pernah menyatakan, jika sentuhan para pemuda yang berada di belakangnya, setidaknya mampu menjadikan elektabilitas Putri terus melesat. "Kalau boleh jujur, keberhasilan kita itu banyak dibantu oleh orang kreatif. Tim saya. Kalau tidak ada desainer visual, videographer, mungkin saya tidak akan signifikan ini," ungkap Teh Putri.

Sentuhan tangan-tangan kreatif para pemuda yang tergabung ke dalam timnya, dianggap Putri mampu mengatrol popularitasnya, khususnya di media sosial. Langkah itu, kemudian didongkrak oleh para petugas partai hingga relawan di lapangan.

"Saya ini adalah amatiran politik. Tapi, bisa menyaingi orang politik yang sudah



investasi 15 tahun, hanya dalam waktu tujuh bulan. Dengan dongkrakan orang kreatif, booster ini bisa menghasilkan dampak yang signifikan,” katanya.

Putri menjelaskan, pola kampanye paslon Santri lebih menekankan manfaat bagi masyarakat. Di media sosial, Putri juga menampilkan beragam konten menarik racikan timnya untuk menarik minat masyarakat.

Suka tidak suka, metode tersebut terbukti ampuh. Juga dianggap menjadi salah satu faktor melejitnya elektabilitas Syakur-Putri di Pilkada ini. Lembaga survei Indikator mencatat, elektabilitas Paslon Syakur-Putri naik lebih dari 40 persen.

Pada survei pertama yang dilakukan Indikator periode 2-8 Agustus, elektabilitas Syakur-Putri berada di angka 13,5 persen. Jumlah tersebut meroket naik saat Indikator melaksanakan survei ketiganya pada periode 11-20 November. Elektabilitas Syakur-Putri menjelang pemungutan suara melejit ke angka 54,6 persen.

Pasca pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024 lalu, Syakur-Putri sendiri pun diyakini keluar sebagai pemenang Pilkada Garut 2024. Setelah hasil hitung cepat yang dikeluarkan sejumlah pihak, positif untuk mereka.

Di sisi lain, usai pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah menuntaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) di 42 kecamatan. “Sudah kemarin serentak di

42 kecamatan, nanti kita agendakan pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kabupaten,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Garut, Rikeu Rahayu

la menjelaskan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 berlangsung lancar, tidak ada kendala yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di TPS. Setelah dilakukan penghitungan di tingkat TPS, kata dia, secara bertahap dilakukan penghitungan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang tersebar di 42 kecamatan, kemudian dilakukan penarikan logistik ke KPU Garut.

“Kendala tidak ada. Penarikan logistik dari tiap kecamatan juga lancar,” Teh Rikeu.

la mengemukakan, setelah logistik ter-

masuk surat suara hasil pencoblosan diterima oleh KPU Garut, selanjutnya persiapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada tingkat Kabupaten Garut yang diagendakan pada 3 dan 4 Desember 2024.

Meski rapat pleno akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kata dia, terkait pengumuman pasangan calon terpilih pada pilkada belum dapat diumumkan pada waktu pleno melainkan nanti 15 Desember 2024. “Kalau penetapan pengumumannya 15 Desember 2024 atuh,” katanya.

Menarik untuk ditunggu, bagaimana hasil Pilkada Garut sebenarnya, versi KPU setempat. Menarik juga untuk ditunggu juga, kiprah Syakur Amin-Putri Karlina sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2024-2029. ♦



KISRUH HAJI KAPAN BERHENTI

Penyelenggaraan ibadah haji memang perlu perbaikan. Kesempatan terakhir Kementerian Agama menyelenggarakannya di musim haji 1446 hijriyah pada 2025. Selanjutnya giliran Badan Penyelenggara Haji.



Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terpilih akan menjalankan fungsi lembaga antirasuah itu lima tahun ke depan. Apakah mereka juga akan berurusan dengan urusan penyelenggaraan ibadah haji? Belum pasti juga.

Yang sudah pasti, Menteri Agama Nasaruddin Umar berupaya menggandeng KPK untuk mendampingi dan mengawasi berbagai program Kementerian Agama. Salah satunya tentulah soal penyelenggaraan haji yang melibatkan dana publik dan ranan penyelewengan.

"Poin konkretnya, kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan," kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 19 No-

beras dari korupsi. Dalam kesempatan itu Menag juga mengatakan akan mengaktifkan kembali nota kesepahaman (MoU) dengan KPK soal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Insyaallah MoU yang pernah kitaandatangani bersama bisa kita aktifkan kembali, sehingga harapan masyarakat terhadap Kementerian Agama, menghendaki pembersihan, kemudian efektivitas dan efisien bisa terwujudkan," kata Menag di hadapan awak media.

Dalam kesempatan sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas dengan Kemenag, salah satunya adalah soal pengelolaan haji. Ghufron mengatakan meski saat ini penyelenggaraan haji sudah ditangani oleh Badan Pengelola Haji, masih ada beberapa hal soal haji yang dipegang oleh Keme-

Nah, yang tidak pasti adalah tindak lanjut pertemuan Prof KH Nasarudin Umar dengan KPK karena pimpinan lembaga itu periode 2019-2024 segera berganti, dan Ghufron tak lagi duduk di kursi pimpinan. Hasil pemungutan suara 48 anggota Komisi III DPR pada Kamis, 21 November 2024 memilih Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan empat pimpinan lainnya yaitu Fitroh Rochyanto (Wakil Ketua), Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono untuk periode 2024-2029.

Tentang Ketua baru KPK, Setyo Budiyanto yang berlatar polisi, sebenarnya bukan pula orang asing di KPK. selain memiliki rekam jejak di bidang penyidikan keuangan dan pemberantasan korupsi. Ia tercatat pernah menjadi Koordinator Supervisi Kedeputan Penindakan KPK. Setyo kemudian menjabat Direktur Penyidikan



vember 2024.

Menag Nasaruddin mengemukakan, Kemenag mengelola dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan program-programnya, oleh karena itu dia meminta KPK untuk ikut mengawasi pengelolaan dana tersebut baik di tingkat pusat hingga daerah. "Maka itu kami mohon masalah pencegahan kita kerja sama dengan bagus, termasuk pendidikan kemudian koordinasi, monitoring dan seperti pendampingan di daerah," ujar Menag yang sebelumnya menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu.

Lebih lanjut Nasaruddin juga mengapresiasi komisi antirasuah yang telah menerima audiensi jajaran Kementerian Agama untuk diskusi soal pencegahan korupsi dan membangun instansi yang

nag selama masa transisi.

Dalam pertemuan itu Kementerian Agama dan KPK juga membahas soal penguatan rohani para pegawai KPK agar semakin berintegritas dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai hal yang dibahas tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis oleh perwakilan dari masing-masing bidang.

"Ini adalah pertemuan pertama yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan teknis di bidang masing-masing yang telah diagendakan. Saya kira begitu, terima kasih jajaran Kementerian Agama atas komitmennya dan juga ke depan mudah-mudahan bersinergi untuk memberantas korupsi di sektor masing-masing," kata Ghufron.

KPK pada 2020.

Lagi pula, sepanjang lima tahun terakhir, 2019-2024, KPK memang sudah terekam mencatat kerawanan korupsi di Kementerian Agama terutama mengenai penyelenggaraan haji. Antara lain hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tentang pengelolaan keuangan haji 2019. Dari kajian itu terekam beberapa titik rawan korupsi pada penyelenggaraan haji di Indonesia. Salah satu contohnya, markup biaya akomodasi, penginapan, biaya konsumsi, dan biaya pengawasan haji.

Tindak lanjut kajian itu sempat mandek lantaran wabah COVID-19 merajalela dan tak ada penyelenggaraan haji pada 2020 meskipun mulai pulih dan berangsur-angsur normal kembali setelah pandemi mereda. Nah, pada 2023 KPK mulai menin-

dakanjuti hasil kajian pada 2019 tadi.

"Faktanya menunjukkan ada perbedaan harga mulai dari biaya inap, itu cukup tinggi, termasuk biaya makan dan biaya pengawasan haji. (Berpotensi) timbul kerugian negara Rp160 miliar waktu itu," kata Ketua KPK kala itu Firli Bahuri dalam audiensi bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023.

Selain itu, KPK juga menemukan permasalahan yakni penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menggerus dana pokok setoran Jamaah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, BPIH per satu orang Jamaah ialah Rp39 juta dari biaya riil seharusnya Rp98 juta per satu orang.

Dalam kajian KPK, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji diperoleh dari setoran Jamaah dan nilai manfaat yang diperoleh dari dana kelolaan haji per tahun. Dalam pelaksanaannya, dana terse-

Oleh karena itu, Firli mengingatkan BPKH untuk melakukan perbaikan sistem pembiayaan haji. Diperlukan efisiensi dengan memangkas hal-hal yang tidak diperlukan agar pembiayaan tidak membengkak. Pos-pos yang dihilangkan tersebut dapat diganti atau memanfaatkan sumber daya yang selama ini tersedia. "Kalau ada masalah di kemudian hari, peluang, atau rentan korupsi harus diperbaiki sistemnya," ujar Firli.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, dari kajian KPK, diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Agama. Perlu ada penyelarasan substansi antara UU No. 34 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 2019.

Disharmoni ini dapat dilihat dari perbedaan definisi BPIH, mekanisme penetapan BPIH, serta pelaporan pertanggungjawaban PIH antara kedua UU tersebut.



but dibedakan menjadi dua yaitu direct cost (biaya langsung) dan indirect cost (biaya tidak langsung).

Seiring berjalannya waktu, indirect cost dipergunakan untuk mensubsidi direct cost dengan membiayai selisih biaya penerbangan, akomodasi selama di Makkah dan Madinah. Dengan kebijakan pemerintah—sejauh ini—yang tidak menaikkan BPIH, dapat dilihat indirect cost (subsidi) terhadap direct cost semakin meningkat setiap tahunnya (lebih dari 50 persen).

Kondisi ini, menurut Firli harus segera dicarikan solusi agar tidak menjadi bom waktu. Alasannya, indirect cost, yang berasal dari dana manfaat, akan cepat habis sehingga berpotensi merugikan Jamaah yang masih dalam masa tunggu. Jika kondisi ini terus berlangsung, diperkirakan dana manfaat tersebut akan habis pada tahun 2026-2027.

Jika ditelaah, UU No. 8 Tahun 2019 dinilai mengabaikan fungsi dari BPKH dalam pengendalian dan pengawasan keuangan haji.

Di sisi lain, terdapat masalah seperti kinerja penempatan dan investasi yang belum terlalu optimal sehingga perolehan nilai manfaat belum optimal. Selain itu, pemilihan BPS-BPIH pengelola nilai manfaat berpotensi rawan korupsi karena tidak semuanya melalui proses lelang tetapi berdasarkan permohonan dari BPS-BPIH. Juga masih lemahnya pengawasan dalam penyaluran dana kemaslahatan karena dilaksanakan tanpa tahapan sehingga rawan penyimpangan dan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.

Oleh sebab itu, KPK merekomendasikan BPKH untuk menginventarisir masalah dengan segera memperbaiki tata kelola dan menutup celah-celah permasalahan

tadi. Misalnya, menyusun SOP penyaluran dana kemaslahatan secara bertahap untuk yang bernilai signifikan serta memperbaiki kinerja investasi dan penempatan dalam rangka peningkatan nilai manfaat.

"Dari seluruh pihak pengelola dana publik (terpenting) adalah masalah etik dan conflict of interest. Kredibilitas ini dilihat publik bagaimana (BPKH) menjalankan baik yang kelihatan maupun yang secara terukur telah dijelaskan," kata Pahala.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengucapkan terima kasih kepada KPK karena melalui kajian ini pihaknya dapat mengetahui pos-pos yang harus diperbaiki. Meskipun begitu, BPKH berkomitmen untuk menjadi lembaga antikorupsi dengan menggunakan whistleblowing system (WBS).

Terkait permasalahan disparitas harga, Fadlul menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi bersama Kemenag dan Komisi VIII DPR RI. Termasuk saat ini, BPKH telah berkoordinasi intensif dengan Kemenag terkait penyelarasan UU untuk menemukan formula terbaik demi pengelolaan dana haji yang optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Saudi, menurut Fadlul, pada tahun 2030 memiliki visi meningkatkan kuota jumlah Jamaah haji dunia. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan warga muslim terbesar diharapkan oleh Kerajaan Saudi untuk mengambil kuota lebih banyak lagi. Jika terealisasi maka hal ini dapat memangkas masa tunggu Jamaah.

"Pemerintah Saudi ingin meningkatkan kuota Jamaah dari dua juta menjadi lima juta. Tentunya ini menjadi tantangan kita untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan tidak akan meningkat jika dananya tidak cukup," kata Fadlul.

Terkait disparitas tarif, ke depan BPKH dan Kemenag sedang membuat sebuah PT di Saudi untuk berinvestasi seluruh kebutuhan Jamaah haji asal Indonesia. Nantinya PT ini akan masuk ke ruang-ruang seperti pengelolaan penginapan atau logistik makanan yang dibolehkan oleh Saudi sehingga dapat menekan cost haji Jamaah.

Selanjutnya pertemuan KPK dengan BPKH berlanjut pada akhir Januari 2023. Kali ini Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas juga tampak hadir.

"Setelah memitigasi risiko dan melakukan kajian terhadap tata kelola penyelenggaraan haji. Pertemuan ini kita bersama-sama Kementerian Agama dan BPKH mengimplementasikan progres atau hasil dari rencana aksi BPIH ini," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufuron mengenai perte-

muan yang berlangsung pada Jumat, 27 Januari 2023 itu.

Selanjutnya, Ghuftron meminta Kemenag dan BPKH harus tetap menindaklanjuti rekomendasi yang belum terlaksana. Di antaranya terkait Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. KPK meminta Kemenag untuk mengharmonisasi kedua undang-undang tersebut.

Menurut Ghuftron, KPK juga telah menyelesaikan pendampingan implementasi atas rencana aksi perbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan BPKH pada kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Oleh karenanya, KPK merasa perlu hadir untuk membantu dari sisi kebijakan dan regulasi atas mata anggaran ibadah haji yang masih bisa diefisienkan oleh Kemenag melalui BPKH. Rekomendasi yang telah KPK berikan menjadi pertimbangan dalam memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," jelas Ghuftron.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, dari kajian KPK diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kementerian Agama. KPK akan terus melakukan pendampingan implementasi atas seluruh rencana aksi pada Kemenag dan BPKH. Selain itu, terdapat masalah kinerja penempatan dan investasi yang belum terlalu optimal, sehingga perolehan nilai manfaat pun demikian. Begitu pula, pemilihan Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) pengelola nilai manfaat berpotensi rawan korupsi karena tidak semuanya melalui proses lelang tetapi berdasarkan permohonan dari BPS-BPIH.

Sedangkan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas juga mengungkapkan, proses kenaikan biaya ibadah haji merupakan suatu bentuk empati dan simpati kepada calon jamaah haji untuk memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada komposisi BPIH, Yaquut menjelaskan BPIH terdiri dari dua komponen biaya, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat. "BPIH ini dibayarkan oleh jamaah haji, sedangkan Nilai Manfaat dibayarkan oleh pemerintah melalui BPKH," kata Yaquut.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan, terdapat pertumbuhan aset sekitar Rp20 triliun akibat tiadanya keberangkatan haji pada 2020 dan 2021 saat pandemi Covid-19 merebak. Kemudian, pada 2022,

Fadlul mengatakan alokasi dana yang dijadikan nilai manfaat atau subsidi yakni sebesar Rp6 triliun dengan kuota haji hanya 50 persen saat itu.

"Artinya, jika pada 2023, kuotanya menjadi kuota penuh sebesar 100 persen atau sekitar 200 ribuan calon jamaah haji, maka total nilai manfaat yang harus disediakan sekitar Rp12 triliun," rinci Fadlul.

Dengan demikian, pada 2024 akan ada sekitar Rp9 triliun yang harus diambil dari dana pokok pengelolaan dengan asumsi

Dalam laporan resminya, pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi. Laporan Pansus berusaha memberikan gambaran secara kompre-



biaya manfaatnya masih sebesar Rp12 triliun tanpa ada kenaikan BPIH. Berdasarkan hitungan itu, usulan komposisi biaya yang ditanggung jamaah dan penggunaan nilai manfaat (NM) menjadi 70:30 atau ditanggung jamaah sebesar Rp69,19 juta (30 persen).

Toh persoalan penyelenggaraan ibadah haji yang berlangsung pada Mei-Juni 2024 membawa kisah lain lagi. Kali ini Pansus Angket Haji DPR yang beraksi, sejak pengiriman Tim Pengawas Haji dan inisiatif pembentukan Pansus pada awal Juli 2024.

hensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji 2024 dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya.

Ada persamaan dan perbedaan rekomendasi KPK dan Pansus Angket Haji DPR. Namun, pemerintah yang telah berganti.

Kementerian Agama masih menyelenggarakan ibadah haji 2025 dan menerapkan kajian maupun rekomendasi dari KPK serta Pansus Angket Haji DPR RI. Setelah itu, menurut rencana, Badan Penyelenggara Haji yang menyelenggarakannya mulai 2026. ♦



MENDALAMI HASIL PANITIA ANGKET HAJI

Setiap musim haji memiliki keunikan sendiri-sendiri. Termasuk penyelenggaraannya. Panitia Angket Haji DPR 2024 adalah salah satu yang menonjol. Bahan perbandingan untuk penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya.

Berawal dari kegiatan rutin Tim Pengawas (Timwas) Haji. Namun, sejak awal pula, Timwas sudah menyoroti penambahan kuota haji Indonesia dari 221 menjadi 241 ribu sebagai tantangan bagi penyelenggara haji 2024.

Nah sebelum jamaah haji terakhir pulang ke Indonesia pada Rabu, 3 Juli 2024, Timwas sudah bersepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Belakangan namanya berubah resmi menjadi Panitia Angket DPR RI 2024. Toh sorotan utamanya tetap pada 20 ribu kuota tambahan dari semula 221 ribu menjadi 241 ribu jamaah.

"Jumlah tambahan kuota baru yang diberikan oleh Saudi sejumlah 20 ribu jamaah baru ini hendaknya digunakan dengan amat sangat sungguh-sungguh, tidak ada permainan, sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jamaah-jamaah yang sudah mengan-

tre begitu lama. Di satu sisi pelayanan tetap optimal dan memberi keamanan dan kenyamanan para jamaah," kata Wakil Ketua DPR 2019-2024 Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) yang juga menjadi Ketua Timwas Haji 2024 pada Senin 1 Juli 2024.

DPR memberangkatkan 40 anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024 dengan perincian dua orang pimpinan DPR, 28 anggota Timwas Haji dari Komisi VIII, dan 10 anggota Timwas Haji dari Komisi/badan terkait. Timwas DPR yang diketuai Gus Muhaimin berangkat dalam dua tahap. Tahap I pada 6 Juni dan tahap II pada 9 Juni 2024.

Seiring proses di parlemen, Panitia Angket Haji pun terbentuk dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Dihitung-hitung, sejak 1 Juli hingga penyampaian laporan di Sidang Paripurna terakhir DPR 2019-2024 pada Senin, 30 September 2024, Panitia

Angket menuntaskan tugas rentang waktu 90 hari.

"Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama RI, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), jamaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan di dalam negeri dan luar negeri," ungkap Ketua Panitia Angket Haji Nusron Wahid dalam Rapat Paripurna DPR terakhir itu. Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024, lanjut Nusron, menghasilkan temuan sebagai berikut:

Pertama, Kelembagaan:

Kementerian Agama RI dalam pe-

nyelenggaraan ibadah haji masih berperan sebagai regulator dan operator/pelaksana. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan Government to Government (G to G) akan tetapi berubah menjadi Government to Business (G to B), sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.

Kedua, Kebijakan

1. Dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji Indonesia.
2. Kementerian Agama c.q. Dirjen PHU melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

Ketiga, Distribusi Kuota Haji

1. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan, dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan di mana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahromnya.
2. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5,678 nomor porsi kuota "batu"; yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jemaah haji berada/bertempat tinggal.
3. Terdapat ketidaksinkronan antara Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan Surat Edaran Direktur Bina Haji Khusus dengan nomor B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024 tentang Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Pengisian Sisa Kuota Tahun 1445H/2024M dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 65 ayat (2).
4. Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama RI sebagai aparat pengawas internal tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan, sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keempat, Siskohat dan Siskopatuh

1. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Se-

Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.

2. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Iba-



lain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Pendaftaran Haji Reguler, Subdit Dokumentasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bank Penerima Setoran Biaya

dah Haji dan umrah, dan PIHK sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang berangkat haji tanpa antrian.

3. Lemahnya pengawasan terhadap verifikasi yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data.

Kelima, Pendaftaran

1. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024).
2. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan

Keenam, Nilai Manfaat

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, dimana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun ber-

jalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrean.

Ketujuh, Jemaah Cadangan Lunas Tunda

Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30 persen dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tunda.

Kedelapan, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi PIHK yang tidak melaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan Haji.

Kesembilan, Pelayanan

Pelayanan di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

Berdasarkan delapan temuan itu, Pani-

tia Angket Haji merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.
3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendata-ng peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
4. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
5. Pansus mengharapkan pemerintahan



mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama melalui juru bicaranya Sunanto pun sudah menanggapi hasil Pansus Angket Haji itu. Khusus tentang kuota haji tambahan Kemenag mengemukakan sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

“Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Menteri Agama. Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan,” ungkap Cak Nanto, nama ringkas Jubir Kemenag pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, sambungnya, Indonesia setidaknya tiga kali menerima kuota tambahan. Praktik pembagiannya, kata Cak Nanto, tidak pernah sama.

Pada 2019, Indonesia mendapat 10.000 kuota tambahan dan itu seluruhnya diberikan untuk jemaah haji reguler. Pada 2023, Indonesia mendapat 8.000 kuota tambahan. Sebanyak 92 persen untuk jemaah haji reguler dan delapan persen untuk jemaah haji khusus. Sedangkan pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.

“Pada 2022, Indonesia mendapat kuota 100.051, dibagi 92.825 untuk haji reguler dan 7.226 untuk haji khusus. Prosentase kuota haji khusus hanya 7,2 persen tidak sampai delapan persen. Kemenag waktu itu akan digugat PIHK. Tapi memang keputusan dari Arab Saudinya pembagiannya

ta tambahan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kanal-kanal berita resmi Kemenag,” lanjut Cak Nanto.

Nah, setelah pemerintahan berganti, yang terjadi adalah pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji. Badan baru ini yang menurut rencana menyelenggara-



sudah seperti itu,” ungkap Cak Nanto.

Menurut dia, Kemenag tentu melakukan berbagai kajian untuk menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi kuota tambahan. “Kemenag juga saat ini memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta memperkuat transparansi dalam menyampaikan informasi ke publik yang lebih luas. Misalnya, kuota dasar dan kuo-

kan haji mulai 2026.

Pada 2025 Kementerian Agama masih harus menunjukkan kinerjanya yang terbaik untuk penyelenggaraan haji 1446 hijriyah. Toh masih banyak hal yang perlu pencermatan dan langkah perbakan (good practice) sebagaimana laporan Panitia Angket sepanjang 143 halaman itu. ♦



MENGGAGAS KAMPUNG HAJI INDONESIA

Gagasan membangun kampung haji di Kota Makkah Arab Saudi muncul kembali. Sisi ubudiyah (ibadah) dan muamalah (sosial ekonomi) sekaligus.

Bukan sembarang gagasan sebenarnya. Terlebih, shohibul bait (tuan rumah) Arab Saudi sebagai khadim al-Haramain asy-Syarifain (penjaga dua kota suci yang mulia: Makkah dan Madinah) telah menyediakan lahan seluas 50 hektare dengan konsesi selama 100 tahun.

Maka Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i pun mengemukakan, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memfasilitasi (memudahkan) jamaah haji asal Indonesia.

Latar belakangnya, Indonesia adalah negara yang mengirim jamaah haji dan umrah terbesar di seluruh dunia. Dalam setahun hampir dua juta jamaah melaksanakan umrah. Plus 241 ribu bahkan lebih masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah ke Makkah.

Dengan begitu, kata Wamenag, kontribusi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji begitu besar. Namun hal itu belum selaras dengan pelayanan yang didapatkan jamaah haji Indonesia terutama saat berada di Armuzna, (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

"Atas kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia," ungkap Wamenag yang biasa disapa Romo Syafi'i di acara soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 1 November 2024.

Menurut Wamenag, kampung haji itu merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indone-

sia. Ia menjelaskan, keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

"Padahal, jamaah haji Indonesia telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya," ungkap Romo.

Meskipun pembangunan kampung haji ini belum bisa terlaksana, sambungannya, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya. "Tapi, untuk haji tahun ini (1446 hijriyah/2025 masehi) mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji," lanjut Wamenag.

Pendirian kampung haji Indonesia di Makkah lanjut Romo sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan



Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS). Arab Saudi kabarnya telah menyediakan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun.

Menelusuri informasi haji hingga lebih 15 tahun ke belakang, memang pernah terbersit kabar soal fasilitas bagi jamaah haji ini. Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman (2005-2009) Habib Salim Segaf Aljufri pernah mengemukakan soal kampung haji yang ia sebut sebagai pondokan.

"Sudah ada MoU antara pemerintah Indonesia dengan dua pengembang swasta Arab Saudi terkait rencana pembangunan pondokan bagi jamaah haji Indonesia. Nantinya si pengembang ini yang mencari lahannya, membangunnya. Sementara kita nanti yang akan menyewa pondokan itu untuk jangka panjang," ungkap Salim Segaf Aljufri yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah dan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.

Pada saat itu, akhir November 2008, Habib Salim sudah mengungkapkan tahapan berikutnya adalah perjanjian. "Tahapan berikut jelas agreement. Ketika MoU itu pasti sudah ada kira-kira di mana lokasinya yang akan dibangun. Seingat saya ada beberapa tempat seperti Ibrahim Halim," ujarnya.

Menurut Salim, sepengetahuannya, yang tertuang dalam MoU itu yaitu untuk pembangunan dengan kapasitas seratus ribu lebih jamaah. "Bila jadi terbangun, masalah pondokan Insya Allah 80 persen mendekati penyelesaian. Karena kan tidak mungkin pondokan itu dibangun di jarak 10 km dari Masjidil Haram. Pasti dibangun di lokasi yang jamaah bisa berjalan kaki," ungkapnya.

Hanya saja diakui Salim, saat ini tentunya semua pihak terkendala masalah kondisi krisis keuangan global. Baik mungkin si pengembang untuk merealisasikan pondokan tersebut, maupun pemerintah Indonesia dalam menyediakan dana untuk menyewa jangka panjang.

"Diperkirakan pada 2010, realisasi pembangunan pemondokan haji Indonesia dapat dilaksanakan. Pembangunan pemondokan haji itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah jauhnya jarak pemondokan jamaah ke Masjidil Haram," katanya.

Perkiraan Habib Salim itu memang meleset. Namun, gagasan tadi muncul kembali setelah Prabowo Subianto menjadi Presiden.

Nah, menyambung informasi kampung haji dari Wamenag Romo Syafi'i,

berlangsung pertemuan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Mochamad Irfan Yusuf dan wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Erick mengemukakan, ada kemungkinan PT Pembangunan Perumahan (PP) menginisiasi proyek perkampungan haji ini. "Untuk PP kembali kita sedang melihat apakah mungkin mimpi besar kita

sambungannya, hanya melakukan pembicaraan awal untuk proyek tersebut.

"Masih terlalu dini untuk bicara seperti itu. Tapi kita nanti mengumpulkan berbagai pemikiran-pemikiran untuk menjadikan pijakan nantinya," ujar Irfan.

Toh Erick mengatakan pula akan mendorong beberapa perusahaan pelat merah, seperti Garuda, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Indonesia Financial



semua, tentu Pak Prabowo khususnya yang memang sudah berulang-ulang menyatakan coba dilihat kemungkinan bagaimana ada perkampungan Indonesia khususnya rumah Indonesia untuk pelayanan haji terpadu," ungkap Erick Selasa, 19 November 2024.

Sedangkan Kepala BP Haji Irfan Yusuf mengemukakan, belum ada keputusan pembangunan kampung haji akan dilakukan PT PP. Kementerian BUMN,

Group (IFG) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat tiga BUMN tersebut merupakan stakeholder dalam penyelenggaraan haji.

"Nanti kita coba buat tim untuk mulai berkolaborasi. Saya sudah minta BSI untuk mengawal transisi bagaimana ini bisa berjalan sampai ke depan," ungkapnya.

Begitulah. Soal penyelenggaraan ibadah haji memang memiliki dua sisi: ubudiyah dan muamalah. ♦

SELF DECLARE HALAL DAN LABEL "NO PORK NO LARD"

Banyak usaha makanan (resto) yang memasang label 'No Pork No Lard' sebagai "wujud self declare halal". Strategi ini digunakan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka bebas dari babi.

Apakah label "No Pork No Lard" dapat menjamin konsumen memperoleh produk yang halal?

Pada prinsipnya pe-label-an resto dengan istilah "No Pork No Lard" merupakan contoh bentuk penyederhanaan pemahaman masyarakat tentang Self Declare Halal. Padahal bukan begitu maksudnya self declare halal.

Self declare halal merupakan skema sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan sepihak pelaku usaha bahwa benda atau jasa yang dipasarkannya adalah halal. Jadi, pe-label-an semacam itu tidak otomatis menjamin suatu produk benar-benar halal.

Konsumen dituntut lebih jeli untuk mencari produk yang lebih aman dan terjamin kehalalannya. Yaitu dengan cara memperhatikan apakah sesuatu yang akan dikonsumsi itu sudah mengantongi sertifikat halal atau belum?

Sertifikasi halal mencakup proses yang jauh lebih luas, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Semua tahap harus sesuai



oleh M Ishom el-Saha

penilaian inilah yang dijadikan pertimbangan penetapan kehalalan benda dan jasa oleh Komite Fatwa Produk Halal yang anggotanya ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pendamping PPH adalah volunteer berpendidikan minimal SLTA yang telah mendapatkan pelatihan singkat. Mereka hanya dibekali pendekatan penilaian halal positive list of materials, seperti tidak mengandung babi, alkoholnya, darah, dan barang najis lainnya. Dikarenakan kompetensinya terbatas, maka pengetahuan pendamping

lusuri rupanya produk minuman itu mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self declare halal.

Produk minuman itu dihasilkan UMKM yang dianggap oleh pendamping PPH sebagai produk yang berbahan dasar positive list atau terbuat dari daftar bahan yang tidak kritis. Oleh sebab itu pendekatan penilaian yang dilakukan Pendamping PPH adalah Halal Positive List of Materials.

Tapi rupanya produk yang berbahan dasar positive list, misalnya tape ketan atau tape singkong, jika didiamkan lama akan berobah layaknya minuman beralkohol. Itulah sebab musabab kenapa produk minuman beralkohol salah satu UMKM dapat lolos dan mendapatkan sertifikasi halal dengan skema self declare.

Secara prosedural skema self declare halal pada produk yang termasuk kategori halal positive list of materials dipandang sudah tepat. Akan tetapi masalahnya adalah ketika bahan dasar yang semula dianggap oleh pendamping PPH sebagai positive list ternyata merupakan bahan dasar kritis atau high list.

Produk atau jasa yang menggunakan bahan dasar high list untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak dapat dilakukan secara self declare. Pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal harus menyertakan penilai halal atau profesional yang ahli di bidangnya, minimal berpendidikan sarjana. Penilai halal melaporkan kehalalan produk kepada auditor halal sebelum akhirnya mendapatkan fatwa halal untuk diterbitkan sertifikasi halal. Itulah skema sertifikasi halal pada produk berbahan pokok high list.

Upaya pemerintah mempercepat perolehan produk UMKM dengan menggunakan skema self declare halal adalah patut kita apresiasi. Akan tetapi dalam kasus-kasus sertifikasi halal produk UMKM yang ternyata menggunakan bahan dasar high list, kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal ini khususnya Pendamping PPH memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif supaya mereka lebih memahami produk-produk yang berbahan high list. Termasuk produk yang secara kasat mata tergolong positive list tetapi berpotensi mengandung high list.

Selain itu dipandang perlu membangun ekosistem kehati-hatian daripada kemandirian dalam pengembangan ekosistem halal di Indonesia. ♦Kemenag

dengan syariat Islam.

Resto yang dikategorikan UMKM minimal untuk dapat melakukan self declare halal tetap memerlukan penilaian dari pendamping PPH (proses produk halal). Hasil

PPH juga terbatas di dalam melakukan penilaian.

Contohnya beberapa bulan lalu sempat viral produk minuman beralkohol mencantumkan logo sertifikat halal. Sesudah dite-





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DI LUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781
0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIMCHOICE

APA
KABAR
SERTIFIKAT
HALAL

SIAP-SIAP
KURIKULUM
MASJID

MENGAGAS (LAGI)
KAMPUNG HAJI
INDONESIA

PEREMPUAN
WALIYULLAH
AISYAH
AL MARWAZIYAH

ELEN
SETIADI
MASIH
SIBUK
DI SUMSEL

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

BERSIH BERSIH KEMENAG